



Jurnal Forum Ilmu Sosial

Volume 43 Nomor 1 Juni 2016

ISSN 1412-971X

Ketua Penyunting
Maman Rachman

Wakil Ketua Penyunting
Eva Banowati

Sekretaris Penyunting
Edi Kurniawan

Bendahara
Setiajid

Penyunting Pelaksana
Cahyo Budi Utomo
Putri Agus Wijayati
Arif Purnomo
Juhadi
Sriyanto
At. Sugeng Priyanto
Puji Lestari
Thriwaty Arsal
Ninuk Sholikhah Akhiroh

Penyunting Ahli
Tri Marhaeni Pudji Astuti

Mitra Bebestari
Warsono (Universitas Negeri Surabaya)
Udin S. Winataputra (Universitas Terbuka)
Wahyu (Universitas Lambung Mangkurat)
Sapriya (Universitas Pendidikan Indonesia)
Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Pelaksana Tata Usaha
Suharyati
Mariyam

Penerbit
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Semarang (Unnes)

Alamat Penerbit
Gedung C7 Lantai 3 Kampus Sekaran
Gunungpati, Semarang 50229
Telp. (024) 8508006
Email : foris@mail.unnes.ac.id

Alamat E-Journal
<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/FIS>

Daftar Isi

- | | |
|---------|--|
| 1-12 | Energi Sosial di Pedesaan Dalam Memberdayakan Pembangunan di Desa.
(Penelitian Pada Beberapa Daerah Pedesaan Di Kabupaten Pacitan Jawa Timur)
Masrukhi, M.Pd. dan Indah Sri Utari, M.Hum |
| 13-25 | Peran Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran dalam Menguatkan Ekonomi Kerakyatan di Kelurahan Sekaran Kota Semarang.
Elly Kismini, Asma Luthfi dan Harto Wicaksono |
| 26-37 | Membaca Ulang Pendidikan Humanis (<i>Literacy Pendidikan Humanis</i>)
Yuni Suprpto, M.Pd |
| 38-45 | Dinamika Pendidikan Masyarakat Nelayan di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang.
Moh. Saiful Fatwa, M.Pd. |
| 46-62 | <i>Anut Grubyug</i>: Takluknya Petani Pada Mobilisasi Pembangunan.
Studi Kasus Pada Proyek Pengembangan Jarak Pagar Sebagai Sumber Energi Alternatif di Kecamatan Tepus, Gunungkidul, di Yogyakarta
Gunawan |
| 63-71 | Analisis Pola Pengelolaan Lahan Pertanian di Sekitar Meander Luk Ulo Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen.
Sriyono, Dewi Liesnoor Setyowati, Suroso dan Astari Amalia |
| 72-80 | Pembelajaran <i>Group Investigation</i> Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Materi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat.
Sugi, S.Pd., M.Pd. |
| 81-92 | Pengembangan Perangkat Pembelajaran IPS dengan Menggunakan Metode <i>brainstorming</i> untuk Meningkatkan Berpikir Kritis di Kelas V Sekolah Dasar.
Suhirno, Muhari dan Suhanadji |
| 93-101 | Existence In The Village Lanting House Cape Commercial District Nangga Pinoh Melawi West Kalimantan.
Mardiana dan Emi Tipuk Lestari |
| 102-110 | Pemenuhan Kebutuhan Jender Dan Pengurangan Kemiskinan: Studi Kasus dalam Pemerintahan Desa.
Tiyas Nur Haryani, Azyani, Puput |

Pembina : Moh Solehatul Mustofa, Penanggungjawab : Prof. Wasino,
Pengarah : Apik Budi Santoso, Ngabiyanto.
Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam media lain. Naskah diketik di atas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 22 halaman, dengan format tercantum pada halaman kulit belakang ("Ketentuan Penulisan Artikel Forum Ilmu Sosial"). Naskah yang masuk dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah, dan tata cara lainnya.



**ENERGI SOSIAL DI PEDESAAN DALAM MEMBERDAYAKAN
PEMBANGUNAN DI DESA
(Penelitian pada beberapa daerah pedesaan di Kabupaten Pacitan Jawa Timur)**

Masrukhi, M.Pd.

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES

Indah Sri Utari, M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2016
Disetujui Juni 2016
Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

*social energy, empowerment, rural
development*

Abstrak

Dalam kesederhanaan kehidupan masyarakat desa, terkandung energi sosial yang mampu menggerakkan dinamika pembangunan setempat. Energi sosial itu tumbuh dan berkembang dalam irama kehidupan masyarakat desa. Keberadaannya sangat kuat oleh karena diikat oleh tatanan nilai-nilai lokal berupa kekerabatan, nilai budaya dan kepemimpinan lokal. Oleh karena itu yang sangat menarik dari kajian ini adalah bagaimana energi sosial di desa menggerakkan dinamika pembangunan masyarakat desa. Dengan mengambil setting di desa terpencil pada tiga kecamatan di Kabupaten Pacitan, yaitu kecamatan Donorojo, kecamatan Tulakan, dan kecamatan Tegal Ombo, dan studi kasus sebagai pendekatan penelitiannya, kajian ini menjadi sangat penting oleh karena para pengambil kebijakan pembangunan di pedesaan tidak dapat mengabaikan keberadaan energi sosial ini dalam upaya memberdayakan masyarakat bagi pembangunan di pedesaan.

Abstract

In the simplicity of village life, embodied energy that can move the social dynamics of local development. Social energy that grow and develop in the rhythm of village life. Present at very strong by being bound by the order of local values in the form of kinship, cultural values and local leadership. Therefore, it is very interesting from this study is how to mobilize social energy in rural development dynamics of rural communities. Set in northern remote villages in three districts in Pacitan, namely districts Donorojo, sub Tulakan, and sub Tegal Ombo, and case studies as an approach to research, this study is very important because policy makers rural development can not ignore the existence of energy this social in an effort to empower communities for rural development.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi

- masrukhi@mail.unnes.ac.id
- indahsuji@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia selama ini, masyarakat pedesaan dengan nilai, kepemimpinan dan kearifan-kearifan yang dimilikinya acapkali disingkirkan atas nama “pembangunan”, dan “modernisasi masyarakat terbelakang” (Albrow, 2006; Anderson, 1996; Beilharz, 2002). Mereka dianggap bersifat “dekaden”, “pasif”, dan “primitif” yang berarti anti-modernitas (Beilharz, 2002). Maka tidak heran, jika atas nama pembangunan, terjadi proses marginalisasi dan penaklukan terhadap masyarakat pedesaan.

Oleh program pembangunan dengan sekalian produknya, masyarakat pedesaan makin kehilangan wahana untuk mengaktualisasikan hak-hak dasar mereka, seperti hak menunaikan ritual, hak untuk mengembangkan warisan budaya dan lain sebagainya (Albrow, 2006; Beilharz, 2002).

Secara umum, akibat hubungan konfliktual itu, tidak saja telah menimbulkan fragmentasi sosial yang rawan konflik, tetapi juga telah mengurangi pemanfaatan maksimal terhadap kekayaan “energi sosial” yang dimiliki masing-masing kelompok itu bagi kedamaian dan kesejahteraan bersama. Bagi masyarakat pedesaan, akibat marginalisasi dan penaklukan sistematis itu, adalah (1) “Energi sosial-budaya kreatif” yang dimilikinya sebagai modal sosial bagi kesejahteraan mereka, ikut dikorbankan”. (2) Sumber-sumber pengetahuan tradisional dan lokal yang sebenarnya merupakan kearifan lokal yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup para pendukungnya maupun bagi tujuan-tujuan pembangunan secara umum, ikut tersingkirkan. Dalam

kerangka kepentingan pembangunan ke depan, paradigma pembangunan seperti itu tidak lagi fungsional. Harus ada upaya yang sistematis dan konseptual untuk membangun paradigma baru yang bertumpu pada keadilan, kesejahteraan, emansipasi dan partisipasi dari masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada energi sosial-budaya kreatif (selanjutnya disebut: energi sosial) dalam kelembagaan lokal di pedesaan Pacitan sebagai modal sosial (*social capital*) setempat yang potensial menunjang kesejahteraan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Kelembagaan lokal dimaksud, adalah “pola perilaku yang mantap” berupa organisasi ataupun non-organisasi yang ada di lingkungan kecamatan dan desa.

Ada dua proposisi penelitian ini. *Pertama*, energi-energi sosial-budaya kreatif yang dimiliki masyarakat, selain merupakan modal sosial (*social capital*) yang berfungsi menjamin kesejahteraan bersama antara warga dan kelompok masyarakat setempat, juga diduga berperan sebagai jaringan kerjasama dengan pihak luar, termasuk dengan pemerintah. *Kedua*, di tengah keterbatasan sumber daya yang dihadapi pemerintah daerah (SDM, SDA, finansial), pendayagunaan energi sosial lokal akan sangat membantu pelaksanaan otonomi daerah yang bertopang pada ketahanan dan kemandirian daerah. Masalah pokok dalam kajian ini adalah, kelembagaan lokal dan energi sosial apa sajakah yang dimiliki masyarakat pedesaan di Pacitan, yang mampu mengeliminir kemiskinan dan potensial menunjang otonomi daerah.. Dari masalah pokok tersebut, beberapa

pertanyaan riset dimunculkan sebagai berikut. *Pertama*, sejauhmana dukungan keluarga dan ikatan kekerabatan berfungsi sebagai media kerjasama dan tolong-menolong dalam mengatasi masalah yang dihadapi para warga di masing-masing lingkungan sosial yang ada. *Kedua*, jaringan dan bentuk kerjasama apa sajakah yang dikembangkan di antara satuan lokalitas. *Ketiga*, sejauhmana dalam pola/nilai budaya lokal pada tiap komunitas budaya, berakar pranata-pranata yang bersifat menjamin kesejahteraan bersama dan ketahanan sosial setempat. *Keempat*, sejauhmana kepemimpinan lokal memiliki potensi sebagai energi sosial yang berfungsi mengarahkan masyarakat menuju pencapaian kesejahteraan bersama lewat berbagai kegiatan atau urusan. *Kelima*, apakah sekalian energi sosial lokal yang dimiliki masyarakat itu, dapat/telah diintegrasikan secara sinergis dengan paket program pemerintah daerah dalam kerangka otonomi, baik menyangkut kebijakan administratif dan managerial, perencanaan, legislasi/regulasi, serta pelayanan publik. Dan *Keenam*, faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan dalam upaya men-dayagunakan energi sosial lokal yang ada bagi kepentingan otonomi daerah, khususnya di lingkungan pedesaan di Pacitan.

Kajian ini dimaksudkan sebagai upaya menemukan potensi energi sosial kreatif di tingkat lokal (kecamatan dan desa) yang di dalam kemandiriannya mampu membina kerjasama dalam beragam ikatan sosial dan dalam ragam kerjasama yang dibina bersama, baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan pihak luar. Pengungkapan energi sosial lokal dimaksud,

dikaji pada empat aspek kelembagaan lokal yang ada di lingkungan pedesaan Pacitan, yakni: pada tingkat kekerabatan, lokalitas, nilai budaya, dan kepemimpinan lokal.

Untuk kepentingan penelitian ini, energi sosial lokal hendak dikaji pada empat aspek kelembagaan lokal yang ada, dengan perincian sebagai berikut. *Pertama*, kekerabatan: menyangkut sistem dukungan keluarga dan ikatan kekerabatan yang ada pada masing-masing lingkungan sosial dalam menghadapi dan mengatasi suatu masalah/kebutuhan. *Kedua*, lokalitas: bentuk kerjasama dalam masyarakat lokal di luar sistem keluarga dan kekerabatan, seperti tolong-menolong, arisan, dan bentuk kerjasama lainnya. Temuan Tim IPB menunjukkan bahwa di beberapa daerah pedesaan telah berkembang Koperasi Kredit Simpan Pinjam yang mempersatukan orang/keluarga/warga desa dari berbagai lapisan (Arinanto, 2001). *Ketiga*, nilai budaya: sejauhmana dalam pola budaya lokal berakar pranata-pranata yang bersifat menjamin kesejahteraan dan ketahanan sosial. *Keempat*, kepemimpinan lokal: sejauhmana kepemimpinan lokal memiliki potensi sebagai energi sosial yang berfungsi mengarahkan masyarakat menuju pencapaian kesejahteraan bersama. Kepemimpinan lokal di pedesaan terutama bertumpu pada pemuka adat, agama, dan pimpinan formal pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologi yang memadukan beragam kajian disiplin ilmu (sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan

administrasi/komunikasi pembangunan). Metode yang dipakai adalah metode kualitatif (Bogdan, R. C. dan Biklen, S.K, 2002). Dengan menggunakan metode studi kasus, dipilih tiga wilayah lingkungan ekosistem yang beragam di lingkungan Kabupaten Pacitan, sebagai setting penelitian, yaitu Kecamatan Donorojo (Desa Kalak dan Desa Widoro), Kecamatan Tulakan (Desa Jati gunung (Desa Plapar), Kecamatan Tegal Ombo (Desa Tegal Ombo), Kecamatan Pacitan (Desa Sirno Boyo dan Desa Sambong). Proses pemilihan sampel wilayah itu ditempuh lewat prosedur *purposive sampling*. Semua desa yang dijadikan sampel wilayah penelitian bercorak desa pertanian.

Data digali dari tangan pertama (informan dan responden) di desa, kecamatan, dan kabupaten kasus itu. Studi kasus melibatkan tokoh adat, pejabat pemerintah, pemuka lokal, dan warga masyarakat dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten sebagai (mitra) peneliti. Penggalan data dilakukan dengan teknik observasi, *indepth interview*, FGD. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pada tahap awal, dilakukan pengelompokan data menurut unsur kajian (dengan memakai model pengkodean Strauss dan Corbin, yakni *opencoding* dan *axial coding* (Bachtiar, 1990). Tahap kedua dilanjutkan dengan penataan hubungan antar-unsur kajian. Tahap berikutnya, mengkonfirmasi simpulan tentang keterkaitan unsur kajian tersebut dengan informan/responden. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan para ahli yang kompeten mengenai simpulan sementara peneliti. Tiap penyimpulan dan generalisasi pada tiap aras wilayah studi,

selalu didahului kegiatan konfirmasi data dan seminar, baik dengan (wakil) informan dan responden maupun dengan para ahli. Sebagai tahap akhir, dilakukan konseptualisasi untuk merumuskan hasil temuan.

HASIL PEMBAHASAN

Energi Sosial Dalam Kelembagaan Lokal di Pedesaan Pacitan

Energi sosial masyarakat di pedesaan Pacitan, diidentifikasi dalam empat aspek utama, yaitu: kekerabatan, lokalitas, nilai budaya dan kepemimpinan lokal.

Energi sosial dalam kekerabatan dalam lingkungan mereka terjalin dalam dua tipe, yaitu keluarga inti dan keluarga luas. Persekutuan adat berupa klan seperti umumnya dikenal dalam masyarakat adat tidak ditemukan. Dukungan utama yang dapat disumbangkan oleh kedua unit kekerabatan itu pada seorang petani adalah sumbangan tenaga. Mereka tidak mampu mendukung dalam bentuk bantuan modal karena merupakan keluarga miskin. Padahal kebutuhan yang paling pokok dari seorang petani dalam usaha pertanian dalam mengembangkan mata pencahariannya adalah modal. Energi sosial dalam lokalitas di kalangan masyarakat desa di Pacitan pada umumnya terjadi dalam bentuk gotong-royong menggarap tanah dan koperasi simpan pinjam. Bentuk gotong-royong dilakukan melalui mekanisme sewa alat pertanian, sewa lahan, dan sewa buruh tani.

Sedangkan energi sosial dalam nilai budaya adalah berupa sikap terhadap hidup. Sikap hidup orang petani di Pacitan bukanlah “ini atau itu”, melainkan “baik ini maupun itu” atau “bukan ini bukan itu”, artinya bukan

“terarah pada hidup ini”, juga bukan pula “terarah pada yang di luar hidup ini”.

Wujud paling nyata dari sikap tersebut adalah *narima*, ikhlas dengan segala keterbatasan yang ada. Sikap ini memunculkan *aja kesusu*, karena narima dipahami sebagai sabar menunggu waktu. *Aja ngaya*, karena narima berarti tenang, santai, menerima segala keterbatasan. Juga, sikap *aja serakah*, karena narima berarti ikhlas menerima apa yang telah ditentukan menjadi bagian kita. Narima bukan berarti tidak berusaha sebaik-baiknya. Peneakanannya terletak pada : tidak memaksakan sesuatu. Dalam narima juga tetap terdapat upaya untuk maju dan berkembang, namun upaya tersebut bukanlah tujuan akhir karena kemajuan dan perkembangan pada akhirnya adalah untuk mengembalikan keserasian, keseimbangan, dan kesatuan.

Sesuatu yang khas dalam pandangan mereka, realitas tidak dibagi dalam berbagai bidang yang terpisah tanpa hubungan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Hal ini berbeda dengan alam pikiran dunia Barat yang membedakan secara tegas antara dunia, masyarakat, dan alam adikodrati dimana masing-masing memiliki hukumnya sendiri. Selain sikap terhadap hidup, terdapat juga sikap terhadap kerja. Pandangan yang umum dianut dalam masyarakat desa di Pacitan adalah bahwa kerja sebagai petani merupakan bentuk kerja yang tergolong "kerja kasar". Apabila mungkin, kerja kasar itu perlu dihindari. Ia diperlukan, tapi tidak memiliki makna pada dirinya. Dalam keluarga petani di Pacitan, kerja dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Motif dasar seorang petani dalam

pandangan mereka misalnya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai suatu rutinitas. Berbeda halnya dengan pandangan para kelompok priyayi di Jawa pada umumnya, di mana kerja dipandang sebagai upaya mempertahankan tatanan. Begitu juga dengan kelompok santri juga melihat kerja sebagai upaya mendapatkan amal.

Di kalangan masyarakat desa di Pacitan, apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka dorongan untuk bekerja keras tidak lagi menjadi prioritas karena sikap hidup yang *aja ngaya* (tidak boleh memaksakan diri). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi orang petani, bekerja tidak terutama berorientasi pada prestasi.

Selanjutnya sikap terhadap waktu. Bagi mereka pada umumnya, waktu bukanlah yang utama. Jika sebagian masyarakat berprinsip waktu adalah uang, maka bagi mereka, waktu dan uang bukanlah yang terutama karena pada waktunya, segala sesuatu akan selesai dengan sendirinya. Harus sabar menunggu sampai waktu yang baik itu tiba, *aja kesusu* (jangan terburu-buru). Pada pandangan mereka, ada kesadaran akan kesinambungan yang amat dalam karena dalam pandangan Jawa waktu berjalan melingkar. Segala sesuatu berulang. Oleh karena itu, kebenaran adalah untuk dipertahankan dan dipelihara, bukan dicari. Keselarasan adalah untuk dipulihkan, bukan untuk dibentuk baru kembali setiap kali. Tradisi adalah untuk dipertahankan, bukan untuk dinilai dan diubah.

Demikian pula sikap terhadap alam. Mayoritas dari mereka memandang alam bukan sebagai sesuatu yang menguasai manusia, juga bukan sebagai obyek yang

harus ditundukkan, melainkan sebagai subyek sama seperti manusia karena keduanya tergantung sama lain. Oleh karena itu, keselarasan dan keserasian antara keduanya harus senantiasa dijaga. Hal ini seperti pada umumnya pandangan masyarakat Jawa bahwa pada hakekatnya petani Jawa tidak membedakan antara sikap religius dan bukan religius. Interaksi sosial sekaligus merupakan sikap terhadap alam, sebagaimana juga sikap terhadap alam sekaligus mempunyai relevansi social (Mulder, 1973:36) Setiap pribadi adalah jagad cilik yang mencerminkan jagad gede. Kerukunan harus dipelihara antara manusia dengan alam. Gangguan pada alam dimengerti sebagai peringatan, bahwa ada sesuatu yang salah pada hubungan antara mikrokosmos. Penebang pohon, menanam padi, atau membangun rumah, bukanlah sekedar masalah teknis. Sekalipun itu hanya dapat dikerjakan setelah alam memberi ijin untuk itu, yaitu setelah upacara-upacara tertentu dilaksanakan.

Selanjutnya sikap terhadap sesama. Pada umumnya mereka berpandangan bersifat totalistik, dualistik, dan hirarkis. Hal ini seperti pandangan masyarakat pedesaan di Jawa pada umumnya. Sikap yang totalistik, menempatkan individu sebagai bagian dari suatu ketertiban yang menyeluruh dan yang telah ditentukan. Cara pandang dualistik menuntut agar perbedaan antar individu diseimbangkan, bukan didorong atau dilenyapkan. Sedangkan pandangan yang hirarkis memandang konformitas pada status yang telah ditetapkan merupakan kunci bagi keserasian.

Sistem nilai pada komunitas mereka

tidak memberikan ruang yang cukup bagi ekspresi individu. Dapat dimengerti apabila di kalangan mereka kurang menghargai inisiatif individual karena dianggap meninggalkan tempat yang terjamin dan mengganggu keseimbangan yang sudah ada. Seperti ditegaskan oleh Frans Magnis Suseni bahwa pada tataran psikologis, inisiatif mudah menimbulkan ketegangan dan mengganggu ketenangan batin. Kondisi yang bertolak dari hubungan koordinasi yang erat antara bidang duniawi dan adiduniawi ini selalu akan mendukung sikap konservatif dan menolak perubahan-perubahan (Beilharz, 2002).

Sikap seperti itu akan lebih dimengerti jika ditempatkan dalam konteks pandangan dunia orang Jawa secara keseluruhan. Dalam pandangan Geertz (1961:146). Ada dua kaidah yang paling menentukan dalam pola pergaulan masyarakat Jawa. Kaidah pertama adalah prinsip kerukunan, yaitu bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik. Kaidah kedua merupakan prinsip hormat yang menuntut agar manusia senantiasa menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Kedua prinsip itu merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk konkret semua interaksi masyarakat Jawa (Beilharz, 2002).

Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam harmoni. Rukun berarti “berada dalam keadaan selaras”, tenang dan tentram”, tanpa perselisihan dan pertentangan”, “bersatu dalam maksud untuk saling membantu”. (Murder, 1978:39). Rukun adalah keadaan

ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan-hubungan sosial : dalam keluarga, di desa, atau juga dalam setiap pengelompokan tetap.

Terdapat dua segi tuntutan kerukunan. *Pertama*, dalam pandangan Jawa masalahnya bukan penciptaan keadaan keselarasan sosial, melainkan lebih pada untuk tidak mengganggu keselarasan yang diandaikan sudah ada. Dalam perspektif Jawa ketenangan dan keselarasan sosial merupakan keadaan normal yang akan terdapat dengan sendirinya selama tidak diganggu. Prinsip kerukunan menuntut untuk mencegah segala cara kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan ketenangan dalam masyarakat. Rukun berarti berusaha untuk menghindari pecahnya konflik-konflik. Oleh karena itu prinsip kerukunan sebaiknya tidak disebut prinsip keselarasan melainkan, dengan mengikuti Ann R. Willner, “prinsip pencegahan konflik (Beilharz, 2002).

Kedua, penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Artinya, yang diatur adalah permukaan hubungan-hubungan sosial yang kentara sehingga yang perlu dicegah adalah konflik yang terbuka. Hildred Geertz menyebut keadaan rukun ini sebagai *harmonius social appearances* (Geertz, 1973: 72).

Kerukunan menuntut agar individu bersedia menomorduakan, bahkan, kalau perlu, melepaskan kepentingan pribadi demi kesepakatan bersama (Benda, 1969:86). Mengusahakan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan persetujuan masyarakat, berusaha untuk maju sendiri tanpa mengikutsertakan kelompok dinilai kurang baik. Begitu pula mengambil inisiatif sendiri

cenderung tidak disukai. Individu seharusnya selalu bertindak bersama dengan kelompok. Mengambil posisi-posisi yang terlalu maju, meski pada akhirnya akan menguntungkan bagi seluruh kelompok, juga dianggap tidak pantas (Mulder, 1973:86).

Motivasi untuk bertindak rukun bersifat ganda : di satu pihak individu berada di bawah tekanan berat dari pihak lingkungannya yang mengharapkannya bersikap rukun dan memberi sanksi terhadap kelakuan yang tidak sesuai, sedangkan di lain pihak individu merasa bersalah dan malu apabila kelakuannya mengganggu kerukunan. Dalam etika dibedakan antara prinsip moral dan prinsip penata masyarakat. Prinsip moral menuntut sikap batin yang memang harus terwujud dalam tindakan lahiriah, sedangkan prinsip penata masyarakat memuat norma kelakuan yang sepenuhnya dipaksakan oleh masyarakat tidak peduli bagaimana sikap batin seseorang. Termasuk di dalamnya adalah norma hukum.

Prinsip kedua yang dirasakan sangat menentukan dalam pola pergaulan masyarakat Jawa menurut Hildred Geertz adalah prinsip hormat. Prinsip ini didasarkan pada suatu cita-cita tentang suatu masyarakat yang teratur baik, di mana setiap orang mengenal tempat dan tugasnya dan dengan demikian ikut menjaga agar seluruh masyarakat merupakan suatu kesatuan yang selaras. Mereka yang berkedudukan lebih tinggi harus diberi hormat. Apabila setiap orang menerima kedudukannya, maka tatanan sosial terjamin. Oleh karena itu orang jangan mengembangkan ambisi, persaingan, karena merupakan sumber bagi segala perpecahan, ketidakselarasan dan kontra-

diksi (Mulder, 1990:41).

Prinsip-prinsip tersebut mengalahkan prinsip-prinsip regulatif sosial lain, seperti misalnya hukum positif. Keunggulannya, kedua prinsip tersebut merupakan suatu kenyataan sosiologis. Dalam pandangan Jawa, prinsip-prinsip keselarasan harus didahulukan dari hukum positif.

Masyarakat Jawa berpandangan bahwa usaha untuk menjamin kepentingan dan hak masing-masing individu tidak boleh mengganggu keselarasan sosial. Apa pun yang diharapkan dan diusahakan oleh individu, betapa pun hak dan kepentingannya, bagaimana ia menilai suatu keadaan, pandangan Jawa mengarahkan individu untuk bertindak sejauh keselarasan tetap dijaga dan derajat hirarkis tetap dihormati. Prinsip kerukunan dan hormat menuntut agar selalu menguasai perasaan dan keinginan dengan kesediaan untuk memomorduakan kepentingan pribadi terhadap pertahanan keselarasan masyarakat.

Energi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Energi sosial lokal di pedesaan memiliki peran yang sangat strategis bagi upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini terkait dengan karakteristik energi tersebut yang secara *inherent* berada, tumbuh, dan berkembang di kalangan masyarakat desa. Oleh karena itu upaya memberdayakan masyarakat dalam pembangunan pedesaan tidak dapat mengabaikan energi sosial lokal tersebut.

Salah satu peran *energy social* ini adalah melalui fungsionalisasi kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat

desa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat, yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Strategi pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pengembangan komunikasi sosial, mengintegrasikan aliansi mitra strategis ke dalam program pembangunan, melakukan pendekatan langsung kepada kelompok sasaran dan melakukan pendekatan dari segi agama dan budaya masyarakat setempat.

Dari kehidupan masyarakat desa di daerah penelitian ditemukan bahwa strategi mengembangkan komunikasi lingkungan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain penemukenalan tokoh masyarakat yang mampu menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat. Kemudian internalisasi aliansi mitra strategis ke dalam program yang dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan dukungan dan pengakuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai potensi posisi tawar untuk memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan. Sedangkan pendekatan langsung kepada kelompok sasaran dilakukan kepada kelompok *profesi* di pedesaan seperti pekerja, buruh, petani, nelayan, pengusaha dan lain-lain.

Pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara dialog, pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Dalam perspektif sosiologis, upaya-upaya inilah yang dikenal dengan *community empowerment* yang meliputi penguatan inisiatif lokal, peningkatan posisi tawar masyarakat (*bargaining power*) dan

orientasi “gerakan”. Konsep ini menekankan upaya motivasi dan stimulasi kepada masyarakat untuk dapat mencapai kemandirian dan keberdayaan dalam menyikapi persoalan.

Strategi pemberdayaan masyarakat desa tersebut akan berhasil dengan baik, manakala masyarakat sadar dan paham akan kebutuhannya; mendapatkan informasi yang benar; termotivasi untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan demi kepentingan umum, mendapat respons yang cukup dari pemerintah.

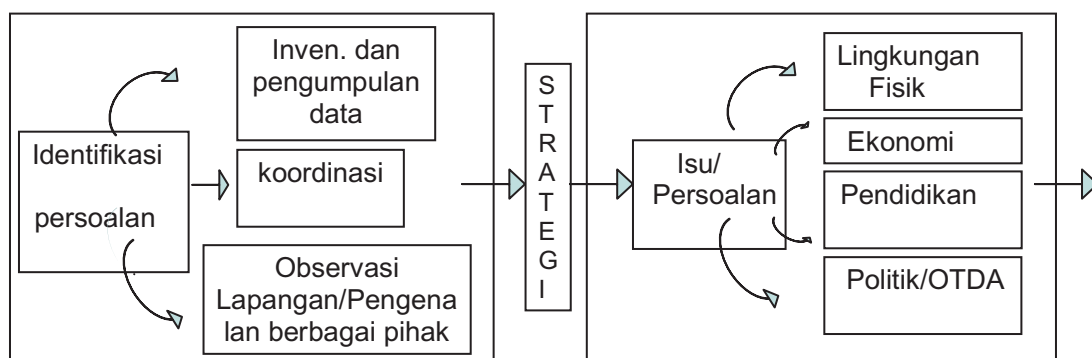
Masyarakat pedesaan di Kabupaten Pacitan Jawa Timur, yang 93% hanya berpendidikan sampai sekolah dasar baik tamat ataupun tidak tamat, memerlukan sentuhan intuitif yang efektif dalam memberdayakan potensi mereka dalam pembangunan di desanya. Dengan sentuhan yang efektif tersebut, tanpa terasa mereka dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Sentuhan yang dimaksud adalah berupa terbinanya ikatan emosional antara agen-agen pemberdaya dengan masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga terjalin secara bersama-sama rasa saling percaya, membutuhkan bersama, serta visi bersama. Dengan demikian proses pemberdayaan dimaksud tidak mengarah pada proses instruksi dari agen-agen

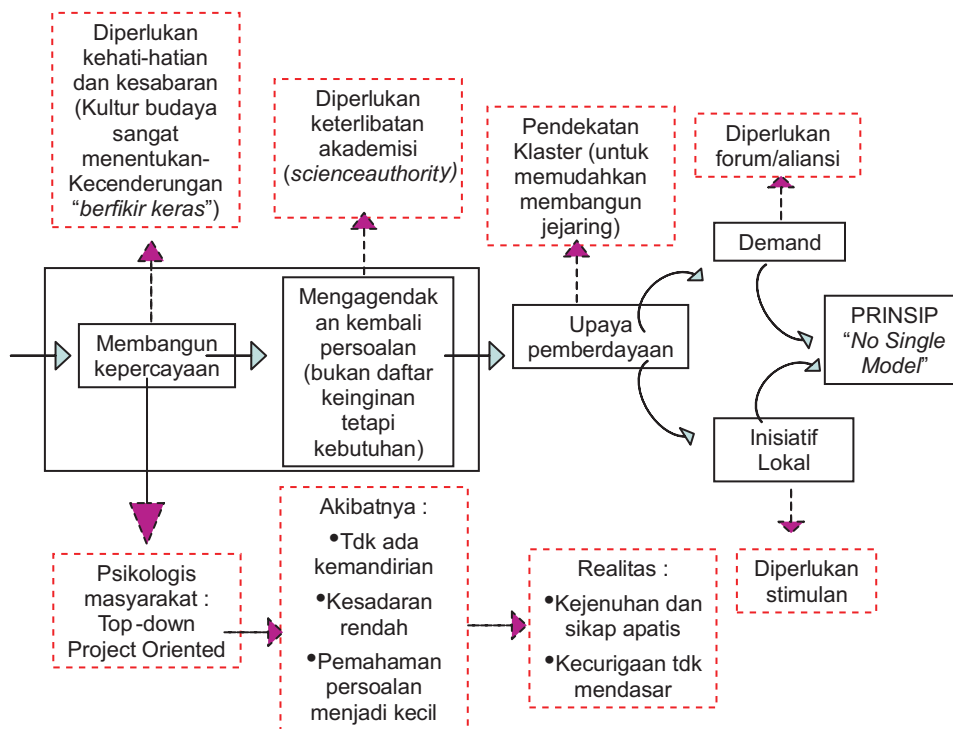
pemberdaya, baik formal (lurah, ketua RW, ketua RT) maupun informal (guru, kyai, aktifis sosial).

Mencermati kondisi lapangan yang ada, ditemukan betapa *energy social* mempunyai kekuatan yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat pada pembangunan di tingkat lokal. Beberapa langkah dari energi sosial dalam memberdayakan masyarakat teridentifikasi secara sistematis mulai dari identifikasi persoalan, koordinasi, pengetrapan strategi yang didasarkan kepada isu-isu lokal yang berkembang, membangun kepercayaan publik yang kemudian mengemas kembali agenda persoalan yang bukan merupakan daftar keinginan tetapi merupakan daftar kebutuhan masyarakat.

Atas dasar identifikasi tersebut kemudian dilakukan upaya pemberdayaan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan *demand* dan *inisiatif* lokal melalui prinsip *no singe model*. Proses pemberdayaan yang dilakukan disusun ke dalam konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Secara visual langkah-langkah pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini





Berdasarkan bagan di atas, upaya pemberdayaan masyarakat berawal dari identifikasi persoalan dengan melakukan inventarisasi dan pengumpulan data, observasi lapangan atau pengenalan berbagai pihak yang terkait dan melakukan koordinasi dengan pemerintahan dalam level kabupaten/kota. Tahap berikutnya adalah membuat strategi dan penerapan strategi yang didasarkan kepada isu-isu lokal yang berkembang seperti lingkungan fisik, ekonomi, pendidikan, dan politik. Langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan publik dengan memperhatikan budaya setempat. Dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya yang paling penting dilakukan adalah membangun kepercayaan kepada masyarakat.

Setelah kepercayaan terbangun, langkah yang diambil kemudian adalah mengagendakan kembali persoalan-persoalan yang menyangkut dan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini persoalan disusun

bukan berdasarkan daftar keinginan tetapi merupakan daftar kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks demikian, peran unsur akademis (guru, mahasiswa, para pemuka agama setempat) menjadi sangat penting guna pembekalan informasi dan pengetahuan kepada kader-kader pendamping masyarakat. Selain itu, pendekatan klaster dalam hal ini perlu dilakukan, karena dari sini kemudian timbul simpul-simpul sebagai jejaring yang dapat membangun kekuatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan *demand* dan inisiatif lokal melalui prinsip *no single model*. Artinya tidak ada model yang dapat direplikasikan secara utuh pada daerah satu dengan lainnya. Untuk itu, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perlu dilakukan *main-tenance*. Pola-pola *maintenance* yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Pertama, pembinaan terhadap kelompok yang telah terbentuk dalam upaya keberlanjutan kemitraan. Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala dilakukan

pemantauan perkembangan kondisi kelompok dan gerakan-gerakan aktivitas yang dilakukan. *Kedua*, memberikan stimulan terhadap peluang-peluang *inisiatif lokal* dan *demand* sebagai pola pemotivasian akan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, kegiatan diarahkan lebih kepada kegiatan nyata yang diinternalisasikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada lokus aktivitas. *Keempat*, penggalangan komitmen secara terus menerus, sehingga konsistensi terhadap gerakan masyarakat dapat terus tumbuh dan berkembang. *Kelima*, memanfaatkan lembaga lokal yang telah terbentuk agar lebih mudah melakukan pergerakan. Dan *ketujuh*, berupaya tidak menggunakan *single model* pemberdayaan, karena karakteristik dan persoalan masyarakat yang berbeda.

Selanjutnya, dengan mengamati kondisi lapangan yang ada, model pemberdayaan yang dilaksanakan tersebut akan lebih sistematis jika dikemas dalam tujuh langkah berikut.

Pertama, melakukan meta-plan terhadap permasalahan yang terjadi pada setiap wilayah melalui pendekatan pengelompokan wilayah (*cluster*) yang mendesak untuk ditangani berkaitan dengan isu-isu strategis dengan melibatkan semua unsur-unsur yang secara aktif terlibat. *Kedua*, melakukan inisiasi dan pengenalan program kepada *civil society* di wilayah tertentu seperti para tokoh agama, tokoh adat, pemuka masyarakat, ketua kelompok, individu, LSM, tokoh ormas, organisasi-organisasi profesi dan lain sebagainya.

Ketiga, pembekalan pelatihan semacam ToT (*training of trainers*) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi

setempat sebagai fasilitator atau mitra kerja. ToT ini merupakan pelatihan untuk pelatih guna peningkatan kapasitas individu dari pasif menjadi aktif dengan tujuan pembentukan kader-kader perintis. *Keempat*, penguatan komitmen yang diwujudkan dengan aksi nyata sebagai langkah awal melalui program percontohan. *Kelima*, pembentukan jejaring diantara mereka dan mulai menularkannya kepada kelompoknya masing-masing untuk memperluas pengaruhnya ke kawasan-kawasan sekitarnya. Hal ini terindikasi dengan pembentukan aliansi-aliansi strategis.

Keenam, mulai membangun instalasi dan menghubungkan kekuatan komunitas di tiap kelompok wilayah (*cluster*) satu sama lain antar wilayah lintas daerah sehingga merupakan poros yang kuat. *Ketujuh*, ekspansi dan perluasan jejaring ke wilayah-wilayah pengembangan yang strategis untuk ditangani di luar poros yang terbangun dan memelihara kesinambungan hubungan informasi dan komunikasi di masing-masing klaster, sekaligus mengevaluasi sampai terbangunnya kesadaran kolektif.

SIMPULAN

Energi sosial di pedesaan yang keberadaannya merupakan bagian inheren dari kehidupan masyarakat desa, memiliki potensi yang strategis dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat desa. Energi ini berupa paduan yang solid dari seluruh potensi elemen masyarakat, mulai dari kelompok pendidik, pengusaha, petani, pelajar, tokoh agama, tokoh adat; yang semua tersedia dalam kehidupan masyarakat

desa.

Dukungan keluarga dan ikatan kekerabatan berfungsi sebagai media kerjasama dan tolong-menolong dalam mengatasi masalah yang dihadapi para warga di masing-masing lingkungan sosial yang ada. Bahkan tampak lebih efektif mengatasi masalah di masyarakat pedesaan Pacitan melalui forum-forum kekerabatan. Hal ini didasarkan pada rasa saling percaya diantara anggota masyarakat desa, yang dibingkai dengan ikatan emosi dan tata nilai yang sama. Kondisi inilah yang sangat strategis bagi upaya pemberdayaan masyarakat bagi pembangunan desa.

Kepemimpinan lokal memiliki potensi sebagai energi sosial yang berfungsi mengarahkan masyarakat menuju pencapaian kesejahteraan bersama lewat berbagai kegiatan atau urusan, terdapat kecenderungan di masyarakat pedesaan bahwa kepemimpinan informal yang dimiliki para tokoh masyarakat tidak kalah efektifnya dengan kepemimpinan formal. Hal ini didasarkan pada persepsi masyarakat desabawa pemimpin informal memiliki keunggulan-keunggulan yang harus selalu dihormati dan ditaati. Dengan demikian menggerakkan para pemimpin informal di daerah pedesaan menjadi sangat penting artinya bagi upaya pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian terdapat empat aspek penting kelembagaan lokal yang ada di lingkungan pedesaan Pacitan, yaitu kekerabatan, lokalitas, nilai budaya, dan kepemimpinan lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Albrow, M. *Globalization Knowledge and Society*, London: Sage Publication, 2006.
- Anderson, Benedict R.O.G., *Mythology and the Tolerance of the Javanese*, Ithaca: Monograph Series, Modern Indonesia Project, Cornell University, 1996
- — — — —, *Komunitas - Komunitas Terbayang*, (terj) Intan Naomi, Diterbitkan atas Kerjasama Insist Jakarta, 2001.
- Arinanto, Satya. *Islah dalam Perspektif Keadilan Tradisional*. Kompas, 16 Maret 2001.
- Bachtiar, H. W., *Budaya dan Manusia Indonesia*, Yogyakarta: PT Hanindita, 1990
- Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Benda-Beckmann, F. Von, *Dari Hukum Manusia Primitif Sampai Ke Penelaahan Sosio-Hukum Masyarakat-Masyarakat Kompleks*, Dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.
- Berger, Peter L. and T. Luchmann, *The Social Construction Of Reality*, New York: Doubleday and Company, Inc, 1966.
- Bogdan, R. C. dan Biklen, S.K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon Inc, 1982.

PERAN PAGUYUBAN PEDAGANG LOKAL SEKARAN DALAM MENGUATKAN EKONOMI KERAKYATAN DI KELURAHAN SEKARAN KOTA SEMARANG

Elly Kismini, Asma Luthfi, Harto Wicaksono

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, FIS, UNNES

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2016
Disetujui Juni 2016
Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

*Economic Democracy, Merchants
Grocery, Roles, PPLS*

Abstrak

Kehadiran dan perkembangan waralaba atau ritel modern di Kelurahan Sekaran membuat pelaku bisnis tradisional, khususnya pedagang kelontong mengalami penurunan penghasilan. Kondisi ini membuat mereka membentuk perkumpulan yang dikenal dengan PPLS (Paguyuban Pedagang Lokas Sekaran). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran PPLS dalam mengkonsolidasikan pedagang kelontong agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis dengan waralaba dan ritel modern. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya serta teknik triangulasi data sebagai validitas datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan aktifitas PPLS dalam menguatkan ekonomi kerakyatan adalah dengan cara menampung aspirasi dan menjadi wadah untuk eksistensi ekonomi masyarakat Sekaran, menjadi media kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan pihak-pihak terkait, menjadi wadah bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha kelontongannya yang memiliki daya saing yang tinggi dengan ritel modern.

Implikasi dari kehadiran PPLS ini adalah menguatnya solidaritas sesama pedagang kelontong, terjadinya renegosiasi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pemilik toko ritel modern, tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat yang mampu mendorong lahirnya gerakan sosial, dan terbukanya cara pandang masyarakat mengenai strategi penguatan dan pengembangan usaha ekonomi mereka.

Abstract

The presence and development of modern retail franchises or village have now made the traditional business people, especially decreasing penghasilan. Kondisi grocer makes them form associations known as PPLS (Lokas Traders Association sekaran). Artikel aims to explain role in consolidating haberdasher PPLS in order to withstand the competition with waralaba and retail modern. Penelitian done with a qualitative approach that uses observation, interview and documentation as methods of data collection and data triangulation technique as the validity of the data. The results showed that the role and aktifitas PPLS in strengthening democratic economy is a way to accommodate the aspirations and be a forum for the existence of the local economy have now, become a media control over government policy and the relevant parties, be a place for people lokal untuk mengembangkan effort kelontongannya who coined competitiveness high with modern retail.

The implications of the presence of PPLS this is the strengthening of

solidarity grocer, the re-negotiation between local communities, government, and retail shop owners modern, growing awareness of the critical community could encourage the birth of a social movement, and the opening of the society's perspective on the strategy of strengthening and development of their economic activity.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
ellykismini@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang dengan statusnya tersebut, sedang gencar-gencarnya untuk meningkatkan perekonomian nasional Indonesia. Di satu sisi, Indonesia telah memasuki babak baru persaingan bebas dalam sektor ekonomi. Dalam sektor ekonomi, permasalahan muncul dengan masuknya sistem pasar modern di dalam negeri. Berbagai strategi telah dilaksanakan untuk mewujudkan Indonesia mandiri, khususnya dalam sektor ekonomi. Strategi yang dimaksud adalah pemerintah telah mengatur pertumbuhan dan persaingan antara perekonomian yang dilakukan oleh pedagang lokal dengan pedang yang beromset besar bersistem dan bermanajemen waralaba. Salah satu diantaranya adalah hadirnya peraturan yang mengatur perkembangan waralaba, yaitu PP nomor 42 tahun 2007. Lahirnya PP nomor 42 tahun 2007 adalah sebagai upaya untuk melindungi perekonomian kecil/rakyat agar tidak kalah bersaing dengan ritel modern berbasis waralaba. Dalam praktiknya, hakikat hadirnya sebuah peraturan tidak sesuai dengan kenyataan. Banyak pedagang lokal yang berbentuk kelontong merasa dirugikan dengan hadirnya ritel modern. Hal ini menunjukkan bahwa lahirnya peraturan yang bertujuan untuk memayungi per-

ekonomian lokal tidak fungsional.

Ironinya, ketidakfungsionalan UU 42 tahun 2007 tidak banyak ditindak oleh pemerintah. Bahkan seakan-akan wakil rakyat yang menduduki jabatan struktural justru memihak perkembangan waralaba. Kondisi seperti ini terbukti dengan adanya surat izin mendirikan waralaba. Selain itu, jarak waralaba yang berdiri tidak sesuai dengan peraturan pemerintah, baik jarak waralaba dengan waralaba maupun dengan pasar tradisional rakyat. Kondisi demikian pun terjadi di daerah Sekaran, Kecamatan Gunungpati, Kabupaten Semarang. Implementasi kebijakan tersebut dinilai memihak pemilik modal dan kelas kapitalis untuk memarginalkan per-ekonomian rakyat yang dijalankan oleh para pedagang kelontong kecil.

Hadirnya Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Sekarang telah menstimulus waralaba untuk mengembangkan usahanya di daerah Sekarann. Dengan banyaknya waralaba yang berdiri di daerah Unnes telah melahirkan pergulatan antara pedagang kelontong dan waralaba. Tidak sedikit pedagang kelontong yang mengalami penurunan pendapatan dan gulung tikar. Keberpihakan pemerintah lokal pada waralaba mendorong para pedangan kelontong untuk membentuk sebuah perkumpulan yang mewadahi aspirasi dan

permasalahan ekonomi rakyat sebagai akibat hadirnya waralaba di Sekaran. Perkumpulan pedagang kelontong Sekaran yang dimaksud adalah Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran (PPLS).

Banyak penelitian yang membahas tentang pertarungan ekonomi antara pedagang tradisional dan pasar moder yang berbentuk ritel, seperti Indomaret, Alfamart, dan Ecomart. Dari berbagai penelitian yang dilakukan sebelumnya menggambarkan bagaimana ketidakberdayaan ekonomi tradisional sampai pada bagaimana model strategi yang dilakukan oleh pedang lokal dalam menghadapi ritel modern. Akibatnya, riset hanya sekedar mendeskripsikan hasil temuan tanpa memberikan pemikiran kritis untuk melahirkan solusi yang tengah dihadapi masyarakat yang diteliti. Beberapa hasil penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang menunjukkan bahwa menjamurnya pasar ala waralaba mengakibatkan matinya ekonomi rakyat setempat. Hasil-hasil ini pernah dilakukan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia terutama di negara-negara Berkembang (lihat Reandon et al (2003) dan Trail (2006). Bahkan dari hasil deskripsi ada yang hanya menjelaskan permasalahan yang dihadapi oleh para pedagang tradisional, tanpa mampu menangkap isu baru yang muncul dengan adanya ritel modern. Seperti tulisannya Saroso yang mendeskripsikan perkembangan bisnis waralaba di Indonesia terus meningkat. Kenyataan perkembangan waralaba sudah membanjiri di Indonesia adalah dengan hadirnya KFS dan Pizza Hut di beberapa pusat kota. Saat ini, warala tidak terkonsentrasi saja di pusat-pusat kota besar, melainkan di beberapa daerah peasant juga

menjadi target perluasan (Sarosa, 2006:3). Tulisan-tulisan bertemakan di atas, sebenarnya merupaka isu-isu melainkan isu lama dalam bingkai persaingan pasar antara rite modern dan pedang tradisional. Sementara Hutomo (Anonim, 4-5) dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwa perekonomian tradisional termasuk apa yang dilakukan oleh para pedangan kelontong merupakan salah satu sasaran pemerintah dalam mewujudkan perekonomian kerakyatan di Indonesia. Sejalan pemikiran dengan Hutomo, Mubyarto juga menjelaskan bahwa konseskuensi ekonomi kerakyatan Indoensia harus melakukan keberpihakan dan perlindungan penuh kepada ekonomi rakyat sebagai operasi-onalisasi sistem perekonomian di Indonesia (dalam Najmumunir, 2007).

Studi lain yang berusaha menjelaskan fenomena di atas adalah Soliha (2008) yang membuat analisis industri ritel modern di Indonesia. Menurutnya, persaingan antara ritel tradisional dan modern terjadi dalam perebutan konsumen dan menawarkan perubahan pola konsumsi. Soliha lebih lanjut mnejelaskan bahwa Indonesia merupakan pasar potensial terhadap perkembangan pasar ritel dengan memperhatikan faktor jumlah penduduk dan adanya wisatawan mancanegara yang masuk ke Indosia. Berdasarkan beberapa literature di atas, belum ada jenis penelitian yang berusaha melihat pergerakan akar dalam merespon pertumbuhan ritel modern di daerah. Atas dasar rujukan di atas, maka PPLS sebagai perkumpulan dari para pedagang akan dilihat bagaimana peranannya dalam memperjuangkan hak-hak dan keberlangsungan usaha ekonomi rakyat di daerah Sekaran.

Kehadiran waralaba membuat masyarakat lebih kreatif, tidak hanya dalam barang produksinya tetapi juga cara/strategi untuk mempertahankan perekonomiannya. Scoot (1983) menjelaskan bahwa mekanisme survival merupakan upaya yang dilakukan kelompok miskin guna mempertahankan hidupnya. Upaya untuk survival tersebut dapat dilakukan melalui berjualan kecil-kecilan, bekerja sebagai tukang, buruh lepas atau bermigrasi serta upaya terakhir menggunakan jaringan-jaringan sosial yang berfungsi sebagai peredam kejut selama masa krisis ekonomi. Hal ini dilakukan sebagai upaya menghadapi kondisi-kondisi terburuk di masa-masa yang akan datang (Rachmawati, 2013:21-22). Dari kondisi ini apabila ditarik dengan kasus masyarakat Sekaran dapat dijelaskan bahwa kasus demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang melakukan aktivitas ekonomi dengan berjualan dalam bentuk kelontong/warung dapat dibaca sebagai strategi masyarakat lokal dalam meresistensi perkembangan waralaba di Sekaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan logika berpikir induktif. Adapun data yang digunakan bersumber dari data primer dan sekunder dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan temuan lapangan dan sinergi logika berpikir, maka terbentuklah etnografi baru berdasarkan permasalahan, yaitu tentang peran PPLS dalam menggerakkan perekonomian lokal di tengah arus pembangunan ritel modern yang

ada di Sekaran. Sajian data yang disampaikan bersifat informatif dengan disertai analisis berdasarkan hasil temuan penelitian dan teoretisnya. Hasil etnografi yang terpublikasikan dapat menjadi bahan penting untuk merumuskan kebijakan terkait pengentasan masalah sosial melalui gagasan kreatif dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya masalah tentang perekonomian rakyat dalam belenggu kapitalisme.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PPLS dalam Pergulatan Ekonomi Kerakyatan di Sekaran

Sejak berkembang menjadi pusat pendidikan, Kalurahan Sekaran merupakan salah satu wilayah di Kota Semarang yang mengalami perubahan secara signifikan. Perubahan tersebut ditunjukkan dengan beberapa aspek seperti peningkatan taraf pendidikan masyarakat, penambahan jumlah penduduk, alih fungsi lahan pertanian, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan taraf pendidikan masyarakat ditandai dengan adanya program sejenis afirmasi dari Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang memberikan kesempatan bagi penduduk lokal untuk mengenyam pendidikan tinggi di Unnes. Hal ini membuat masyarakat semakin bersemangat dalam menyekolahkan anak-anak mereka secara formal.

Pada aspek penambahan jumlah penduduk, perubahan yang terjadi di Sekaran tidak hanya dipengaruhi oleh faktor natalitas dan fertilitas, tetapi juga pada faktor migrasi penduduk. Banyak penduduk dari daerah lain yang memilih bertempat tinggal di Sekaran karena mereka bekerja di Unnes atau

mendirikan usaha di wilayah Sekaran yang dianggap cukup potensial untuk berbisnis. Tidak hanya itu, kehadiran mahasiswa dari berbagai penjuru tanah air yang *ngekos* atau mendiami wilayah Sekaran dalam kurun waktu tertentu juga menjadi salah satu faktor yang membuat wilayah Sekaran bertambah ramai. Kondisi ini membuat beberapa tempat di wilayah Sekaran yang dahulu merupakan pekarangan rumah penduduk dan areal pertanian, berubah menjadi tempat jualan, rumah kos-kosan, dan perumahan penduduk. Alih fungsi lahan ini dapat dilihat sebagai konsekuensi dari penambahan penduduk dan perubahan basis penghidupan masyarakat di Sekaran, dari pertanian menjadi bisnis dan perdagangan.

Sebelum Unnes ada, wilayah Sekaran dikenal sebagai wilayah sentra produksi komoditas pertanian seperti sayur-mayur dan buah-buahan. Perkembangan masyarakat dan wilayah setelah Unnes berdiri merupakan peluang pengembangan mata pencaharian di luar sektor pertanian yang menjadikan masyarakat di Sekaran mulai merambah pada sektor lain, seperti usaha dagang dan jasa. Beberapa warga masyarakat terlihat menyulap pekarangan mereka menjadi warung dagang, mulai dari toko kelontong, usaha salon, usaha laundry, warung makan, hingga counter handphone (Hp). Ada beberapa warung dagang yang mereka gunakan sendiri tetapi adapula yang mereka sewakan ke orang lain. Dengan pengembangan sistem mata pencaharian tersebut, masyarakat di Sekaran memiliki penghasilan tambahan yang dapat meningkatkan tarafhidup mereka.

Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat Sekaran khususnya

para pedagang kelontong merasa terusik dengan kehadiran ritel atau waralaba modern. Beberapa pedagang kelontong mengeluhkan turunnya pendapatan mereka dan bahkan ada beberapa warung kelontong yang terpaksa gulung tikar.

“Usaha saya sih lancar-lancar saja mba, Lancarnya seperti ini mba, dengan adanya UNNES dan Perumahan tentu banyak yang membeli sembako, jadi tidak menutup kemungkinan warga Sekaran ini membeli di toko saya, meskipun hanya beberapa yang datang untuk membeli namun toko saya ini tetap laku. Akan tetapi ada sedikit beberapa masalah. Saya ini merupakan pendatang baru di desa sekaran, saya mempunyai usaha seperti ini pun banyak sekali saingannya baik diantara sesama pedagangan kelontong dan masalah dengan adanya minimarket (Ibu Lina, 42 Tahun, Pedagang Kelontong, 21 September 2014).

Persaingan dengan ritel atau waralaba modern yang mereka anggap tidak seimbang, merupakan masalah pelik yang harus mereka hadapi. Kemerostan usaha dan penurunan penghasilan yang banyak dialami oleh pedagang kelontong membuat mereka membentuk perkumpulan yang mereka sebut sebagai Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran (PPLS). Perkumpulan ini beranggotakan pedagang kelontong yang tinggal di Kelurahan Sekaran dan terdiri atas pedagang laki-laki dan pedagang perempuan. Menurut Afrokhi (52 tahun), ketua PPLS kehadiran PPLS merupakan wujud keresahan masyarakat karena pemerintah dianggap

lamban mengantisipasi serbuan ritel modern yang berpotensi mematikan usaha rakyat.

Peran dan Aktifitas PPLS dalam Menguatkan Ekonomi Kerakyatan di Kelurahan Sekaran

Sebagai paguyuban yang berangkat dari keresahan warga akan ancaman modal asing yang besar terhadap usaha ekonomi mereka, kehadiran PPLS dirasakan oleh pedagang kelontong di Sekaran seperti hujan di musim kemarau yang panjang. Betapa tidak, wilayah yang dahulu terisolir karena akses ke kota dan ke pusat-pusat ekonomi yang lain sangat terbatas, mulai menunjukkan perubahan yang cukup signifikan setelah Unnes dibangun. Berangkat dari kondisi ini, maka beberapa orang warga Sekaran yang tergabung dalam PPLS (Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran) tidak tinggal diam. Mereka melakukan upaya-upaya untuk membentengi lingkungan mereka dari ekspansi kaum kapitalis asing yang bermodal besar dan telah memarginalkan usaha-usaha ekonomi masyarakat local. Upaya-upaya tersebut diwujudkan berdasarkan peran yang mereka mainkan antara lain:

Menjadi perkumpulan masyarakat lokal untuk menampung aspirasi dan menjadi wadah untuk eksistensi ekonomi masyarakat Sekaran.

Dalam wadah PPLS, para pedagang kelontong dapat menyalurkan aspirasi dan keresahan mereka akibat kondisi persaingan usaha yang tidak sehat dengan usaha ritel modern. Mereka yang telah mengalami gulung tikar dari usaha kelontong serta mereka yang mengalami penurunan

penghasilan yang cukup signifikan akibat kedatangan toko ritel modern menggalkan kekuatan agar usaekonomi masyarakat di Sekaran dapat tetap eksis. Bapak Afrokhi, ketua PPLS menyatakan bahwa beberapa pedagang warung kelontong saat ini yang menggabungkan diri pada PPLS (Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran) karena mereka merasa usaha kelontong merka akan tetap berdiri dan berkembang apabila bergabung dengan PPLS maka. Mereka merasa terjamin karena terdapat perlindungan dari PPLS, sebab paguyuban ini mampu mengutamakan usaha local dan menentang usaha asing berdiri di wilayah Sekaran

Menjadi Media Kontrol terhadap Kebijakan pemerintah dan pihak-pihak terkait

Menjamurnya toko ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret di Sekaran yang menyebabkan jatuh banggunya usaha kelontong mereka tidak hanya disebabkan oleh tindakan penduduk lokal yang menjual atau menyewakan tanah mereka kepada pihak toko ritel modern tersebut. Bagi PPLS, hal ini sangat dipengaruhi oleh sikap pemerintah yang kurang tegas dalam menegakkan aturan serta kurangnya kepedulian mereka akan nasib para pedagang kelontong. Ibu Jumi'atun menilai bahwa pemerintah cenderung tidak terbuka berdirinya ritel modern di daerah Sekaran. Ketidakterbukaan tersebut terlihat dari tertutupnya pemerintah Sekaran dalam menyosialisasikan pendirian Indomaret. Ketidakterbukaan tersebut berakibat pada konflik internal antara pihak PPLS dan pihak kelurahan. Pemerintah dianggap oleh Ibu Jumi'atun kurang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh

ritel modern. Hal tersebut dikuatkan dengan masih adanya Indomaret dan Alfamart yang berdiri di sekitar sekaran.

Ketidaktegangan pemerintah dan ketidaksamaan visi masyarakat (khususnya para pemilik tanah) akan penguatan ekonomi kerakyatan merupakan faktor utama yang menyebabkan menjamurnya toko ritel modern di Sekaran. Bagi PPLS, sebagai pelayan masyarakat, pemerintah seharusnya lebih mendahulukan kepentingan warganya ketimbang kepentingan investor asing. Tetapi yang terjadi selama ini, investor asing justru selalu difasilitasi jika akan membuka gerai baru. Hal inilah yang membuat PPLS melakukan aksi protes dengan mempertanyakan secara langsung masalah ini dengan kelurahan. Mereka menuntut pihak kelurahan agar dapat menegakkan kembali aturan yang telah diberlakukan, yakni adanya pembatasan pendirian ritel modern atau bahkan pelarangan pendiriannya. Selain itu, mereka juga menuntut agar pemerintah berperan secara maksimal dalam membela masyarakat Sekaran agar ekonomi kerakyatan dapat terbangun dengan kuat di Sekaran.

Menjadi wadah bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha kelontongannya menjadi ritel lokal agar dapat berdaya saing dengan ritel modern.

Melihat system penjualan dan manajemen usaha yang dilakukan oleh toko ritel modern, PPLS ternyata memiliki keinginan untuk mengelola dan memiliki toko yang dirancang sama dengan ritel modern tersebut. Bagi anggota PPLS, banyaknya konsumen yang berbelanja di

Alfamart dan Indomaret hanya disebabkan oleh fasilitas dan kenyamanan berbelanja yang mereka dapat. Jika terkait dengan harga, mereka menjamin harga yang pedagang kelontong local berikan dapat bersaing dengan toko ritel modern, bahkan cenderung lebih murah. Hanya saja mindset belanja konsumen saat ini mulai bergeser. Mereka tidak lagi hanya memperhatikan harga semata tetapi juga fasilitas dan kenyamanan dalam berbelanja. Berkaca dari hal tersebut, maka PPLS melihat bahwa salah satu langkah yang bisa ditempuh untuk menguatkan kembali ekonomi kerakyatan adalah para pedagang kelontong ini dapat menata kembali toko kelontong mereka seperti toko ritel modern agar dapat menarik kembali perhatian konsumen. Bagi PPLS, langkah ini dapat menjadikan warung kelontong sebagai ritel local yang berbasis pada usaha masyarakat dan mampu bersaing secara sehat dengan ritel modern.

Dalam menjalankan perannya ini, PPLS senantiasa mengajak seluruh warga Sekaran untuk bersatu padu dalam membangkitkan usaha ekonomi mereka di tengah gempuran investor asing yang cenderung monopolistik dan kapitalistik. Saat ini, upaya yang telah mereka lakukan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah, LSM, dan beberapa pihak terkait, sehingga perjuangan mereka tidak lagi dianggap remeh. Oleh karena itu, untuk memantapkan peran tersebut, maka aktifitas yang sering dilakukan oleh PPLS yaitu melakukan perkumpulan untuk membahas masalah yang muncul seiring hadirnya ritel di Sekaran. Hasil diskusi biasanya disampaikan kepada pihak kelurahan Sekaran dan pihak ritel modern baik Alfamart maupun

Indomaret. Hal ini ditempuh oleh masyarakat dengan melalui mediator. Selain dengan perkumpulan yang membahas khusus tentang masalah yang pedagang kelontong hadapi, biasanya PPLS juga melakukan bakti sosial dalam bentuk penghijauan. Program kerja ini dilakukan dengan tujuan menjaga ekosistem lingkungan juga untuk mem-pererat solidaritas diantara pedagangan kelontong dan masyarakat yang mempunyai visi yang sama.

Implikasi dari Keberadaan PPLS terhadap Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Kelurahan Sekaran

Seperti Sejak berdirinya PPLS, para pedagang kelontong di Sekaran senantiasa melakukan upaya-upaya untuk menjaga eksistensi usaha mereka. Tidak hanya langkah preventif yang terapkan seperti melakukan serangkaian strategi bisnis yang sehat, tetapi juga langkah proteksi dan aksi protes kepada pihak-pihak terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, PPLS tidak lagi dianggap sebelah mata oleh beberapa pihak. Sebaliknya, posisi tawar mereka semakin kuat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa implikasi dari keberadaan PPLS (Paguyuban Pedagang Lokal Sekaran), yakni:

Menguatnya Solidaritas Sesama Pedagang Kelontong

Sebelum PPLS didirikan, pedagang kelontong di Sekaran menjalankan usaha ekonomi mereka secara konvensional dan cenderung individualistik. Usaha ekonomi yang dilakukan oleh setiap orang dianggap

sebagai urusan pribadi. Maju mundurnya usaha yang mereka lakukan adalah urusan pribadi, bahkan tidak jarang diantara mereka menganggap bahwa satu dengan yang lainnya adalah pesaing bisnis. Ketika toko ritel modern beroperasi di Sekaran, mereka lalu tersadar bahwa pesaing bisnis mereka tidak hanya sesama pedagang kelontong yang memiliki modal yang seimbang, tetapi pesaing tersebut adalah investor asing yang memiliki modal yang besar.

Bagi pedagang kelontong di Sekaran, persaingan antar sesama pedagang kelontong local yang lain adalah hal yang wajar karena berangkat dari modal usaha yang tidak jauh berbeda sehingga mereka bisa bersaing secara sehat. Tetapi persaingan dengan toko ritel modern menurut mereka adalah persaingan yang tidak seimbang. Modal usaha yang besar serta gerai yang bertebaran hampir di semua sudut Sekaran membuat pedagang kolntong dapat tergusur secara perlahan. Toko ritel modern ini seolah dianggap musuh bersama yang harus dihadapi bersama. Untuk mengahadapinya, para pedagang kelontong sadar bahwa mereka tidak bisa berjalan sendiri-sendiri tetapi harus dilawan dengan persatuan dan kebersamaan pedagang kelontong. Untuk itu, maka terbentuknya PPLS di lingkungan mereka mampu memperkuat solidaritas warga untuk menyikapi persoalan dan musuh bersama mereka. Hanya saja menurut ibu Jumi'atun (40 Tahun), salah seorang pengurus PPLS, kelemahan PPLS saat ini adalah kurang rutinnya kegiatan yang dilakukan. Para pedagang kelontong hanya berkumpul apabila ada gejolak, seperti adanya pembangunan Alfamart dan Indomaret baru. Meski demikian,

komunikasi melalui media *handphone* tetap mereka lakukan sehingga solidaritas yang mereka galang dapat tetap terjaga.

Terjadinya renegoisasi antara Masyarakat Lokal, Pemerintah, dan Pihak Toko Ritel Modern

Sejak ditandatanganinya Surat Ketetapan Bersama atau Nota Kesepahaman antara PPLS dengan Manager PT.Sumber Alfaria Trijaya pada tahun 2009, maka langkah PPLS dalam menyuarkan aspirasi dan masalah yang dihadapi oleh pedagang kelontong di Sekaran semakin lantang. Dalam nota kesepahaman tersebut diterangkan bahwa pihak Alfamart tidak boleh memberlakukan program hadir 24 jam, tidak menambah gerai baru dalam radius 2,5 km, tidak akan memperpanjang kontrak gerai di Jalan Mr.Koesbiyono selama 5 tahun, harus memperhatikan keberlanjutan usaha pedagang kelontong dengan membukakan akses, memprioritaskan warga untuk antuan social lainnya kepada warga Sekaran. Butir-butir dari nota kesepahaman tersebut secara jelas memperjuangkan kepentingan dan penguatan ekonomi masyarakat Sekaran. Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, butir-butir dalam nota kesepahaman ini seringkali dilanggar dan tidak diindahkan oleh toko ritel modern. Beberapa pembangunan gerai Alfamart dan Indomaret tetap saja berjalan.

Pendirian gerai baru Alfamart dan Indomaret di Sekaran sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh pihak luar saja, tetapi dengan sistem *francais* yang melibatkan 2 (dua) pihak, maka memungkinkan warga Sekaran untuk mendirikannya. Hal ini

dilakukan oleh Bowo (42), salah seorang warga Sekaran. Menurut Bowo, keputusannya untuk mendirikan gerai Indomaret baru di Sekaran karena dia akan berperan sebagai pihak pertama yang menyediakan modal, lokasi, dan peralatan penjualan. Sedangkan pihak Indomaret merupakan pihak kedua yang menyediakan stok barang dan karyawan. Hal ini berbeda dengan kebanyakan Indomaret lainnya dimana pihak Indomaret hanya menyewa lahannya saja. Dengan berbekal lahan yang dimiliki mertuanya, maka Bowo memutuskan untuk mendirikan Indomaret.

Berdirinya Indomaret baru, bukan hanya keputusan sepihak dari Bowo. Sebelum pembangunan Indomaret dilakukan Bowo telah memberitahukan kepada para pedagang yang menempati lahannya untuk pindah dan meminta persetujuan warga melalui tanda tangan. Lahan yang digunakan Bowo untuk membangun Indomaret sebelumnya ditempati oleh beberapa pedagang yang mengontrak. Karena masa kontrak habis dan Bowo memiliki tujuan untuk membangun Indomaret, maka para pedagang diminta untuk tidak memperpanjang masa kontrak dan diberi waktu untuk pindah. Selain itu, untuk memperkuat perizinan Bowo meminta tanda tangan kepada warga Sekaran dan mendapatkan persetujuan dari warga sebanyak 90%. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh Suharto (52 tahun), ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Sekaran bahwa masyarakat telah setuju dengan dibangunnya Indomaret ini.

Isu pendirian gerai Indomaret baru yang dilakukan oleh Bowo ini didengar oleh pihak PPLS. Para pengurus PPLS kemudian menginvestigasi dan mengobservasi pem-

bangunan gerai Indomaret baru tersebut. Setelah mendapatkan hasilnya, mereka kemudian melakukan koordinasi untuk membahas kasus pendirian gerai baru tersebut yang selanjutnya menjadi landasan dan dasar mereka untuk melakukan reneogisasi dengan pemerintah dan pihak terkait.

Di pihak lain, Mas Bowo juga menyadari bahwa izin usaha yang diberikan oleh Ketua RT nampaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat sehingga menuai pro dan kontra dari masyarakat. Bowo mengakui bahwa perizinan resmi dari pihak Indomaret belum diterima oleh Bowo karena membutuhkan waktu 3 hingga 6 bulan. Tetapi bagi pihak Kelurahan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Muh Sholeh (50 Tahun) bahwa Mas Bowo juga tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena dia tidak mengetahui adanya pembatasan pendirian Indomaret di Sekaran. Dari usaha reneogisasi antara PPLS, Kelurahan, Mas Bowo, dan pihak Indomaret ini, menghasilkan kesepakatan bahwa Mas Bowo dapat melanjutkan usaha kelontongnya tetapi tidak memakai nama Indomaret dan tidak menerapkan system bisnis *ala* Indomaret tersebut.

Tumbuhnya Kesadaran Kritis Masyarakat yang Mampu Mendorong lahirnya Gerakan Social

Di Kota Semarang, khususnya di Kelurahan Sekaran, sampai saat ini Pemerintah Daerah belum mengeluarkan sebuah kebijakan yang membatasi pendirian ritel modern. Akibatnya, ritel modern menjamur di semua sudut kota. Daerah yang dianggap baru berkembang pun, seperti di

Kelurahan Sekaran tidak luput dari gempuran ritel modern. Dengan kondisi ini, para pedagang kelontong di Sekaran merasakan adanya ancaman yang cukup serius bagi keberlangsungan usaha mereka. Mereka menganggap Pemerintah berlaku tidak adil bagi mereka.

Menanggapi hal tersebut, pihak Kelurahan Sekaran memberikan penjelasan bahwa mereka sudah melakukan monitoring terhadap perkembangan ritel modern, tetapi ternyata berkas izin usaha yang diberikan ke kelurahan tidak secara detail mengatakan bahwa usaha tersebut adalah ritel modern. Setelah izinnya keluar, pihak kelurahan baru mengetahui bahwa usaha tersebut adalah ritel modern.

Terlepas dari adanya masalah dalam pelaksanaan prosedur perizinan ini, pendirian ritel modern tersebut menyulut kekecewaan warga, khususnya pedagang kelontong. Kekecewaan warga ini kemudian berujung pada aksi protes yang mereka luncurkan ke Pemerintah Daerah, dalam hal ini ke Kelurahan Sekaran yang memberikan izin usaha bagi ritel modern tersebut. Mereka mendatangi Kantor Kelurahan Sekaran untuk menuntut pemerintah agar lebih meninjau ulang izin usaha tersebut dan lebih memperhatikan aspirasi warga Sekaran.

Langkah yang mereka lakukan ini didasarkan atas kesadaran kritis yang terbangun karena adanya masalah ketimpangan struktural yang mereka rasakan. Dalam teori marxisme, masyarakat lokal di Sekaran telah mengalami gejala *capitalism enclosure* yakni terdesak dan tersingkirnya masyarakat local akibat masuknya kapitalisme di Daerah mereka. Pelaku kapitalisme dari luar kemudian melakukan

kerja sama dengan kelas kapitalis lokal, yakni para tuan tanah. Kondisi inilah yang menyebabkan ritel modern dapat beroperasi dengan lancar di Sekaran. Kasus Mantu Lanang seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya merupakan contoh yang menggambarkan kerja sama kelas kapitalis tersebut. Bagi pedagang kelontong lokal, baik asli maupun pendatang yang tidak memiliki modal yang cukup besar, kondisi ini merupakan keadaan yang tidak seimbang secara struktural. Kondisi ini diperparah dengan lemahnya kekuatan kontrol dari pemerintah. Untuk itulah, maka PPLS bergerak sebagai kekuatan akar rumput dalam rangka mengontrol kebijakan pemerintah terkait dengan persaingan dagang di Sekaran. Bapak Afrokhi juga mengungkapkan bahwa walaupun pihak PPLS dan pihak ritel modern pernah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU), tetapi perhatian pemerintah daerah tampaknya belum dapat menjawab aspirasi pedagang lokal di Sekaran.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa pedagang kelontong di Sekaran merasa bahwa persaingan mereka dengan ritel modern tidak seimbang sebab mereka harus berhadapan dengan pemodal raksasa dengan sistem *franchise* yang canggih sehingga dapat menancapkan kukunya di mana-mana. Dalam hal ini jika dilihat dalam perspektif sistem ekonomi global, maka ritel modern tersebut merupakan representasi dari agen neoliberalisme yang tengah berkontestasi dengan pelaku bisnis lokal. Ketidakseimbangan struktural yang mereka rasakan ini akhirnya menumbuhkan kesadaran kritis mereka untuk berrefleksi atas masalah yang mereka alami, dan

melakukan tindakan untuk melawannya. Para pedagang kelontong yang tergabung dalam PPLS tersebut menganggap bahwa perlawanan yang mereka lakukan tidak cukup jika hanya memperbaharui cara mereka berjualan, tetapi juga ada intervensi pemerintah dalam melahirkan kebijakan yang berpihak pada mereka sebagai pelaku usaha mikro. Oleh karena itu, perjuangan mereka dalam bingkai PPLS ini dapat dianggap sebagai sebuah gerakan sosial untuk mengontrol dan memproteksi eksistensi usaha mereka di tengah menguatnya jeratan neoliberalisme di lingkungan mereka.

Terbukanya Cara Pandang Masyarakat Mengenai Strategi Penguatan Dan Pengembangan Usaha Ekonomi Mereka.

Konfrontasi yang dilakukan oleh PPLS dengan toko ritel modern ternyata tidak hanya berujung pada resistensi mereka terhadap keberadaan toko ritel modern. Dibalik aksi penolakan tersebut terselip pengalaman yang menjadikan mereka selalu mempelajari cara dan strategi berbisnis yang dikembangkan oleh ritel modern, mulai dari penataan barang, *quality control*, manajemen yang baik, fasilitas yang nyaman, hingga pelayanan yang ramah. Melalui cara ini, para pedagang kelontong tersebut terinspirasi untuk membuka toko kelontong dengan manajemen modern. Beberapa toko kelontong tampaknya sudah mempraktekannya, yang terlihat pada penataan barang mereka yang ditata semenarik mungkin serta mempergunakan sistem swalayan.

Dalam persaingan bisnis yang melibatkan ritel modern dengan pedagang lokal ini, strategi adaptasi sangat penting

dimiliki oleh pedagang kelontong agar usaha mereka dan *survive*. Menurut Scott, (1983), resistensi adalah semua tindakan dari anggota masyarakat kelas bawah dengan maksud untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Selain itu menurut Scott, penyebab resistensi berupa perilaku manusia dan perubahan lingkungan yang membuat masyarakat petani melakukan resistensi. Penetrasi kekuatan pemodal yang menyebabkan transformasi budaya dalam kehidupan desa mendorong para petani melakukan resistensi.

Jika diakitikan dengan realitas yang terjadi di Sekaran, maka resistensi yang dilakukan oleh pedagang local melalui PPLS merupakan upaya yang mereka lakukan untuk melawan dominasi kaum pemodal yang saat ini sudah menggurita di berbagai pelosok negeri. Oleh karena itu, resistensi ini juga dapat dimakanai sebagai upaya control dan proteksi dari ancaman pemodal besar yang datang dari luar daerah mereka. Menurut PPLS, jika tidak ada uapaya resistensi maka ritel modern tersebut secara lebih leluasa akan meminggirkan usaha-usaha ekonomi rakyat.

Selain resistensi, kehadiran ritel modern ini juga membuat masyarakat lebih kreatif, tidak hanya dalam barang produksinya tetapi juga cara/strategi untuk mempertahankan perekonomiannya. Scoot mejelaskan mekanisme survival sebagai upaya yang dilakukan kelompok miskin guna mempertahankan hidupnya. Upaya untuk survival tersebut dapat dilakukan melalui berjualan barang-barang yang tidak dijual di ritel modern seperti sayur mayor, plastic, dan alat-alat rumah tangga. Begitupun halnya imitasi pada aspek

penataan barang dan strategi penjualan yang dilakukan oleh pedagang kelontong terhadap ritel modern. Upaya terakhir mereka lakukan agar pelanggan dan konsumen dapat berbelanja di toko mereka dengan aman dan nyaman.

SIMPULAN

Masalah utama yang dirasakan oleh pedagang kelontong di Sekaran adalah menjamurnya ritel modern seperti Alfamart dan Indomaret yang membuat usaha ekonomi mereka mengalami penurunan yang cukup drastis. Peran yang dilakukan oleh PPLS dalam menguatkan ekonomi rakyat di Sekaran adalah dengan menjadikan PPLS sebagai wadah berhimpun masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan kontronya terhadap pemerintah serta untuk mengembangkan usaha ekonomi mereka agar dapat bersaing dengan ritel modern. Sedangkan aktifitas yang sering mereka lakukan adalah konsolidasi anggota dan pemilik toko kelontong, kerja bakti dan penghijauan. Impilaksi dari peran PPLS tersebut adalah mampu membentuk kesadaran kritis masyarakat akan situasi yang mereka hadapi, sehingga mereka dapat melakukan upaya proteksi terhadap hal-hal yang mengancam sistem ekonomi mereka serta upaya kontrol terhadap pemerintah dan pihak-pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Hutomo, Mardi Yatmo. 2001. *Konsep Ekonomi Kerakyatan* dalam Majalah PPEdisi 25.

- Najmumunir, Nandang. 2007. Strategi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dalam Penguatan Ekonomi Lokal di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Madani*. November, Vol. 2, No., pp 1-20.
- Rachmawati, Dewi Fitria. 2013. Strategi Survival Petani Tambak di Tengah Bencana Industri Lumpur Lapindo di Desa Penatarsewu Kecamatan Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo. *Skripsi*. Malang. Sosiologi Lingkungan, FISIP, Brawijaya.
- Reardon, Thomas et al (2003) 'The Rise of Supermarkets in Africa, Asia, and Latin America' [Perkembangan Supermarket di Afrika, Asia, dan Amerika Latin]. *American Journal of Agricultural Economics*. 85, (5).
- Sarposa, Pietra. 2006. *Kiat Praktis Membuka Usaha: Mewaralabakan Usaha Anda, Panduan Praktis dan Komprehensif Mengembangkan Usaha dengan Sistem Waraaba*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Scoot, James C. 1985. *Weapons of The Weak Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Heaven and London: Yale Univeristy Press.
- Soliha, Euis. 2008. Analisis Industri Ritel di Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*. September, Vol. 5, No. 2, pp 128-142.
- Trill, W. Bruce (2006) 'The Rapid Rise of Supermarkets?' [Perkembangan Pesat Supermarket?] *Development Policy Review* 24, (2).



MEMBACA ULANG PENDIDIKAN HUMANIS (LITERACY PENDIDIKAN HUMANIS)

Yuni Suprpto, M.Pd

Lecturer of Peradaban University

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Mei 2016

Disetujui Juni 2016

Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

Economic Democracy, Merchants

Grocery, Roles, PPLS

Abstrak

Tulisan Konseptual ini berupaya untuk menyampaikan pembacaan ulang pendidikan Humanis melalui beberapa sudut pandang. *Renaissance* lahir sekitar abad ke 15-16 M. Dogma yang bertentangan dengan rasio manusia ditentang oleh tokoh-tokoh pemikir di zaman itu, pada masa renaissance manusia menemukan kesadaran akan dua hal, yaitu: dunia dan dirinya sendiri, pengenalan diri berarti sadar akan nilai pribadi dan kekuatan individual, ahli waris gerakan *renaissance* adalah Humanisme, Istilah humanisme berasal dari kata human yang berarti manusia. Aliran pendidikan Humanis terbagi menjadi beberapa diantaranya yakni; aliran pendidikan humanis agama dan aliran pendidikan humanis sekuler dan aliran humanis yang disampaikan oleh tokoh-tokoh pendidikan nasional. Aliran pendidikan humanis sekuler yakni sebuah aliran pendidikan yang menekankan pada kebebasan berekspresi dan berkreasi yang terlepas dari ajaran agama, inti dari aliran pendidikan ini yakni membedakan dan memisahkan antara pendidikan dengan agama, sumber yang dijadikan acuan adalah hak asasi dan kebebasan berekspresi manusia yang didasarkan pada ide. Sedangkan untuk aliran pendidikan humanis agama adalah menekankan pada pencapaian pendidikan yang memanusiakan Manusia tanpa meninggalkan ajaran agama. Pendidikan humanis dalam ajaran filsafat Jawa yakni bagaimana manusia tetap menjaga keharmonisan dan keseimbangan di dunia, serta keselarasan dan keseimbangan alam.

Diantara nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pendidikan humanis adalah kemampuan untuk menerima pluralisme.

Abstract

Conceptual writing is trying to convey rereading Humanist education through multiple viewpoints. Renaissance was born around AD 15-16 century dogma that is contrary to human ratio was opposed by the leaders of thinkers in those days, during the renaissance man finds awareness of two things: the world and himself, introducing themselves be aware of personal values and individual strength, the heirs of the renaissance movement was humanism, humanism term comes from the word meaning human man. Humane education stream is divided into a few of them, namely: religious and humanist education stream flow and the secular humanist education humanist flow delivered by the leaders of national education. Flow education secular humanist namely a stream of education that emphasizes on freedom of expression and creativity that irrespective of religious teachings, the core of the flow of this education that distinguishes and separates

between education and religion, the source of which is used as reference for human rights and freedom of expression of man which is based on the idea , As for the flow of religious humanist education is the emphasis on educational attainment Human humanizing without leaving religious teachings. Humanist education in the teaching of Javanese philosophy that is how humans maintain harmony and balance in the world, as well as the harmony and balance of nature.

Among the values that need to be developed in the humanist education is the ability to accept pluralism.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
yunirembang@yahoo.com

PENDAHULUAN

Zaman era digital saat ini ditandai dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, perkembangan teknologi tentunya memberikan dampak yang signifikan bagi kehidupan manusia baik secara positif maupun negatif, perkembangan teknologi telah merambah pada penggunaan Gadget dan Smartphone di dalam segala aktifitas manusia, dari aktifitas semenjak bangun tidur hingga mau tidur lagi. Kebutuhan akan smartphone sudah seperti pemenuhan akan kebutuhan primer manusia, seperti makan dan minum. Toynbee dalam Huntington (2005) mengemukakan bahwa dampak dari globalisasi yakni adanya radiasi budaya, dan radiasi budaya salah satu faktornya bisa masuk lewat media, baik media elektronik maupun media cetak. Dalam tesis beliau, disampaikan bahwa media elektronik adalah faktor yang memiliki level terendah di dalam radiasi tersebut, namun intensitas dan kecepatan aksesnya harus diperhitungkan. Kecepatan dan intensitas inilah yang tanpa disadari masuk kepada manusia dan meradiasi

budaya tanpa sadar mereka telah terkontaminasi budaya yang tidak dan belum sesuai dengan budayanya, misalnya radiasi budaya kekerasan yang ditayangkan sinetron pada media televisi kita, sangat bertentangan dengan budaya dan adat ketimuran. Radiasi budaya yang dibawa oleh media elektronik memiliki dampak yang sangat cepat dan signifikan, tentu kita menyadari bahwa setiap hari kita selalu menemui dan membaca, bahkan menonton budaya luar yang asing dan tidak sesuai dengan budaya dan kondisi Indonesia.

Radiasi budaya tidak hanya ada pada ranah gaya hidup atau ranah ekonomi semata, ranah atau dunia pendidikan juga tidak luput dari radiasi budaya tersebut, ada beberapa dampak di ranah pendidikan yang disampaikan oleh media, radiasi tersebut ada yang positif dan negatif. Contoh dampak negatif dari radiasi budaya di bidang pendidikan, diantaranya yakni pola pendidikan liberal yang dianut oleh sebagian negara besar di Eropa dan Amerika yang tentunya belum sesuai atau tidak cocok bagi kebudayaan kita, pola pendidikan liberal tersebut secara implisit masuk di dalam

pendidikan kita yang katanya pendidikan yang berdasarkan demokrasi Pancasila. Hilangnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) yang diklaim produk orde baru memberikan dampak secara signifikan dan sistemik, kita semakin jauh dari ideologi pendidikan Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Dasar Negara selayaknya menjadi ruh dan pegangan di dalam pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Kehilangan ruh pendidikan di setiap lini dan jenjang pendidikan akan menyebabkan berbagai persoalan terutama persoalan *character building*. Beberapa waktu yang lalu banyak kasus yang terjadi di dunia pendidikan Indonesia, salah satunya kekerasan terhadap peserta didik, ataupun sebaliknya yakni siswa yang melakukan kekerasan terhadap gurunya, di salah satu Universitas di Sumatera Utara ada mahasiswa yang membunuh dosennya, Kemudian ada Siswi SMA yang terkena tilang oleh polisi wanita, tidak mengakui kesalahannya dan memaki serta membentak dan mengancam mau melaporkan Polisi wanita tersebut, contoh lain banyaknya begal dan geng motor yang berusia Sekolah menengah juga menjadi catatan kelam pada dunia pendidikan Indonesia, hal ini menjadi perbincangan masif dan *viral* baik di *social media* dan media elektronik lainnya. Kejadian ini mengindikasikan ada pergeseran yang terjadi di dunia pendidikan di Indonesia yakni lunturnya kemanusiaan dan hakikat sebagai manusia di kalangan peserta didik.

Pendidikan merupakan salah satu kunci yang sangat esensial dalam kehidupan manusia, dalam konteks dan ruang lingkup kehidupan suatu bangsa, pendidikan

memiliki peranan yang sangat penting dan strategis untuk menjamin kelangsungan dan perkembangan kehidupan bangsa tersebut, karena dengan pendidikan seluruh aspek kehidupan manusia dapat tercerahkan. Pendidikan harus dapat menyiapkan warga negara untuk menghadapi masa depannya. Tertanam harapan kemajuan dan kesejahteraan hidup bagi setiap anak manusia. Banyak orang berpendapat bahwa cerah tidaknya masa depan suatu negara sangat ditentukan oleh pendidikannya saat ini. Bergantinya kurikulum dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan menjadi Kurikulum berbasis pendidikan karakter atau biasa disebut Kurikulum 2013 diharapkan mampu memuat delapan belas nilai karakter untuk mengembalikan jatidiri dan karakter manusia yang Pancasilais, manusia Indonesia utuh dengan segala kemanusiaannya.

Pendidikan sendiri ditinjau dari sisi humanis adalah bagaimana cara memanusia-manusia manusia, tentunya ini hal yang sangat penting dan merupakan tanggung jawab besar dari para elemen atau komponen yang terlibat di dunia pendidikan, hal ini telah termaktub dalam pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945, yakni turut mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan Pancasila, tujuan nasional pendidikan sudah sewajarnya harus diemban dan *diejawantahkan* ke semua lini pendidikan tidak terkecuali pada guru dan peserta didik, konsep pendidikan humanis yang sesuai dengan karakter dan jiwa bangsa Indonesia sudah selayaknya di aplikasikan kembali, tulisan ini berusaha menyampaikan bagaimana pembacaan ulang atau *literacy* pendidikan humanis ditinjau dari beberapa

sudut pandang, diantaranya sudut pandang filsafat humanis, pendidikan humanis secara umum, konsep pendidikan humanis religius, konsep pendidikan humanis sekuler, konsep pendidikan humanis di dalam falsafah dan budaya jawa, konsep pendidikan humanis oleh Ki Hajar Dewantara, konsep Dahlan (Rohman, 2013: 22), dan konsep oleh Driyarkara.

Paper ini berupaya untuk menyampaikan pembacaan ulang pendidikan Humanis melalui beberapa sudut pandang, pendidikan humanis menurut beberapa aliran dan beberapa ahli, penulis tidak menyampaikan aliran mana yang terbaik namun penulis menawarkan beberapa pilihan pendidikan humanis, diantaranya; 1) bagaimana sejarah perkembangan filsafat humanisme di eropa; 2) bagaimana aliran pendidikan humanis secara umum; 3) pendidikan humanis religius; 4) pendidikan humanis sekuler; 5) pendidikan humanis di dalam Falsafah Jawa; 6) bagaimana pendidikan humanis oleh Ki Hajar Dewantara; 7) konsep pendidikan humanis Ahmad Dahlan; 8) konsep pendidikan humanis oleh Driyarkara

PEMBAHASAN

1. Sejarah Filsafat Humanisme di Eropa

Abad pertengahan dan zaman modern di Jembatani oleh zaman yang disebut Renaissance, yang mempunyai arti kelahiran kembali, dalam arti sesungguhnya yakni masa peralihan antara abad pertengahan ke abad modern yang diilhami oleh kebudayaan eropa klasik (yunani dan romawi) yang bersifat duniawi. Renaissance lahir sekitar abad ke 15-16 M, tatkala kaum intelektual,

politik, dan seniman di daratan Eropa serentak bertekad untuk mengadakan suatu gerakan pembaharuan yang menginginkan kebebasan berpikir untuk merubah doktrin agama yang dirasakan sangat mengekang kemerdekaan batin. Perkembangan pertama renaissance terjadi di Kota Firenze. Keluarga Medici yang memiliki masalah dengan sistem pemerintahan Kepausan menjadi penyokong keuangan dengan usaha perdagangan di Wilayah Mediterania. Hal ini membuat para intelektual dan seniman memiliki kebebasan dan mendapatkan perlindungan dari serangan gereja. Keleluasaan ini didukung oleh tidak adanya kekuasaan dominan di Firenze. Kota ini dipengaruhi oleh bangsawan dan pedagang, dari sini, kemudian renaissance menjalar ke daratan Eropa lainnya. Renaissance adalah zaman dimana kemajuan ilmu pengetahuan, dan memunculkan banyak ahli dan filsuf di masa itu, dogma agama yang bertentangan dengan rasio manusia telah berusaha dan memang sangat ditentang oleh tokoh-tokoh pemikir di zaman itu, tentu kita ingat mengenai Copernicus dan Tesisnya tentang bumi yang ditentang oleh pihak Gereja. Pada masa renaissance manusia menemukan kesadaran akan dua hal, yaitu: dunia dan dirinya sendiri, pengenalan diri berarti sadar akan nilai pribadi dan kekuatan individual, ahli waris gerakan renaissance adalah humanisme, Istilah humanisme berasal dari kata human yang berarti manusia. Aliran pemikiran ini menekankan *Value* (nilai) dan *Dignity* (martabat) manusia diatas segalanya, serta menjadikan kepentingan manusia, sebagai ukuran kebenaran mutlak. Abagnano mendefenisikannya:

“Humanism is the philosophical and

literary movement which originated in Italy in the second half of fourteenth century and diffused into other countries of Europe, coming to constitute one of the actors of modern culture. Humanism is also any philosophy which recognizes the value or dignity of man and makes him the measure of all things or somehow takes human nature, its limits, or its interests as its themes”.

Berikut ini adalah beberapa tema-tema dari Humanisme:

- a) *Freedom*: Institusi-institusi Pada abad pertengahan seperti Gereja, Feodalisme, dan kekaisaran telah merekayasa pandangan masyarakat kepada satu cosmic yang merendahkan dan memasung kebebasan berfikir. Gerakan Humanisme adalah usaha untuk menumbangkan otonomi dari kekuasaan-kekuasaan tersebut. Kekuasaan yang bersumber dari dogma-dogma agama.
- b) *Naturalism*: Pandangan bahwa manusia adalah bagian terpenting dari alam semesta. Meskipun thesis Humanisme mengangkat jiwa manusia sebagai kekuatan untuk pembebasan (*The Power of Freedom*), namun pendukungnya tidak pernah melupakan badan dan kesenangan lahiriah lewat penaklukan terhadap alam sebagai objek dari proyek-proyek manusia, dengan untuk sementara menanggihkan perhatian terhadap hal-hal yang bersifat metaalam.
- c) *Perspektif Sejarah*: Kaum humanis Eropa, menemukan kesadaran untuk bangkit lewat cara penggalian terhadap nilai-nilai rasional filsafat Yunani.

Mereka berusaha menemukan seni berfikir dan bertindak lewat penalaran Aristoteles dan dukungan metodologi sains modern untuk rekayasa masa depan. Pengagungan terhadap sains: bahwa kesulitan manusia lebih banyak ditimbulkan oleh kelemahan dalam memahami dan menaklukkan alam, *makeexplorasidan experimentasi sains ilmiah dan penemuan yang dihasilkan-nya dianggap lebih utama daripada doktrin Gerejani yang tidak humanistik dan rasional*. Penemuan kesadaran humanisme barat mengakibatkan manusia merasa bebas dari doktrin agama dan tradisi. Kebenaran harus dicapai dengan kekuatan sendiri, perlahan-lahan kaum humanis telah melepaskan tujuan keakhiratan dan menerima hidup dalam batas-batas dunia yang dihadapi. Lambat laun filsafat Eropa mengalami alienasi terhadap agama yang defenitif.

Filsafat menjadi bersifat individualis, sehingga sejarahnya mewujudkan konsepsi dari kepribadian tokoh-tokoh filsafat. Titik tekannya adalah kebebasan mutlak bagi pemikiran dan penelitian, bebas dari wibawa wahyu dan tradisi. Pengetahuan hakiki bukan didapat dari pewarisan, melainkan dari apa yang diperoleh manusia sendiri karena kekuatannya lewat penelitian dan penemuan-penemuan. Filsafat humanisme di rumuskan sebagai bentuk filsafat *eksistensialism* yang kolektif. Dimana kesadaran akan diri yang merupakan bagian dari kolektif dan keputusan untuk turut menjadi

bagian dari gerakan kolektif. Filsafat humanisme dalam rupa ideologi tersebar secara psikologis kepada orang-orang di zaman *Renaissance*. Kesadaran yang muncul bukan 'aku adalah manusia', melainkan 'kita adalah manusia'. Yang timbul adalah kesadaran bahwa 'kita' adalah 'manusia', dan 'kita' adalah yang 'utama'. 'Lupakan organisasi itu (Gereja), buat apa kita mengabdikan kepadanya'. Ternyata kita pun juga sangat penting'. Cukup sudah dibatasi oleh Gereja lagi'. Dari pemikiran Humanisme kemajuan-kemajuan yang terjadi diberbagai bidang sangat pesat, karena orang-orang tidak dibatasi kemampuannya oleh aturan-aturan gereja pada abad pertengahan. Muncullah para *Renaissance Man* yang membawa Eropa dan sekitarnya kedalam kemajuan. Namun, tidak semua Sejarawan berpendapat bahwa kemajuan dan kemunculan raksasa-raksasa seni dan ilmu pengetahuan sepenuhnya disebabkan oleh Filosofi Humanisme.

Jadi sejarah humanisme didasari oleh keinginan beberapa filsuf dan manusia yang hidup di jaman renaissance yang ingin keluar dari dogma dan ajaran agama yang tidak sesuai dengan abad pencerahan yakni abad dimana manusia mulai mengandalkan rasio untuk mengenal dunia dan dirinya sendiri. Humanisme ini lah yang dijadikan dasar kebebasan berekspresi dan mengaktualisasikan diri, sesuai dengan filsafat eksistensialisme.

2. Airan Pendidikan Humanis

Pendidikan hHumanis adalah pendidikan yang didasarkan oleh filsafat humanis, yakni pendidikan yang memanusiaikan manusia, hal ini dimaksudkan Pembelajaran yang dikembangkan berpijak pada teori belajar humanistik memiliki ciri-ciri humanis, yaitu untuk mencapai kemanusiaan transprimordial berupa kemampuan untuk menghormati martabat, keutuhan dan hak-hak asasi sesama manusia tidak pandang apakah ia termasuk golongan primordial suku, daerah, agama, bangsa sendiri atau lainnya. Pendidikan humanis mencirikan bahwa pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pada filsafat eksistensialisme manusia, yakni menjunjung tinggi kebenaran yang berasal dari ide dan rasional manusia, menjunjung tinggi nilai kebebasan individu sebagai makhluk yang selalu berupaya mengekspresikan diri dan mengaktualisasikan dirinya, pengekspresian dan pengaktualisasian diri inilah yang dijadikan dasar dari pendidikan humanis yang ada di *Barat*, kebebasan diri, persamaan derajat dan hak asasi manusia dijunjung tinggi dan sebagai kebenaran yang mutlak, terlepas dari dogma-dogma agama.

3. Konsep Pendidikan Humanis Religius

Konsep pendidikan humanis religius adalah konsep pengembangan pendidikan yang memadukan filsafat humanis dan konsep pendidikan religius, jadi konsep pendidikan ini adalah bagaimana pendidikan mampu memanusiaikan manusia dan menjunjung tinggi hak asasi manusia tanpa meninggalkan nilai-nilai religius. Perbedaan antara teori humanis sekuler dengan humanis

religius, jika pendidikan humanis sekuler berpijak pada rasionalitas dan ide yang meninggalkan dogma atau ajaran-ajaran agama, intinya pendidikan harus terlepas dari kungkungan dan aturan yang bertentangan dengan rasionalitas manusia, maka pendidikan humanis religius berusaha memadukan pendidikan humanis yang bersumber pada filsafat eksistensialisme, rasionalitas, ide dan kebebasan berekspresi dengan penjelasan dan aturan-aturan keagamaan yang juga mengedepankan hak asasi dan perlakuan yang sama di mata agama, intinya tetap menjunjung tinggi kemanusiaan tanpa meninggalkan fitrah manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa, yang mempunyai kewajiban menjalankan perintah dan menjauhi larangan yang diajarkan oleh agama dan kepercayaannya, jadi tiap orang berhak dan wajib menjalankan perintah sesuai dengan ajaran agama masing-masing tanpa mengintervensi atau mendiskreditkan aliran atau agama lainnya.

Notonagoro menyatakan bahwa manusia adalah makhluk monopluralis, Manusia itu dalam keutuhannya dapat dilihat dari tiga aspek/dimensi: susunan kodrat, sifat kodrat, dan kedudukan kodrat. Susunan kodrat manusia itu terdiri dari dua unsur: raga/badan dan jiwa (cipta, rasa, karsa) yang keduanya tidak terpisahkan selama hidup di dunia sebagai kesatuan monodualis. Sifat kodrat manusia itu terdiri dari dua aspek, sifat manusia sebagai makhluk individu dengan segala keunikannya dan sifat manusia sebagai makhluk sosial; keduanya hendaknya berjalan secara seimbang dalam merespon berbagai kepentingan. Kedudukan kodrat manusia juga mempunyai dua aspek

monodualis, yaitu manusia sebagai makhluk otonom, mempunyai kebebasan dalam menentukan kehidupannya sekaligus mempunyai tanggung jawab dalam berbagai tindakan yang dipilihnya, dan manusia sebagai makhluk Tuhan yang akan kembali kepadaNya dengan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya. Berpijak dari dasar inilah tercipta konsep pendidikan Humanis religius.

Ajaran ontologi Tasawuf dan Tarekat Naqsyabandiyah melukiskan kodrat kenyataan, ketunggalan hakikat Illahi, alamat-alamat dari yang hakiki dan kodrat manusia. Sebagaimana Nasr melihat bahwa keseluruhan ajaran tasawuf terdiri dari empat bagian, yaitu: metafisika, kosmologi, psikologi, dan harapan eskatologi. Ajaran kosmologi tidak menerangkan detail-detail fisika dan kimiawi, tetapi membahas tentang alam keseluruhan dengan tujuan penjelajahan yang akhirnya dimiliki, dilintasi menghindari perangkat-perangkat bendawi sehingga mampu menangkap cahaya di atas benda-benda dan pada akhirnya sampai pada keadaan hilangnya kekaburan dan kegelapan yang lazim. Ajaran psikologi memuat penyembuhan sakit jiwa secara lengkap dalam perjalanan batin (rohani) atau jiwa menuju pusatnya sendiri untuk selanjutnya menuju penyucian diri dan surga, dan ajaran eskatologi mengandung petunjuk perjalanan menuju pada tingkat hidup yang lain untuk mendapatkan keluasan hidup di balik kehidupan empiris dunia fisik ini. Pandangan ontologi tasawuf al-Ghazali yang menjadi dasar ontologi Tarekat Naqsyabandiyah, memandang manusia mempunyai identitas esensial yang tetap, tidak berubah-ubah yaitu al-nafs atau jiwa,

berangkat dari pandangan ini dapat ditarik “benang merah” yakni yang dinamakan manusia adalah sesuatu yang essential tetap dan tidak berubah-ubah yaitu al-nafs atau jiwa. Jadi idealnya manusia adalah jiwa itu sendiri jadi dua yang jadi satu yakni material dan jiwa (*nafs*), dan jiwa ini yang menggerakkan manusia dan yang merasa bergerak dengan kemauan. Pada diri manusia terdapat tiga jiwa (*al-nufus al-tsalsalah*). Pertama, jiwa tumbuhan (*al-nafs al-nabatiyah*) merupakan tingkatan jiwa paling rendah dan memiliki tiga daya; nutrisi, tumbuh, dan reproduksi. Kedua, jiwa hewan (*al-nafs al-hayawaniyah*) yang memiliki dua daya; penggerak, persepsi. Ketiga, jiwa rasional (*al-nafs al-natiqah*) memiliki dua daya; praktis dan teoritis. Untuk yang ketiga inilah yang menjadi landasan seorang ilmuan untuk terus berkarya dan belajar di bidang keilmuan, serta mengabdikan dirinya pada ilmu.

Pendidikan humanis religius ini telah dikembangkan dan diterapkan pada pondok pesantren-pondok pesantren di Nusantara, bisa dicontohkan pendidikan humanis yang disampaikan oleh Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), Nilai-nilai humanis, kultural dan filosofis pendidikan selama ini pada dasarnya tidak lepas dari akar pemikiran pesantren yang kokoh walaupun ia seringkali tidak menggunakan dasar-dasar al-Qur'an dan Sunnah. Pemikiran pendidikan Wahid memiliki akar yang kokoh dalam tradisi pesantren. Ia telah berhasil mewariskan pemikiran-pemikiran pendidikan yang berwawasan humanis, kultural dan filosofis dalam kehidupan kemajemukan hidup umat manusia. Gagasan pendidikan yang ingin ditawarkan adalah

pengembangan wawasan keislaman yang menjadi penunjang perkembangan alam pembangunan nasional. Watak dinamis pendidikan itu dapat dikembangkan kalau pemikiran pendidikan Islam meletakkan titik berat perhatiannya pada masalah-masalah kongkrit dan memberikan penyelesaian bagi persoalan-persoalan hidup aktual yang dihadapi manusia.

Pendidikan humanis religius mengutamakan pembelajaran aktif dan menggunakan metode dialog dalam suasana pembelajaran yang dirancang dengan menghadirkan Tuhan, dalam suasana nyaman, aman, ramah, santun, bahagia. Pendidikan humanis religius ini berusaha merasionalkan ajaran agama agar tidak hanya sebagai dogma-dogma yang memang harus ditaati dan dipatuhi akan tetapi ajaran agama tersebut bisa dikaji secara ilmiah.

4. Pendidikan Humanis Sekuler

Diskursus tentang relasi antara manusia dan agama paling tidak melahirkan dua konsep pemikiran. Pertama; pendapat yang meyakini bahwa agama dapat dijadikan inspirasi hidup dan solusi atas berbagai problematika manusia (Habermas 2006,19-32) dan kedua; pendapat yang meyakini bahwa manusia mampu menyelesaikan berbagai persoalan tanpa melibatkan Agama. Misalnya sebagaimana yang dilakukan oleh pemikir-pemikir sosial abad ke 19 seperti Comte, Spencer, Durkheim, Weber, Marx dan Freud, yang meyakini bahwa agama secara berangsur-angsur akan hilang dan bukan lagi menjadi sesuatu yang signifikan terutama bagi masyarakat industri (modern), karena masyarakat industri (modern) diproyeksikan untuk berorientasi sekuler

(Norris dan Inglehart 2004, 3-5). Dua pandangan di atas hidup dalam suasana modernitas, tetapi pandangan kedua lebih mendominasi dan lebih mendapatkan ruang. Dengan dalih memiliki otoritas untuk mewujudkan eksistensinya, manusia difungsikan sebagai titik sentral kehidupan dan karena itu melalui kebebasan rasio, manusia berhak untuk mengatur diri dan lingkungan. Manusia diposisikan sebagai makhluk yang otonom sesuai dengan karakteristik kemanusiannya (humanisasi). Ketika humanisasi ini menjadi *worldview*, maka ia menjadi ideologi (humanism). Secara humanisme dalam bingkai modernitas melahirkan humanism modern yang memisahkan ajaran agama dan nilai-nilai spiritual dengan kehidupan modern. Nilai-nilai spiritual agama dianggap tidak mampu memecahkan problematika sosial, dogma-dogma agama dianggap kurang fungsional untuk memecahkan problematika kehidupan sosial karena kurang rasional dan positif. Bunge (2000; 16) membagi dua model humanisme, yaitu humanisme sekular dan humanisme religius. Humanisme sekular (*secular humanism*) melihat manusia dan masyarakat atas dasar rasionalitas, sedangkan humanisme religius (*religious humanism*) melihat manusia dan masyarakat berdasarkan pada nilai-nilai moral (etika) sebagaimana yang lazim terdapat dalam agama.

Humanisme sekular mempertahankan prinsip bahwa manusia mampu mengatur dirinya sendiri, humanisme sekular melihat individu dan masyarakat atas dasar rasionalitas, berusaha mereduksi dan mengesampingkan sesuatu yang sakral (desakralisasi) tentu hal ini sesuai dengan

tesis yang disampaikan oleh Peursen bahwa perkembangan kebudayaan manusia dimulai dari mitis, ontologis dan fungsional. Dikatakan bahwa perkembangan manusia dimulai dari tahapan mitis yakni manusia menyakini bahwa di kehidupannya terdapat kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi, dan manusia yakin bahwa ada Dzat yang maha besar diluar kemampuan mereka. Tahapan kedua yakni tahap ontologis yakni manusia telah menanyakan dan terus mencoba menggali tentang sesuatu atau hakikat dari sesuatu, tahapan ini mendasari berkembangnya ilmu pengetahuan, tahapan terakhir dari tesis ini adalah tahap fungsional yakni dimana manusia telah menggunakan ilmu pengetahuan untuk kepentingan dan keberlangsungan hidupnya, tahap ini manusia telah mencoba untuk keluar dari tahap mitis dan ontologis jadi kehidupan mereka semua berdasarkan rasionalitas dan positif, terlepas dari kekuatan-kekuatan spiritual dan kungkungan dogma agama. Relevansi tesis Peursen dengan pendidikan humanis sekular adalah berdasarkan perkembangan budaya yang disampaikan beliau yakni tahapan manusia sudah pada imanensi dan eksistensialisme selain itu, juga selalu mengarah pada keterbukaan. Bahayanya adalah identitas diri mulai pudar dan keotentikan hilang. Maka, fungsionalisme bukanlah suatu hal yang secara otomatis terjadi, akan tetapi lebih merupakan suatu proses dan tanggung jawab yang akan terus berkembang kealam pemikiran yang lebih maju. Bisa ditarik benang merah bahwa yang dimaksud pendidikan humanis sekular adalah pendidikan yang berorientasi pada kebebasan berekspresi yang berdasarkan filsafat eksistensialisme yang mendorong

kemajuan manusia diluar kungkungan dan dogma-dogma agama, pendidikan humanis sekuler ini diadopsi oleh negara-negara barat.

5. Pendidikan Humanis di Dalam Falsafah Jawa

Pendidikan humanis di dalam falsafah Jawa yakni menekankan pada keselarasan, keseimbangan dalam berbagai hal termasuk keselarasan dengan hal yang berbau mitis, mereka akan selamat dari segala ancaman. Nilai dan keutamaan moral dapat tercermin, misalnya menjunjung suara hati yang dianggap baik, menghargai kejujuran, memiliki rasa tanggung jawab, melihat adanya hak dan kewajiban, keselarasan atau harmoni dengan alam dan selaras dengan masyarakat. Selain itu, etika jawa juga terkait dengan pandangan hidup manusia jawa. Seperti telah kita ketahui, pandangan hidup jawa memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri, suatu pandangan yang mencari ilmu kesempurnaan jiwa (dapat kita sebut sebagai suluk, mistik, atau dalam agama Islam disebut sebagai tasawuf atau sufisme). Pendidikan Humanisme Jawa yakni sebenarnya adalah sistem pendidikan yang membentuk manusia untuk berpikir rasional, berpikir membentuk kesadaran manusia yang memiliki potensi untuk: a) membentuk sifat kemanusiaan terhadap situasi yang diberikan; b) mampu memecahkan persoalan *epistemologis* secara rasional dan kritis; c) membentuk kesadaran moral dan pertimbangan etis nilai-nilai yang terlupakan dalam proses kecerdasan anak bangsa. Nilai-nilai lokal jawa pendidikan Humanis Jawa diantaranya:

a. Tata krama jawa, budi pekerti adalah

ruh dari tata krama jawa, dan tata krama adalah merupakan tulang-tulang penggerak Budi pekerti, artinya: tatakrama meliputi moral, sopan santun, unggah-ungguh dan etika.

- b. Unggah-ungguh Bahasa Jawa artinya; 1) unggah-ungguh selalu berhubungan dengan rasa Jawa, ungkapan kecil tetapi bermakna dalam yakni "*wong Jawa kui papaning rasa*"; 2) unggah-ungguh dan sopan santun Jawa merujuk *suba sita* yakni aturan yang baik untuk mendidik kesopanan masyarakat; 3) sumber budi pekerti Jawa.

Jadi inti pendidikan humanis di dalam Falsafah Jawa yakni memberikan panduan bahwa manusia hendaknya selalu berpegang teguh pada moral, etika, dan keselarasan hidup yang tercermin dalam segala bentuk perilaku berupa unggah-ungguh, sopan santun, suba sita bagi kesopanan masyarakat. Pendidikan humanis dalam falsafah jawa merupakan kekhasan yang bercorak dan berdasarkan pada falsafah ajaran Hindhu-Budha dan Islam, ini menjadikan ajaran dan nilai-nilai Jawa unik dan beda dengan nilai-nilai lainnya.

6. Pendidikan Humanis oleh Ki Hajar Dewantara, Konsep Pendidikan Humanis Ahmad Dahlan

Pendidikan Humanis yang di sampaikan oleh Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan dengan konsep Tri Pusat Pendidikan yakni pendidikan dalam lingkup keluarga, perguruan/Sekolah, masyarakat, disampaikan bahwa pendidikan adalah daya

upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*Intellect*) dan Jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya. Intinya pendidikan humanis adalah pendidikan yang mampu mengembangkan peserta didik menjadi manusia yang merdeka memiliki karakter dan intelektualitas yang seimbang dan tumbuh dengan perkembangan potensi-potensi mereka, memiliki kepekaan terhadap perkembangan masyarakat, dan memegang teguh adat dan budaya nasional, jika seseorang memiliki pendidikan dan intelektual yang tinggi dan baik maka seharusnya diimbangi dengan budi pekerti dan tingkah laku yang baik pula.

Pendidikan Humanis oleh Ahmad Dahlan yang merupakan tokoh besar dalam organisasi Muhammadiyah, yakni pendidikan yang didasarkan pada pembentukan kecerdasan dan kemandirian bagi setiap peserta didik dan umat manusia sehingga mereka bisa memahami ajaran Agama dengan benar, pendidikan yang disampaikan adalah pembaharuan pendidikan Islam dengan dikombinasikan dengan pendidikan Gaya Belanda, kalau ditarik benang merah konsep pendidikan yang disampaikan beliau adalah modernisasi pendidikan Islam, berarti pendidikan humanis religius, dimana perkembangan peserta didik senantiasa sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama Islam.

7. Pendidikan Humanis oleh Driyarkara

Pendidikan Humanis menurut Driyarkara adalah pendidikan yang mengedepankan perkembangan manusia muda menjadi manusia yang tingkatannya

lebih dewasa dengan jalur massifikasi kultural (pembudayaan yang masif). Pendidikan humanis adalah humanisasi yang dimaksudkan untuk mencapai, mengarahkan kemampuan berpikir dan kemampuan cipta rasanya guna melahirkan hal-hal yang luhur, yang baik, yang mulia yang biasa disebut kebudayaan. Proses pendidikan manusia melalui dua tahap yakni hominisasi dan humanisasi, hominisasi adalah proses perkembangan manusia muda menjadi manusia dewasa secara fisik dan psikologis, dan tingkatan setelahnya adalah humanisasi, yakni manusia mampu mengembangkan dan membawa kedewasaannya untuk mencintai alam, sesama, dan Tuhan. Belajar bukanlah untuk sekolah akan tetapi untuk hidup, pendidikan setiap insan hendaknya tiap hari mampu mengembangkan talentanya, pengembangan dan proses internalisasi nilai-nilai hidup. Untuk mencapai tujuan pendidikan humanis, tidak terlepas dari tiga hal yakni: Manusia, Pendidikan dan Pancasila. Inti pemikiran beliau adalah pendidikan yang senantiasa mengaplikasikan dan tanpa meninggalkan Falsafah Pancasila, karena di dalam Pancasila sudah memuat semua unsur kemanusiaan manusia.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka simpulan dari paper ini adalah perkembangan filsafat humanisme sangat dipengaruhi oleh *renaissance* di Eropa pada zaman itu manusia telah mulai mengedepankan rasio mereka dan berusaha untuk keluar dari kungkungan dogma agama, abad pencerahan dimana manusia mengedepankan kebebasan, mengedepankan

ide dan rasio mereka, berusaha menemukan seni berfikir dan bertindak sesuai dengan filsafat eksistensialisme. Filsafat ini mendasari berkembangnya filsafat humanis di Eropa yakni aliran filsafat yang memandang bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa mengedepankan, menjunjung tinggi ide dan rasional manusia, kebebasan berekspresi.

Perbedaan antara pendidikan humanis religius dengan pendidikan humanis sekuler adalah, pendidikan humanis religius berusaha mengedepankan bahwa manusia adalah makhluk monodualis yakni selain mengembangkan dirinya secara bebas berdasarkan ide dan rasionalnya mereka juga harus bertanggung jawab atas semua perilakunya dihadapan Tuhan, inantinya adalah bagaimana berperilaku tanpa meninggalkan ajaran-ajaran agama. Sedangkan pendidikan humanis sekuler yakni pendidikan yang benar-benar hanya mengedepankan kemajuan, kemampuan, serta perkembangan ide dan kebebasan berekspresi. Berbeda lagi dengan pendidikan humanis dalam falsafah jawa, pada intinya adalah adanya keselarasan, keseimbangan baik ide berpikir, rasio, dan selalu menjaga *suba sita* atau disebut perilaku, perilaku secara keseluruhan, perilaku dengan sesama manusia, perilaku dengan makhluk lain, perilaku dengan alam, serta senantiasa ingat bahwa semua yang ada di bumi ini adalah atas KuasaNya.

Diantara nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pendidikan humanis adalah kemampuan untuk menerima pluralisme, yaitu kemampuan untuk hidup berdampingan dan saling menghormati, tanpa mempermasalahkan budaya, adat-

istiadat, agama, dan gaya hidup yang berbeda. Pendidikan humanis inilah yang sangat relevan dan cocok untuk Indonesia yang *Bhineka Tunggal Ika*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, Sumarlin. 2015. Jurnal Manajemen Pendidikan Islam ISSN 2338-6673 E ISSN 2442-8280 Volume 3 Nomor 1 Februari 2015 Halaman 128 – 144.
- Comer, R. & Gould, E. (2012). *Psychology Around Us*. New York: Halsted Press, Division John Wiley & Sons, Inc.
- Driyarkara, N.2006., Karya Lengkap Driyarkara. Esai-Esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya. Penyunting: A. Sudiarja, G. Budi Subanar, St. Sunardi, T. Sarkim. Jakarta: Gramedia.
- Ekahayati. 1996. 'Arnold Joseph Toynbee'. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jilid 16. Jakarta: PT. Cipta Adi Pusaka. Hal. 413-414
- Huntington, Samuel P. 2005. *Amerika dan Dunia*. Yayasan Obor: Jakarta
- Notonagoro. 1987. *Pancasila secara Ilmiah Populer*. Jakarta: Pantjuran Tudjuh.
- Saifullah, 2014. Renaissance dan humanisme sebagai jembatan lahirnya filsafat Modern. *Jurnal Ushuluddin*. Vol. XXII No.2.
- Rohman, Saifur. 2013. Pendidikan Humanisme 'komparasi pemikiran Ahmad Dahlan dan Ki Hajar Dewantara. UIN Sunan Kalijaga. Jogjakarta.
- Van Peursen, C. A 1994. *Strategi Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.



DINAMIKA PENDIDIKAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA PANDANGAN WETAN KECAMATAN KRAGAN KABUPATEN REMBANG

Moh. Saiful Fatwa, M.Pd.

Dosen STAI Al-Anwar Sarang Rembang

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2016
Disetujui Juni 2016
Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

dynamics of Education , Fishermen Society, commitment Parents

Abstrak

Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsinya terhadap peran penting pendidikan bagi anak-anaknya. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kondisi sosial masyarakat nelayan, komitmen keluarga Nelayan terhadap pendidikan serta mengetahui perilaku anak keluarga Nelayan di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. Metode yang digunakan adalah kualitatif, dan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi metode dan sumber. Hasil penelitian menunjukkan (1) secara umum dan sebagian besar pandangan orangtua/nelayan pandega terhadap pendidikan adalah rendah, (2) Komitmen Keluarga Nelayan terhadap pendidikan anak dipengaruhi pola asuh keluarga nelayan dimana secara umum dan sebagian besar keluarga nelayan di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan adalah pola asuh otoriter dan pola asuh permisif, karena banyak orang tua di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan bersikap memaksakan kehendak dalam bidang tertentu seperti pendidikan anak, (3) secara umum dan sebagian besar bentuk perilaku sosial anak termasuk baik. Adanya pelanggaran menurut para responden masih dalam kategori wajar. Berdasarkan dari observasi oleh peneliti di lingkungan tempat tinggalnya, anak-anak nelayan pandega mayoritas bersikap baik, suka bekerja keras dan patuh kepada orangtuanya.

Abstract

Public of education level affects the mindset and perceptions about the important role of education for their children. The purpose of this study was to determine the social conditions of fishermen, Fishermen's commitment to education and family know the child's behavior in the Fishermen families Desa Kragan Pandangan wetan Rembang. The method used is qualitative, and data collection techniques is using interviews, observation and document study. The data analysis technique used in this study is an interactive model with step data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The validity of the data is done by means of triangulation of methods and sources. Results showed (1) in general and most of the views of parents/fishing Pandega to education is low, (2) Fishermen Family Commitment to education children affected fishermen families where parenting in general and most of the families of fishermen in the village of view Wetan District of Kragan is authoritarian parenting and permissive

parenting, because many parents in the Desa Kragan Pandangan Wetan Rembang is overbearing in certain fields such as educatio, (3) in general, and most forms of social behavior of children, including good. Any violation by the respondent is still in reasonable category. Based on the observations by researchers in the environment where he lives, the children of fishermen Pandega majority being nice, hardworking and obedient to his parents.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
iphoelfatwa@gmail.com

PENDAHULUAN

Sumber daya alam yang melimpah belum tentu merupakan jaminan bahwa suatu Negara atau wilayah itu akan makmur, bila pendidikan sumber daya manusianya kurang mendapat perhatian. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan tugas bersama dan berjangka waktu yang panjang karena menyangkut pendidikan bangsa.

Kabupaten Rembang memiliki daerah perairan yang mempunyai potensi perikanan, disepanjang daerah pesisir mata pencaharian penduduk umumnya nelayan dan pedagang. Pekerjaan sebagai nelayan dipilih karena sesuai dengan keterampilan masyarakat setempat, sementara sumber daya yang tersedia hanya laut beserta isinya yang mempunyai nilai ekonomi, sehingga tidak ada pilihan lain bagi masyarakat yang tinggal di sepanjang pesisir laut selain menjadi nelayan atau pedagang yang berhubungan dengan laut. Karakteristik yang menjadi ciri-ciri sosial budaya masyarakat nelayan adalah memiliki struktur relasi patron-klien sangat kuat, etos kerja tinggi, memanfaatkan kemampuan diri dan adaptasi optimal, kompetitif dan berorientasi prestasi, apresiatif terhadap keahlian, kekayaan dan

kesuksesan hidup, terbuka dan ekspresif, solidaritas sosial tinggi, sistem pembagian kerja berbasis seks (laut menjadi ranah laki-laki dan darat adalah ranah kaum perempuan), dan berperilaku konsumtif (Kusnadi, 2009:39).

Masyarakat nelayan juga menghadapi sejumlah masalah politik, sosial dan ekonomi yang kompleks (Kusnadi, 2009:27). Hal ini disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum bersungguh-sungguh, persoalan sosial ekonomi dan budaya yang terjadi pada masyarakat nelayan cukup kompleks, sehingga penyelesaiannya tidak seperti membalikkan telapak tangan. Masyarakat sebagai pelaku utama bagi pembangunan, maka diperlukan kualitas sumber daya manusia yang berpotensi, sehingga masyarakat dapat bergerak pada arah pembangunan untuk menuju cita-cita rakyat Indonesia, yaitu bangsa yang makmur dan berkepribadian yang luhur, terlebih lagi pada zaman yang semakin hari bertambah tuntutan yang harus dipenuhi di era modern ini maupun yang akan datang, masyarakat dituntut untuk mempunyai ketrampilan atau kompetensi dalam dirinya supaya dirinya menjadi manusia yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi bangsa dan negara, untuk menggali potensi yang dimiliki oleh manusia maka

diperlukan adanya pendidikan.

Dewasa ini masih banyak dijumpai adanya masalah pada sistem pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah banyak anak usia Pendidikan Dasar tidak lagi dapat melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah. Banyak faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Faktor utama yang biasa menjadi alasan masyarakat adalah mahalnya biaya pendidikan untuk Sekolah Menengah, sehingga para orang tua lebih cenderung menyekolahkan anaknya sampai pendidikan dasar saja. Faktor lainnya adalah masih kurang perhatiannya orang tua terhadap pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka. Kebanyakan orang tua menyuruh anaknya bekerja setelah tamat dari SD dan SMP, baik itu menjadi buruh atau membantu orang tua melaut dan lain sebagainya. Hal ini juga tidak lepas dari pendapatan orang tua dan jenis pekerjaan pada lingkungan masyarakat tersebut. Banyaknya warga Desa Pandangan Wetan yang tidak menyelesaikan pendidikan dasar menunjukkan bahwa masih rendahnya angka partisipasi mereka di bidang pendidikan, khususnya dalam ketuntasan wajib belajar 9 tahun. Mayoritas perekonomian masyarakat nelayan di Desa Pandangan Wetan juga masih tergolong rendah, hal ini tergambar dari masih banyaknya masyarakat nelayan Desa Pandangan Wetan yang kurang sejahtera.

Pendidikan anak nelayan Pandega di Desa Pandangan wetan umumnya masih rendah salah satu indikatornya yaitu anak nelayan diusia remaja mulai diajak berlayar dan ikut melaut oleh orang tuanya atau pamannya, sehingga diantara mereka putus

sekolah, dan pola hidup konsumtif mereka dimana pada saat penghasilan banyak, penghasilan tersebut tidak ditabung untuk persiapan pakeklik dan penghasilannya tidak dibelikan untuk kebutuhan pendidikan melainkan dijadikan kesempatan untuk membeli kebutuhan sekunder. Penelitian ini mengkaji tentang dinamika pendidikan, komitmen orangtua terhadap pendidikan, serta perilaku anak nelayan di desa pandangan wetan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif untuk memperoleh gambaran dinamika sosial masyarakat nelayan dan komitmen terhadap pendidikan anak. Penggunaan metode penelitian ini disesuaikan dengan tujuan pokok penelitian yaitu mengkaji bagaimana dinamika sosial masyarakat nelayan, mengkaji bagaimana komitmen orang tua terhadap pendidikan anak dan mengkaji bagaimana perilaku sosial anak keluarga nelayan. Teknik pengumpulan data menggunakan, wawancara, observasi dan studi dokumen. Keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi metode dan sumber. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Pandangan Wetan, Kecamatan Kragan, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Subjek penelitian ini yaitu orang tua laki-laki (nelayan pandega) berjumlah 6 orang sebagai responden dan informan pendukung yaitu anak nelayan pandega sebanyak 6 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu faktor yang berpengaruh pada perubahan sosial yang terjadi dalam

suatu kelompok masyarakat adalah dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Tingkat pendidikan masyarakat berpengaruh terhadap pola pikir dan persepsinya terhadap peran penting pendidikan bagi anak-anaknya. Faktor utama yang mempengaruhi persepsi masyarakat nelayan Desa Pandangan Wetan berasal dari faktor individu kepala keluarga yaitu harapan orang tua terhadap anak dan pengalaman masa lalu orang tua. Rendahnya tingkat pendidikan di kalangan anak-anak responden disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya faktor orang tuayang lebih mengarahkan untuk menjadi nelayan dan dikenalkan pada laut sejak kecil sehingga tidak terpikirkan untuk sekolah. Adanya keterbatasan biaya dan ada pula yang keinginan dirinya untuk menjadi nelayan sehingga tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pola asuh orang tua adalah cara yang ditempuh atau yang dilakukan orang tua dalam mendidik anaknya, dengan harapan anak dapat tumbuh kembang sesuai apa yang diharapkan keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima dari enam responden diketahui memiliki pola asuh Authoritarian. Kelima responden tersebut menghukum anaknya secara fisik yaitu mencubit, menarik telinga, memukul, menampar bahkan menendang anaknya. Mereka melakukan hal tersebut karena bentuk rasa sayang mereka buat anak-anaknya. Ketiga responden pun juga tidak memberikan alasan mengapa anak-anak mendapat hukuman tersebut, mereka menganggap anak-anak sudah mengetahui alasannya.

Hasil penelitian menunjukkan

bahwa faktor yang mempengaruhi pola asuh orangtua pada masyarakat nelayan pandega yaitu pendidikan yaitu terlihat dari orangtua yang memiliki latar belakang pendidikan rendah menjadikan orangtua tidakmengetahui atau menelantarkan tentang perkembangan pendidikan sekolah anak-anaknya, sedangkan lingkungan seperti menyuruh anak-anaknya untuk bekerja mencari uang secara lebih dini yaitu dari usia lima tahun menjadi hal yang biasa di lingkungan pesisir. Bagi anak-anak mereka masih tetap dapat membantu orangtuanya mencari uang meski tetap sekolah yaitu sepulang mereka sekolah. Hal ini bisa dilihat dari hasil penelitian yang memberikan keterangan sebagai berikut: 1) Banyak anak pandega yang berusia 15-20 an bekerja sebagai nelayan pandega pada juragan lain dari orangtuanya. 2) Banyak waktu nelayan pandega yang habis untuk melaut, sehingga proses sosialisasi anak terhadap nilai-nilai kepemimpinan orang tuanya tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga anak-anak lebih cenderung belajar dari ibu, kakaknya, nelayan lain atau teman yang lebih dewasa dari dirinya. 3) Anak-anak nelayan pandega setelah lulus SMP/SLTP biasa turun ke laut ikut dengan juragan lain atau ikut teman yang lebih dewasa dan memiliki juragan berbeda dari orang tuanya. Walaupun ada yang berpendidikan hingga ke SMA, tetapi tetap saja membantu orang tuanya dengan bekerja sebagai nelayan.

Masyarakat nelayan pandega di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan memiliki beberapa metode yang digunakan untuk mempengaruhi anak dalam membentuk kepribadiannya. Pertama, metode ganjaran dan hukuman. Dalam proses ini,

hukuman diberikan kepada anak yang bertingkah laku salah, tidak baik, kurang pantas, atau diterima oleh masyarakat. Hukuman dapat berupa fisik atau hukuman sosial tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh anak di dalam pergaulannya, baik dengan sesama teman maupun interaksinya dengan orang tua. Pemberian hukuman dimaksudkan agar anak menyadari kesalahannya, sedangkan ganjaran diberikan kepada anak yang berperilaku baik dalam proses sosialisasi. Ganjaran dapat bersifat materiil dan non materiil, dengan ganjaran diharapkan anak termotivasi untuk selalu berbuat baik. Kedua, metode *didactic teaching*. Metode ini mengutamakan pengajaran kepada anak didik tentang berbagai macam pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, metode pemberian contoh. Anak-anak cenderung mencontoh semua tingkah laku orang yang ada di sekitarnya. Dengan memberikan contoh akan terjadi proses imitasi (peniruan), yang terjadi secara sadar maupun tidak disadari.

Status sosial keluarga (orangtua) yang rendah menyebabkan ketidak mampuan orangtua dalam memberikan fasilitas belajar yang memadai pada anak-anaknya. Pendidikan rendah yang disandang orangtua menyebabkan tidak mampunya orang tua memberikan wawasan tentang pendidikan bagi anaknya, sehingga anak cenderung akan mengikuti pola-pola yang dilakukan orangtuanya, sehingga banyak anak-anak yang tidak sekolah atau putus sekolah karena orangtua tidak perduli dengan perkembangan pendidikan bagi anak, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan para informan, walaupun untuk makan sehari-hari bisa di cari di laut namun semua

hanya pas-pasan karena pola hidup mereka berbeda dengan orang-orang yang maju, mereka mencari nafkah hanya untuk dimakan hari ini, untuk besok hari mereka tidak terlalu memikirkan, karena mereka beranggapan masih banyak persediaan di laut, pola pikir mereka tentang pendidikan bagi anaknya rendah, mereka tidak pernah memikirkan fasilitas pendidikan untuk anak-anaknya serta adanya ketidakkonsistenan antara persepsi dengan perilaku untuk menyekolahkan anak karena adanya berbagai faktor yang memengaruhi pendidikan anak seperti ekonomi. Rendahnya persepsi nelayan terhadap pendidikan anak menunjukkan status sosial mereka yang rendah.

Rendahnya status sosial pendidikan nelayan pandega akibat tuntutan kebutuhan hidup keluarga. Keadaan sosial ekonomi keluarga memiliki peranan krusial terhadap proses perkembangan anak-anak. Misalnya, keluarga yang ekonominya mencukupi, menyebabkan lingkungan materiil yang dihadapi anak dalam keluarganya akan lebih luas. Anak memiliki kesempatan lebih luas untuk mengembangkan pengetahuan dan beragam ke cakapan atas jaminan dan dukungan ekonomi orangtua. Kecukupan ekonomi orang tua akan memungkinkan terjaganya hubungan orang tua dan anak-anaknya, karena orang tua akan lebih fokus perhatiannya kepada anak-anak dan perkembangannya. Namun, apabila keadaan sosial ekonomi keluarga tidak mencukupi untuk biaya kebutuhan sehari-hari, maka anak tidak memiliki kesempatan luas untuk mendapatkan pendidikan, mengembangkan pengetahuan dan beragam kecakapan hidup untuk dirinya. Di sisi lain, hubungan orang tua dengan anaknya tidak terjadi secara

optimal, karena waktu yang dimiliki oleh orang tua telah tercurah pada pekerjaannya, sehingga perhatian, pendidikan dan kasih sayang orang tua terhadap anak tidak terjadi secara optimal. Hal inilah yang mendasari tidak optimalnya pendidikan nilai-nilai kecakapan hidup di lingkungan keluarga nelayan pandega. Anak dituntut untuk dapat membantu orang tuanya dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga anak-anak nelayan pandega dalam mendapatkan pendidikan dari orang tuanya sangat terbatas, akibatnya anak tidak dapat mengembangkan pengetahuan dan beragam potensi kecakapan hidup yang dimilikinya.

Pengasuhan anak, masyarakat pesisir memiliki pola pengasuhan yang khas yang dipengaruhi oleh budaya setempat, biasanya orangtua belajar dari budaya setempat tentang peran yang harus dilakukan dalam mengasuh anak (Winengan, 2007). Pengasuhan dapat dipengaruhi oleh budaya, etnis, dan status sosioekonomi, (Bronfenbreener dalam Santrock, 2007). Kebanyakan orangtua pesisir juga mempelajari pengasuhan anak dari orangtua mereka sebelumnya, mereka sering menganggap praktek pengasuhan yang diberikan orangtua mereka adalah pengasuhan yang membawa anak-anak mereka menjadi positif (Kusnadi, 2003). Penerapan pola asuh di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan yang masih banyak menggunakan pola asuh otoriter dengan perpaduan pola asuh permisif mengakibatkan cara orang tua dalam mendidik anaknya yang cukup keras yang mengakibatkan anak tidak dapat berkembang sesuai cita-cita yang diinginkan. Permasalahan yang terjadi juga berasal dari

kemiskinan yang membelenggu masyarakat di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan, merupakan alasan yang biasa digunakan untuk tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih baik atau tinggi.

Perilaku sosial merupakan suatu bentuk tindakan atau interaksi yang berhubungan dengan orang lain. Menurut Tirtarahardja (2008:162) lingkungan utama yang sangat bertanggung jawab terhadap kelangsungan pendidikan baik di dunia atau khususnya di Indonesia yaitu keluarga, masyarakat dan pemerintah (Sekolah) ketiganya itu sering disebut dengan tripusat pendidikan yang masing-masing lingkungan tersebut memiliki peran yang sama dan saling melengkapi.

Proses pendidikan nilai-nilai kecakapan hidup di lingkungan keluarga nelayan pandega di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan adalah proses belajar, yaitu suatu proses akomodasi di mana individu menahan, mengubah impuls-impuls dalam dirinya dan mengambil alih cara hidup atau kebudayaan masyarakat setempat; kedua, dalam proses sosialisasi, individu mempelajari kebiasaan, sikap, ide-ide, pola-pola nilai dan tingkah laku, dan standar tingkah laku dalam masyarakat di mana dia hidup; ketiga, semua sifat dan kecakapan yang dipelajari dalam proses sosialisasi itu disusun dan dikembangkan sebagai suatu kesatuan sistem dalam diri individu. Hal di atas dapat memberikan suatu keterangan bahwa dalam proses sosialisasi/ penanaman nilai-nilai kecakapan hidup nelayan pandega, baik di lingkungan maupun di keluarga tidak terlepas dari faktor-faktor berikut: 1) Keteladanan dan kehadiran orang tua atau

orang dewasa dalam keluarga memiliki fungsi pendidikan yang pertama dan utama.
2) Warisan biologis orang tua.

SIMPULAN

1. Dinamika sosial pendidikan masyarakat nelayan di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang berdasarkan wawancara terhadap pandangan orang tua tentang pendidikan masih rendah, hal ini terlihat dari tanggapan orangtua, rata-rata mereka lebih senang apabila anak-anak mereka bisa membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Pandangan orangtua tentang nilai anak yang lebih cenderung melihat anak dari segi keuntungan akan sangat berpengaruh dalam kaitannya terhadap perhatian dan partisipasi menyekolahkan anak sampai pada jenjang yang tinggi.
2. Komitmen Keluarga Nelayan terhadap pendidikan anak di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, secara umum pola asuh orang tua yang diterapkan adalah pola asuh otoriter dan pola asuh permisif dikarenakan ada beberapa sebab antara lain sebagai berikut: rata-rata orang tua di Desa Pandangan Wetan tidak terlalu membatasi anak dalam melakukan sesuatu. Apabila anak melakukan kesalahan, orang tua jarang sekali menghukumnya, hanya memarahi dan menasehati anak untuk tidak melakukannya lagi, untuk menghindari kesalahan anak tersebut banyak orang tua di Desa Pandangan

Wetan bersikap memaksakan kehendak dalam bidang tertentu seperti pendidikan anak, selalu mengatur tanpa memperhatikan kemauan dan perasaan anak, menghukum bila anak bertindak tidak sesuai dengan kehendaknya dan orang tua juga kurang berkomunikasi baik dengan anaknya.

3. Perilaku anak keluarga nelayan di Desa Pandangan Wetan Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang, secara umum sebagian besar bentuk perilaku sosial anak termasuk baik. Adanya pelanggaran menurut para responden masih dalam kategori wajar.

SARAN

1. Perlunya pemberian beasiswa yang tepat sasaran bagi anak-anak usia sekolah di daerah nelayan, beasiswa itu tidak hanya dalam bentuk pembebasan SPP, tetapi juga berupa subsidi untuk meringankan biaya transportasi dan uang saku perbulannya.
2. Meningkatkan kesadaran tentang manfaat pendidikan kepada pemuda-pemuda nelayan agar mereka memiliki persepsi yang lebih positif lagi tentang pendidikan formal, sehingga setelah tamat SLTP/ sederajat mereka tidak tergiur untuk langsung ikut melaut, melalui form-form perkumpulan pemuda, seperti Remaja Masjid.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rembang, perlu segera merealisasikan berdirinya Sekolah Kejuruan Kelautan di Kabupaten Rembang, agar sumberdaya manusia

- yang bergerak di sektor perikanan dan kelautan semakin meningkat kualitasnya.
4. Pendidikan non-formal perlu diberikan kepada anak-anak nelayan dengan tujuan agar anak nelayan memiliki tambahan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga di masa yang akan datang anak nelayan memiliki kualitas yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Kusnadi, 2003. *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Ar-Ruzz.Jogjakarta: media.
- _____, 2009. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Humaniora Utama Press. Bandung
- Rusli Ibrahim. 2001. *Landasan Psikologi Pendidikan Jasmani di Sekolah Dasar*. Jakarta: Dirjen Olahraga Depdiknas
- Mulyadi,2007.*Ekonomi Kelautan*. Jakarta. PT RajaGrafindo Persada.
- Moleong, Lexy. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Ritzer, George, Barry Smart. 2012. *Handbook Teori Sosial*. Bandung : Nusamedia.
- Santosa, selamat. 2006. *Koleksi Buku 2006 Dinamika kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sipahelut, Michel.2009. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Jurnal IPB.
- Soekanto, Soerjono. 2003. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Singgih D.G dan Y. Singgih D.G. 2001.*Psikologi Praktis; anak, Remaja, dan Keluarga*. Jakarta: PT BKK Gunung Mulya.
- Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyudin, Agung dan Pambudi Handoyo, 2013. *Pola Asuh Orang Tua Nelayan Dalam Membimbing Anak Di Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik*. Hasil penelitian. UNESA.

ANUT GRUBYUG: TAKLUKNYA PETANI PADA MOBILISASI PEMBANGUNAN. Studi Kasus pada Proyek Pengembangan Jarak Pagar Sebagai Sumber Energi Alternatif di Kecamatan Tepus, Gunungkidul, DI Yogyakarta

Gunawan

Jurusan Sosiologi dan Antropologi-Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Gd. C7 Lt.1 Sekaran-Gunung pati-Semarang.

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2016
Disetujui Juni 2016
Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

Jatropha, mobilization, farmers, construction

Abstrak

Masyarakat desa khususnya yang tinggal di wilayah dengan kondisi ekologis yang kering dan tandus seringkali menjadi warga yang harus hidup dalam jerat kemiskinan. Kondisi tersebut mendorong munculnya kehendak negara untuk memperbaiki dan mengatur warganya melalui proyek-proyek pembangunan. Atas nama pembangunan, tangan-tangan negara bergerak mengatur warganya dengan tujuan mulia, yaitu meningkatkan taraf hidup dan memperbaiki kehidupan masyarakat menjadi lebih baik daripada sebelumnya.

Melalui kajian terhadap proyek pengembangan tanaman jarak pagar sebagai sumber energi alternatif, maka tulisan ini mencoba mengurai berlangsungnya proyek pengembangan Jarak Pagar yang dijalankan dengan memobilisasi petani telah gagal untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mobilisasi telah menghasilkan warga yang semakin tidak berdaya karena menjadi *anut grubyuk*, hanya ikut-ikutan dengan yang lain. Keberadaan proyek untuk mengatasi krisis energi telah menjadikan petani masuk dalam dimensi krisis lain yaitu krisis kemandirian sehingga petani selalu berharap dengan proyek-proyek berikutnya. Mereka menyerah secara total tunduk di bawah struktur kekuasaan yang mengatur mereka.

Data untuk tulisan ini dikumpulkan dari penelitian kualitatif yang dilakukan di Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunungkidul, DI Yogyakarta.

Abstract

Villagers especially those living in areas where ecological conditions were dry and barren often the people who have to live in poverty. These conditions encourage the emergence of the will of the state to improve and regulate its citizens through development projects. The name of development, the hands move countries regulate its citizens with a noble purpose, namely improving the standard of living and improve people's lives better than ever.

Through the study of the development project Jatropha as an alternative energy source, then this paper tries to parse the ongoing development of the Jatropha project which is run by mobilizing farmers have failed to improve people's lives. The results showed that the mobilization has resulted in an increasingly helpless citizens due to being embraced grubyuk, just went along with the others. The existence of the project to overcome the energy crisis has made farmers fall into another crisis dimension the crisis of

self-reliance so that farmers are always looking forward to the next projects. They surrendered totally subservient to the power structure that governs them.

Data for this paper were collected from qualitative research conducted in the District Tepus, Gunung Kidul Regency, Yogyakarta.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
goensaja@gmail.com

PENDAHULUAN

Masyarakat desa khususnya yang tinggal di wilayah dengan kondisi ekologis yang kering dan tandus seringkali menjadi warga yang harus hidup dalam jerat kemiskinan. Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat tersebut ditengarai disebabkan adanya keterbatasan dan hambatan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitar mereka. Minimnya sumber daya yang ada terutama lahan pertanian, menjadikan penduduk setempat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, khususnya pangan. Hal tersebut terjadi juga di Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Secara umum wilayah di Gunungkidul merupakan wilayah yang kering dengan curah hujan rata-rata 1.954,43 mm/tahun dengan jumlah hari hujan rata-rata 103 hari/tahun. Dalam satu tahun, hujan turun rata-rata tujuh bulan sedangkan lima bulan berikutnya adalah musim kemarau. Pada waktu-waktu tertentu kemarau dapat berlangsung selama enam sampai delapan bulan. Wilayah Gunungkidul bagian selatan, berhadapan langsung dengan samodera Hindia, curah hujannya lebih rendah dibanding wilayah lainnya sehingga menjadi wilayah paling kering dengan kondisi tanah yang didominasi oleh lapisan kartst sehingga kurang subur untuk pertanian. Wilayah ini

selalu mengalami kekeringan pada musim kemarau. Berdasarkan catatan RPKD tahun 2013, terdapat lahan kritis Seluas 15.611 ha yang berada di wilayah bagian selatan dan tengah.

Kondisi geografis di wilayah selatan yang kering dan tandus, tetap dimanfaatkan oleh penduduk setempat untuk bertani dengan sistem pengolahan lahan tadah hujan. Lahan-lahan pertanian hanya dapat menghasilkan panen sekali dalam setahun dengan tanaman utamanya padi, ketela dan jagung. Lahan bercocok tanam yang tersedia sangat sedikit dengan tingkat produktifitas rendah.

Minimnya sumber daya yang ada menempatkan Gunungkidul sebagai daerah dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan catatan BPS tahun 2010. Sebanyak 20% penduduk dari 688,145 orang termasuk dalam kategori miskin. Hal itu disebabkan oleh karakteristik dan kualitas geografis, serta kesuburan tanah yang buruk untuk usaha pertanian (Gunawan; 2014)

Dalam padangan pemerintah (baca: negara), kemiskinan adalah malah yang harus diselesaikan. Warga miskin harus diantarkan dari jurang kemiskinan sehingga hidupnya menjadi lebih sejahtera. Pemerintah harus dapat mewujudkan cita-cita negaranya menjadi negara yang adil, makmur, sentosa. Kondisi ideal itu dicapai

melalui “Pembangunan”. Terminologi pembangunan menjadi sangat populer pada era orde baru. Jika pada era pemerintahan sebelumnya, Soekarno membangun otoritasnya melalui kharisma personal dan menguatkan semangat nasionalisme, maka pada era pemerintahan Soeharto legitimasi kekuasaannya dibangun melalui janji pembangunan ekonomi masa depan.

Pembangunan berkembang menjadi idiologi yang melegitimasi kekuasaan negara untuk mengatur warganya. Atas nama pembangunan, tangan-tangan negara menjalankan kekuasaannya mengatur warganya untuk mengapai tujuan mulia, yaitu meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kehidupan masyarakat agar menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Warga menjadi target pembangunan yang *manut* dan harus menerima program pembangunan sesuai kehendak pemerintah. Namun pada banyak kasus pembangunan justru turut memunculkan persoalan-persoalan baru yang berkembang dan ikut berperan dalam menciptakan kesenjangan dan pertikaian sosial dewasa ini (Li, 2012: 1).

Dalam konteks relasi kuasa antara negara dan warga seperti yang telah saya singgung di awal, maka tulisan ini ingin menjawab pertanyaan, mengapa petani di Gunungkidul ikut serta dalam penanaman jarak pagar. Padahal tanaman tersebut bukanlah tanaman yang dapat mencukupi kebutuhan subsistensi mereka terutama pangan. Dalam konteks petani Gunungkidul pertanyaan ini menjadi relevan karena selama ini pertanian di sana ditujukan untuk memproduksi sumber pangan. Di sisi lain kondisi lahan tanaman pangan yang terbatas

masih harus ditambahi dengan tanaman lain yang non pertanian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut saya mencoba menerangkan dari relasi kuasa antara negara dengan petani di Gunungkidul dengan menempatkan peristiwa tersebut sebagai praktek kepengaturan negara kepada warganya. Pengembangan tanaman jarak pagar menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintahan (baca: negara) dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan krisis energi fosil.

Penanaman jarak pagar di Gunungkidul sebagai bagian dari upaya mengatasi persoalan krisis dan ketergantungan terhadap energi fosil merupakan bentuk praktik negara dalam mengelola dan mengatur kehidupan warganya sebagai wujud dari kehendak untuk memperbaiki. Kehendak untuk memperbaiki terletak di gelanggang kekuasaan yang oleh Foucault disebut dengan kepengaturan (*governmentality*), yaitu gagasan mengenai relasi kekuasaan yang diimplementasikan untuk menata, mengatur, dan mengendalikan individu-individu atau masyarakat sesuai dengan kehendak penguasa (baca: negara). '*The conduct of conduct*' atau 'pengarahan perilaku' yakni upaya untuk mengarahkan perilaku manusia dengan serangkaian cara yang telah dikuasai sedemikian rupa. Tujuannya adalah untuk menjamin “kesejahteraan masyarakat, perbaikan keadaan hidup mereka, peningkatan kemakmuran, usia harapan hidup, kesehatan, dst.” (Li 2012:9)

Data dalam tulisan ini diperoleh dari penelitian lapangan di Desa Purwodadi, dan Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus, Gunungkidul, Provinsi daerah Istimewa

Yogyakarta. Desa tersebut menjadi tempat dilangsungkan proyek penanaman jarak pagar oleh perusahaan dan pemerintah. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan para petani dan penyelenggara proyek untuk melihat sejauh mana keikutsertaan serta interaksi sosial yang terjadi ketika proyek tersebut berlangsung.

JEJAK-JEJAK JARAK PAGAR DI INDONESIA

Jarak pagar (*Jatropha curcas Linn*), konon tanaman ini disebarkan oleh pelaut-pelaut Portugis dari Amerika Tengah dan Mexico melalui Cape Verde kemudian menyebar ke Afrika dan Asia hingga akhirnya banyak tumbuh di wilayah tropis dan sub tropis. Potensinya untuk sumber bahan *biofuel* sudah diketahui sejak lama. Pada perang dunia kedua, jarak pagar sudah digunakan sebagai pengganti bahan bakar mesin diesel di Madagaskar, Benin, dan Cape Verde (Brittaine, 2010). Di Indonesia, pohon jarak kadang hanya disebut dengan “jarak”. Penyebutan itu seringkali menimbulkan salah pengertian karena ada dua jenis pohon jarak yang biasa dikenal, yaitu jarak kepyar atau dikenal dengan sebutan kastor, kaliki (*riniscus communis*) dan jarak pagar (*jatropha curcas Linn*). Jarak pagar juga dikenal sebagai obat. Getahnya yang berwarna putih pada masa lalu lazim digunakan untuk antiseptik, obat luka, dan obat kumur saat gusi berdarah, sedangkan bijinya menjadi obat pencahar yang manjur (Kloppenburger, n/a). Selain itu biji jarak pagar juga dipakai untuk penerangan rumah. Pada dekade ini, jarak pagar pernah menjadi tanaman yang sangat populer di wilayah

Asia, seperti Indonesia, Philipina, dan India, Myanmar serta di Afrika, seperti Mozambique, Kenya, Tanzania, dan Ethiopia. Tanaman ini mulai ditanam secara masif karena bijinya dipromosikan dapat menjadi sumber *biofuel*. Pengembangan tanaman Jarak pagar diharapkan dapat menyelesaikan persoalan klasik di negara dunia ketiga yaitu krisis energi, kemiskinan, dan pengangguran (Amir, 2008). Jarak pagar merupakan tanaman yang dapat tumbuh di lahan yang kering dan tandus. Biji jarak pagar tidak termasuk sebagai tanaman yang dapat dimakan, sehingga penggunaan untuk sumber bahan bakar tidak akan bersaing dengan kebutuhan pangan dan tidak akan mengancam ketahanan pangan.

Sejarah Jarak pagar di Indonesia digolongkan oleh menjadi tiga periode. Pertama terjadi pada masa penjelajahan bangsa sepanyol ke Asia. Periode ke dua adalah saat pendudukan Jepang tahun 1942-1945. Ketiga pada tahun 1994 sebagai sumber *biofuel* modern (Affif, 2014). Penyebutan tanaman jarak seringkali menimbulkan salah pengertian karena ada dua jenis pohon jarak yang dikenal, yaitu jarak kepyar (*riniscus communis*) yang juga dikenal dengan sebutan kastor, kaliki. Jenis kedua adalah jarak pagar (*jatropha curcas Linn*) yang di beberapa daerah juga dikenal dengan sebutan jarak budeg, jarak gundul, jarak pager, jarak pandak, jarak wates, dan jarak cina. Buah jarak kepyar dapat dimanfaatkan untuk bahan tambahan industri cat vernis, plastik, farmasi, dan kosmetika. Minyak yang dihasilkan tidak cocok digunakan sebagai bahan bakar, tetapi dapat digunakan untuk pelumas.

Di Indonesia, jarak kepyar sudah lebih

dahulu dibudidayakan dari pada jarak pagar. Pada tahun 1880 sebanyak tiga persen dari seluruh areal tanaman palawija khususnya di Jawa, ditanami dengan jarak kepyar untuk memenuhi permintaan pasar di Eropa sebagai akibat sampingan dari perkembangan industri (Boomgaard, 2004:169) Penelusuran Boomgaard menemukan catatan bahwa pada 1834 *bungkil* atau ampas sisa perasan biji jarak lazim digunakan untuk pupuk tanaman pertanian seperti tembakau, bawang, dan sayuran terutama di daerah Banten, Cianjur, Priangan, Dieng, Karesidenan Kedu, Madiun, dan Madura (Boomgaard, 1999)

Penggunaan bahan bakar untuk menjalankan mesin dari bahan-bahan nabati atau tumbuhan diawali oleh Rudolf Christian Karl Diesel pada mesin yang dirancangnya pada tahun 1893. Mesin rancangannya yang sekarang disebut dengan mesin diesel awalnya digerakkan dengan bahan bakar dari minyak kacang. Namun oleh perjalanan waktu bahan bakar fosil menjadi sumber bahan bakarnya. Penggunaan biofuel sebagai alternatif sumber bahan bakar yang menjadi fenomena global di paruh awal tahun 2000 sesungguhnya bukanlah hal baru. Pada skala Global, penggunaan biofuel sudah dilakukan oleh Brazil dan Amerika sejak abad ke-17 dengan memproduksi etanol yang kemudian diikuti dengan produksi biodiesel. Produksi etanol di Brazil mulai meningkat pada tahun 1970an melalui program *Proálcool*. Program ini merupakan program untuk mengatasi peningkatan jumlah import minyak yang mencapai puncaknya tahun 1979 (*Worldwatch Institute, 2007*). Pertumbuhan kebutuhan biofuel baik di Brazil, Amerika, dan Uni

Eropa semakin meningkat pada tahun 2000an, salah satu pemicunya adalah ratifikasi negara-negara di dunia terhadap Protokol Kyoto sebagai upaya dalam mengurangi dampak perubahan iklim dan pemanasan Global (Wilkinson, 2009). Salah satu peristiwa penting yang turut mendorong terjadinya ledakan wacana sumber biofuel di tingkat global adalah uji coba yang dilakukan oleh perusahaan otomotif Daimler Chrysler pada tahun 2005. Perusahaan itu melakukan uji coba penggunaan minyak jarak pada mobil produksinya di India. Uji coba tersebut merupakan salah satu bagian dari program pengembangan biofuel berbasis jarak pagar di India.

Di Indonesia pasang surut wacana biofuel berbasis jarak pagar berlangsung dengan cepat. Suraya Affif (2014) melihat bahwa gegap gempitanya pengembangan jarak pagar di Indonesia pada periode 2005-2006 sangat ditentukan oleh adanya hasrat pengembangan teknologi para teknokrat yang bersekutu dengan birokrat dan pemerintah serta wacana global tentang energi hijau yang bertemu dengan ingatan masa lalu pada era kolonial tentang tanaman jarak. Penelitian tentang produksi biofuel dari jarak pagar diawali oleh ITB sejak tahun 1997 dengan dukungan dana dari Mitsubishi Research Institute (Miri) dan New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) dari Jepang. Ketika terjadi krisis energi, pemerintah mulai mengupayakan pengembangan jarak pagar. Setelah dirintis oleh ITB, kemudian diikuti oleh IPB, dan BPPT. Setelah itu berbagai instansi pemerintah dan BUMN mulai ikut terlibat, seperti BPPT, Pertamina, PLN, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) serta

pemerintah daerah seperti Pemprov Nusa Tenggara Timur, Pemprov. Nusa Tenggara Barat, Pemkab. Purwakarta dan Pemkab. Indramayu. Saat itulah hiruk pikuk pengembangan jarak pagar dimulai.

Penelusuran melalui sumber media massa yang saya lakukan menunjukkan bahwa apa yang diperbincangkan dalam pengembangan jarak pagar juga mengalami perubahan. Pada tahun 2004-2007 perbincangannya didominasi oleh optimisme keberhasilan pengembangan jarak pagar pada waktu yang akan datang sebagai solusi terhadap krisis energi dan kemiskinan. Pemberitaan terkait dengan jarak pagar berisi tentang pencahangan pengembangan jarak pagar baik oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan luasan yang cukup fantastis. Pabrik-pabrik yang mulai dibangun, keberhasilan yang dicapai dari uji coba penggunaan minyak jarak sebagai bahan bakar. Namun pada tahun 2008 - 2012 pemberitaan tentang jarak pagar berisi tentang hal yang sebaliknya, yaitu dampak buruk bagi kelestarian ekologi, kegagalan dari program pengembangan jarak pagar, ketidakjelasan nasib petani terhadap apa yang diperoleh dari tanaman jarak pagar, hingga kasus-kasus penggelapan dana dan korupsi dana pengembangan jarak pagar.

PERAN NEGARA DALAM MENGATASI KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN BIOFUEL

Situasi yang turut mendorong hiruk pikuk wacana industri biofuel di Indonesia pada saat itu adalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di pasar dunia yang mencapai \$70 per barel pada tahun 2005.

Akibat dari kenaikan harga tersebut pemerintah Indonesia sempat menaikkan harga BBM di pasaran hingga dua kali pada bulan Maret dan Oktober. Perbincangan untuk mencari energi alternatif selain sumber energi minyak bumi kembali menyeruak karena keinginan untuk menekan jumlah penggunaan minyak bumi yang terus meningkat.

Keberhasilan para teknokrat mengolah biji jarak pagar menjadi bahan bakar semakin menjadikan tanaman Jarak pagar sebagai tanaman yang diandalkan untuk mengatasi persoalan krisis BBM. Pemerintah kemudian menerbitkan kebijakan-kebijakan yang mendukung terhadap upaya pengembangan industri minyak jarak pagar. sebagai tindak lanjut dari Instruksi presiden Nomor 1 tahun 2006 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*) Sebagai Bahan Bakar Lain. Pada Bulan Juli tahun 2006 dibentuknya Tim Nasional Pengembangan Bahan bakar Nabati Untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran. Tugas dari tim tersebut adalah menyusun cetak biru dan Peta Jalan (*Road Map*) pengembangan bahan bakar nabati untuk percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran. Kebijakan tersebut terkait dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya yaitu terbitnya deklarasi pada bulan Oktober 2005 tentang gerakan nasional penanggulangan kemiskinan dan krisis BBM melalui penanam jarak pagar sebagai bentuk Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK). Pada tahun berikutnya pemerintah menetapkan Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 2006 tentang penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati biofuel sebagai bahan bakar lain.

Instruksi tersebut ditujukan kepada tigabelas kementerian, gubernur, bupati/walikota agar mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan percepatan penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia melalui Mendagri mencanangkan program Desa Mandiri Energi (DME) dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap kebutuhan energi minyak bumi. Konsep Desa mandiri energi adalah mendorong desa-desa miskin dan terisolasi agar dapat menemukan sumber energi alternatif selain minyak bumi untuk mencukupi kebutuhan sumber energinya secara mandiri. Desa-desa yang terpilih untuk program Desa Mandiri Energi kemudian menjadi desa binaan kementerian terkait dan perusahaan swasta.

Jarak pagar semakin populer di kalangan petani yang berada di daerah kering dan tandus. Petani mengetahui Jarak pagar sebagai tanaman yang dapat menjadi sumber bahan bakar, dapat tumbuh di lahan yang tandus dan tidak perlu perawatan intensif. Wilayah-wilayah dengan kondisi tanah tidak subur, curah hujan rendah, dan tidak dapat ditanami tanaman pangan menjadi sasaran untuk areal budidaya tanaman Jarak pagar. Berdasarkan catatan Puslitbangbun (Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan), pada tahun 2006 terdapat 14,2 juta ha lahan yang sesuai dengan kriteria untuk pengembangan jarak pagar. Lahan tersebut adalah lahan yang dikategorikan sebagai lahan yang tidak produktif bagi tanaman petanian khususnya padi dan palawija. Hasil pendataan Tim Departemen Pertanian mencatat bahwa terdapat lahan seluas 49,5

juta ha yang sesuai untuk pengembangan tanaman jarak pagar, tersebar di seluruh Indonesia. (Mulyani 2008).

TANGAN-TANGAN YANG BERGERAK ATAS NAMA PEMBANGUNAN

Petani di Gunungkidul sudah sejak lama mengenal jarak pagar. Mereka biasa menjumpai pohon jarak pagar liar yang tumbuh di tempat yang sulit untuk tanaman lainnya hidup. Ketika mendengar kabar bahwa biji jarak pagar laku dijual, dan kebetulan di desa mereka ada yang mengajaknya menanam maka para petani mulai ikut-ikutan menanamnya. Mereka merasa yakin bahwa biji jarak akan tumbuh dengan baik, dan menghasilkan uang karena pohon jarak liar saja bisa tumbuh dengan baik, apalagi kalau ditanam di tempat yang baik dan dirawat.

Model penanaman jarak pagar di Gunungkidul ada dua macam, yaitu model perkebunan monokultur dan tumpangsari. Model perkebunan monokultur dilakukan oleh perusahaan swasta dengan menyewa atau membeli lahan dari masyarakat untuk ditanami jarak pagar. Pengelolaan perkebunan dilakukan oleh tenaga kerja yang dibayar oleh perusahaan. Proyek jarak pagar dari pemerintah juga ada yang menerapkan model tersebut terutama di lahan milik negara untuk membuat demplot untuk menyuplay sumber bibit di berbagai tempat. Model penanaman jarak pagar secara tumpangsari dilakukan oleh masyarakat. Mereka menanam jarak pagar di tepi lahan dan diantara tanaman jati (*tectona grandis*) dan akasia (*Acacia Spec.*), sekaligus sebagai pagar dari tanaman pangan.

Para petani di di Desa Sumberwungu, Kecamatan Tepus mulai menanam jarak karena adanya ajakan dari perusahaan. PT Titan adalah salah satu nama perusahaan yang masih diingat beberapa petani sebagai perusahaan yang memperkenalkan jarak pagar kepada mereka. Perusahaan tersebut memiliki kantor pusat di Jakarta. Perusahaan tersebut digerakkan oleh pengusaha lokal yang memang memiliki hubungan kerabat, bisnis, dan politik dengan birokrat di Jakarta. Nama perusahaan “Titan” berasal dari singkatan “Titus Bertani”. Titus dikenal sebagai nama pemilik perusahaan tersebut.

Suwage, staf kesra di Desa Sumberwungu, mengisahkan bahwa pada saat proyek jarak pagar berlangsung, dia berperan dalam mendistribusikan biji jarak kepada petani yang berminat menanam jarak pagar. Saat itu dia menjabat sebagai Kaur Kesra di pemerintahan desa. Dia ditunjuk oleh perusahaan menjadi koordinator tingkat desa yang tugasnya adalah mendistribusikan bibit kepada petani. Dia juga menjadi pengumpul untuk pembelian biji jarak pagar dari para petani. Pada saat itu perusahaan berjanji akan membeli bijinya dengan harga Rp. 3000/kg. Janji itu menarik minat petani untuk menanam jarak pagar, apalagi jarak pagar tidak perlu perawatan khusus.

Dengan kondisi geografis gunung-kidul yang berbukit-bukit dengan lapisan karst maka lahan pertanian yang subur sangat terbatas. Lahan banyak dimanfaatkan untuk menanam tanaman keras, jati (*tectona grandis*), sengon (*Albizzia chinensis*), mahoni (*Swietenia macrophylla*) dan akasia (*Acacia Spec.*). Luasan lahan yang dimiliki masyarakat juga sangat terbatas. Rata-rata petani mengerjakan lahan 1000-1500 m².

Hanya orang-orang tertentu saja yang mengerjakan lahan luas, yaitu para perangkat desa yang mendapatkan lahan garapan berupa tanah *pelungguh/bengkok* sebagai bentuk upah dari jabatan mereka.

Melalui pendekatan personal Suwage mulai mendistribusikan bibit jarak kepada petani yang memiliki lahan yang tidak dimanfaatkan untuk tanaman pangan dan tanaman keras. Pendekatan dilakukan dengan cara informal yaitu pada saat bertemu dan berbincang-bincang dengan masyarakat. “*Alasmu kana kae mbok ditanami jarak wae, wong isih selo tandurane, suk tak wenehi bibite, sapa ngerti suk payu rak lumayan hasile*”. “hutanmu itu ditanami jarak pagar saja, kan tanamannya masih jarang, besok saya kasih bibitnya, siapa tahu besok laku kan hasilnya lumayan...” demikian yang dia katakan untuk mengajak para petani agar mau menanam jarak pagar. Suwage kemudian mencatat luas lahan yang diajukan oleh petani kemudian mengajukan permohonan bibit ke perusahaan. Selain berupa biji, perusahaan juga memberikan benih jarak pagar yang disemai pada *polybag* dan sudah tumbuh sekitar 30 cm.

Meskipun banyak petani yang mendaftar untuk menanam jarak pagar, namun benih jarak pagar hanya terdistribusikan kepada orang-orang tertentu saja. Tidak semua petani kemudian menanam tanaman tersebut karena lahan yang dimiliki terbatas. Orang yang dapat menanam jarak pagar dalam jumlah banyak adalah para perangkat desa karena mereka memiliki akses lahan lebih banyak dibanding masyarakat umum.

Suwage sangat bersemangat menanam jarak. Sebagai staf desa, dia ingin memberi contoh kepada warganya agar ikut menanam

jarak, karena dapat memberikan keuntungan yang besar. Suwage tidak hanya menanam di lahan miliknya. Dia juga menanam lahan *pelungguh* staf desa lainnya serta tanah kas desa yang tidak dimanfaatkan untuk tanaman pangan atas seijin penggarapnya tanpa menyewa. Dia hanya bilang kalau besok memang ada hasilnya maka akan diperhitungkan bagiannya. Pada saat itu dia mengeluarkan dana dari kantongnya sendiri hingga lebih dari satu juta rupiah untuk membayar ongkos tenaga kerja penanaman. Bibit jarak yang ditanamnya bukan hanya yang berasal dari perusahaan, tetapi dia juga mencarinya dari biji jarak pagar liar di hutan.

Keikutsertaan petani dalam penanaman jarak disebabkan karena adanya staf perangkat desa yang terlibat di dalamnya. Para petani mengira bahwa proyek tersebut merupakan program pemerintah yang harus didukung. Para petani hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh petani lainnya. Setelah mereka mendaftarkan luas lahan yang akan ditanami jarak pagar, kemudian bibit, pupuk beserta sejumlah insentif untuk ongkos tenaga penanaman akan diterima oleh petani. Tidak ada yang mengontrol apakah bibit itu ditanam dengan baik atau tidak. Dari cerita salah satu petani, memang ada sebagian yang betul-betul menanam bibit yang diterima sesuai dengan yang dianjurkan, namun ada juga yang asal-asalan karena kondisi lahan yang terbatas.

Melihat para petani mulai menanam jarak pagar, Suwage selaku perangkat desa berinisiatif untuk mengajukan permohonan bantuan ke pemerintah di tingkat kabupaten. Dia kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan satu unit mesin pengepres biji jarak. Usulan itu memuahkan

hasil. Melalui Deperindakop, satu unit mesin pengepres biji jarak ke petani diberikan ke desa. Tujuannya agar petani dapat melakukan pengepresan biji jarak pagar dan mengambil minyaknya. Mesin tersebut diletakkan di belakang balai desa beserta bangunan kecil yang menaunginya.

Setelah jarak pagar tumbuh semakin besar dan mulai berbuah, ternyata hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Meskipun pohonnya tumbuh dengan baik namun buahnya hanya sedikit, sehingga mereka merasa enggan untuk memanen dan menjualnya. Beberapa petani sempat mengumpulkan biji yang diperoleh ke tempat Suwage sebagai koordinator. Tetapi karena jumlahnya hanya sedikit, perusahaan tidak mau membelinya dengan alasan tidak sebanding dengan biaya pengambilan. Akhirnya petani malas untuk merawat dan memanen biji jarak pagar. Petani berpikir bahwa lebih baik tenaga dan waktunya digunakan untuk mengerjakan hal lain daripada untuk memetik biji jarak pagar. Pada sisi lain, jarak pagar berbuah pada saat intensitas kerja pertanian sedang tinggi, yaitu bersamaan dengan panen jagung. Petani lebih memprioritaskan mengerjakan yang lainnya daripada mengurus jarak pagar. Memanen jarak pagar ternyata cukup memakan waktu kerena untuk memetik buahnya dalam satu tandan harus dipilih mana buah yang sudah tua dan mana yang belum. Tanaman jarak pagar yang masih ada kini kondisinya tidak terawat dan diterlantarkan saja, tidak berbuah bahkan banyak yang kering dan mati. Beberapa yang masih hidup tetap dibiarkan karena dirasa tidak mengganggu tanaman lain. Suwage, sebagai koordinator yang bertugas me-

nampung biji jarak, belum pernah melakukan pembelian dari petani. Akhirnya aktivitas Suwage sebagai koordinator berangsur-angsur menurun hingga berhenti. Mesin pengepres biji jarak yang diberikan oleh Dinas Perindustrian dan Koperasi akhirnya *mangkrak* di belakang balai desa sebelum sempat digunakan.

Lain cerita dengan yang terjadi di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus. Di desa itu penanaman jarak pagar dilakukan oleh pemerintah kabupaten di bawah koordinasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun). Proyek tersebut diawali dengan sosialisasi pemerintah kepada warga tentang pentingnya menanam jarak sebagai antisipasi terhadap kebutuhan bahan bakar yang menjadi semakin langka di masa mendatang. Dalam sosialisasi itu juga dijanjikan akan adanya satu harapan untuk menjadi lebih baik yaitu adanya peningkatan kesejahteraan karena adanya sumber ekonomi baru melalui biji jarak pagar yang dihasilkan. Di bawah koordinasi pemerintah desa, para petani dikumpulkan dan dibentuk kelompok-kelompok tani berdasarkan lokasi lahan garapan. Kelompok tani itulah yang kemudian menjadi target proyek penanaman jarak pagar. Dalam pelaksanaannya terdapat 34 kelompok dengan anggota kelompok berkisar antara 30-40 orang. Masing-masing kelompok memiliki ketua, sekretaris, dan bendahara sebagai garis struktural yang menghubungkan dengan ketua kelompok dan pemerintah di tingkat desa.

Masing-masing kelompok bertugas mengkoordinasi kepada anggotanya mengenai berbagai hal yang sudah dicanangkan oleh pemerintah. Melalui jalur

struktural itulah proyek penanaman jarak pagar dijalankan oleh negara. Inilah yang oleh Foucault disebut dengan “rasionalitas kepengaturan” yaitu upaya merumuskan “jalan paling tepat untuk menata kehidupan manusia” dalam rangka mencapai bukan saja tujuan dogmatik, melainkan “serangkaian hasil akhir yang spesifik” (Li, 2012:11).

Pelaksanaan penanaman jarak pagar sudah dirancang sebelumnya oleh pemerintah dan harus dijalankan oleh petani. Sebelum bibit datang, petani harus sudah menyiapkan lubang tanam sesuai dengan jumlah bibit yang diajukan. Bibit dikirim ke blok lokasi penanaman dalam *polybag*. Bibit tersebut rata-rata sudah tumbuh antara 25-30 cm. Karena lokasi penanaman di bukit-bukit yang tidak dapat dijangkau kendaraan maka bibit hanya diturunkan di suatu tempat yang disepakati, kemudian petani harus memikulnya ke lahan masing-masing. Membawa bibit hingga ke lahan tidaklah mudah. Tanah dalam *polybag* menjadikan beban berat dalam mengangkutnya karena untuk sampai di lahan harus melintasi bukit dan jalan setapak.

Memikul sejumlah bibit itu dirasakan sangat berat oleh petani tetapi mereka tetap patuh melakukannya. Meskipun demikian tetap saja ada resistensi dikalangan sebagian petani. Siswanto bercerita kalau ada di antara mereka ada yang membuang tanah dalam *polybag* ke sungai atau jurang supaya bebannya bawaannya menjadi ringan. Bahkan ada juga yang membuang bibitnya. *“Iha mung wit jarak wae kok ndadak ditandur sak lemahe, marai ngebot-boti le mikul. Dijabut wae rak ya urip...”* (“Iha cuma pohon jarak saja kok ditanam beserta tanahnya, menjadikan berat saat dipikul.

Dicabut saja pasti ya tumbuh...”). Ternyata benar, jarak pagar tetap bisa tumbuh meskipun ditanam dari bibit yang sudah dicabut dari *polybag*-nya. Petani yang membuang bibitnya juga tidak mendapatkan sangsi apapun karena ternyata tidak ada pemantauan oleh pengurus kelompok maupun perangkat desa terhadap jumlah bibit yang sudah ditanam.

Selain mendapatkan bibit, petani juga mendapatkan uang insentif untuk pembuatan lubang tanam, pengangkutan, dan penanaman. Selain itu petani masih mendapatkan pupuk untuk pemupukan awal. Giyar, salah seorang petani, mengatakan bahwa besarnya uang insentif adalah Rp. 1000,- per bibit. Saat itu dia menerima uang Rp. 1.250.000. Uang tersebut dia gunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, karena saat pembuatan lubang tanam dan penanaman dia kerjakan bersama istrinya. Beberapa petani lain berkisah bahwa dia menerima uang hanya sekedar untuk lewat saja karena untuk penanaman harus mencari tenaga upahan karena tidak sanggup dikerjakan sendiri.

Para petani semakin merasa yakin bahwa biji jarak pagar memang menjanjikan hasil yang baik karena di desa itu dibangun unit pengolahan hasil biji jarak pagar. Bangunan didirikan beserta mesin pengolahannya. Para pengurus kelompok juga mengikuti pelatihan untuk mengolah biji jarak menjadi minyak jarak. Uji coba pemrosesan minyak jarak dilakukan atas kerjasama antara pemerintah dengan lembaga penelitian agribisnis Universitas Pembangunan Nasional, Yogyakarta. Biji jarak pagar yang digunakan untuk uji coba didatangkan dari tempat lain karena jarak

pagar di desa itu belum berbuah.

Peran staf pemerintah desa rupanya sangat penting dalam menggerakkan masyarakat untuk turut terlibat dalam penanaman jarak pagar. Perusahaan ternyata juga menggunakan siasat yang sama dengan pemerintah untuk mengatur warga. Strategi perusahaan untuk melibatkan staf pemerintah desa seperti Suwage rupanya cukup efektif untuk menarik masyarakat agar mau menanam jarak pagar. Ada dua alasan mengapa pemerintah setempat memiliki peran penting dalam mengajak masyarakat, yaitu perusahaan dapat mengaburkan kepentingan bisnisnya, karena dengan menggunakan pemerintah setempat maka seolah-olah sebagai program pemerintah yang harus didukung oleh masyarakat, karena program tersebut bertujuan meningkatkan pendapatan. Dengan perusahaan mendapatkan keuntungan karena terbuka akses untuk memperoleh lahan dan tenaga. Alasan yang kedua adalah pandangan masyarakat terhadap perangkat desa sebagai orang yang disegani dan dihormati, sehingga dengan pendekatan personal staf desa dapat mengajak masyarakat agar terlibat dan menanam jarak pagar (Gunawan, 2014).

Dalam perkembangannya proyek penanaman jarak tersebut tidak membuahkan hasil seperti yang diharapkan. Bibit yang ditanam awalnya tumbuh dengan baik, namun buahnya sedikit. Beberapa orang ada yang sempat memanen biji jarak, tetapi hanya mendapatkan 1-2 kg saja sehingga mereka enggan membawanya ke penampung di tingkat desa. Padahal menurut skema proyek, hasil panen biji jarak pagar dibeli and ditampung oleh pengurus kelompok tingkat desa lalu setelah terkumpul akan diproses

menjadi minyak jarak di pabrik yang sudah dibangun. Namun ternyata jarak pagar yang ditanam tidak kunjung berbuah. Padahal dana untuk pembelian biji jarak pagar sudah dianggarkan oleh Dishutbun dan diserahkan kepada kelompok induk di tingkat desa. Namun karena tidak ada biji jarak yang dipanen maka dana tersebut tidak dimanfaatkan. Keberadaan dana tersebut menjadi kasak kusuk dan gosip di antara warga karena tidak jelas keberadaannya saat ini. Bahkan sempat mencuat dalam pemberitaan media massa tentang adanya indikasi korupsi dana tersebut karena digunakan untuk kepentingan pribadi salah satu pengurus kelompok.

ANUT GRUBYUG DALAM RELASI SOSIAL BERKOMUNITAS

Para petani tidak mengetahui dengan pasti asal muasal proyek jarak pagar di desanya. Tiba-tiba saja beberapa petani dikumpulkan di balai desa untuk mendapatkan penjelasan tentang program tersebut. Sebagian besar petani lain hanya mengikuti apa yang dilakukan oleh petani lainnya. Mereka mendaftarkan luas lahan yang akan ditanami jarak pagar kepada staf desa, kemudian bibit, pupuk beserta sejumlah insentif untuk ongkos tenaga penanaman akan diterima oleh petani. Tidak ada yang mengontrol apakah bibit itu ditanam dengan baik atau tidak. Dari sejumlah petani yang mengajukan permohonan untuk mendapatkan bibit jarak pagar memang ada sebagian petani yang betul-betul menanam bibitnya sesuai dengan yang dianjurkan, namun ada juga yang menanam secara asal-asalan karena kondisi lapisan tanahnya

berbatu sehingga sulit untuk membuat lubang sesuai dengan aturan teknis penanaman.

Siswanto merupakan salah satu petani yang ikut menanam jarak pagar. Ketika menceritakan kembali apa yang dilakukan pada saat itu dia tidak ingat dengan pasti berapa jumlah bibit yang dia terima. Seingat dia lebih dari 1500 bibit. Siswanto hanya ingat jumlah uang insentif yang didapatkan yaitu Rp. 1.500.000. Siswanto bercerita kalau uang yang dia terima digunakan untuk membeli anakan sapi. Uang tersebut seharusnya digunakan untuk biaya penanaman. Namun karena penanaman dapat dikerjakan bersama istrinya, sehingga uang yang diterimanya dapat digunakan untuk kepentingan yang lain. Namun sebetulnya dia tidak menanam seluruh bibit yang dia terima, dia hanya menanam sebagian saja di tempat-tempat yang mudah dijangkau. Banyak juga bibit yang sengaja dibuang di sungai, dan ada yang hanya asal tanam saja tidak sesuai dengan anjuran.

Berbeda lagi dengan cerita Pak Rawan. Dia termasuk petani yang dengan sungguh-sungguh menanam bibit yang diterima. Dia mengajukan permohonan bibit sebanyak 1000 batang. Namun karena tanaga kerja dari keluarga tidak mencukupi, penanaman bibit dilakukan dengan menggunakan buruh upahan. Karena berharap memang tanaman tersebut akan dapat memberikan hasil maka Pak Rawan mau mengeluarkan ongkos tambahan untuk membayar buruh. Pak Rawan harus mengeluarkan uang Rp. 600.000 untuk menyediakan makan dan minum para pekerja saat pembuatan lubang dan penanaman.

Mbah Giyar bercerita lain, ketika proyek jarak pagar berlangsung dia ditunjuk

sebagai ketua sub kelompok. Anggota kelompok yang dipimpin Giyar ada 46 orang. Dia bercerita kalau pada saat penanaman mendapatkan ongkos tanam perbatang Rp. 150. Uang insentif penanam yang diterima dipotong iuran Rp. 10.000 per orang untuk kas kelompok dan oleh Giyar disimpan di BRI Bintaos. Jumlah uang yang diperoleh kelompoknya sebanyak Rp. 460.000. uang tersebut sampai saat ini masih tersimpan di BRI kecamatan Tepus. Pada saat proyek berlangsung, Giyar menerima Rp. 1.250,000. Namun uang tersebut habis untuk menyediakan makan dan minum serta membayar upah tenaga kerja. Kebetulan dia hanya menggarap lahan dengan istrinya sehingga harus mencari tenaga kerja tambahan. Tahun pertama Giyar dan juga petani lain masih semangat merawat, memupuk, memangkas, serta menggemburkan tanah atau *ndangir*. Para petani masih bersemangat untuk merawat bahkan pertemuan-pertemuan kelompok dan penyuluhan rutin diadakan. Pertemuan diadakan di bawah pohon jarak, disediakan konsumsi, bahkan setiap orang mendapat uang Rp. 25.000. "*Koyo-koyo pancen bakal ngasilke*" "sepertinya memang akan berhasil" begitu kata Giyar menceritakan kembali kenangan dia waktu proyek berlangsung. Namun setelah tahun kedua ternyata kondisinya mulai tidak jelas. Beberapa anggota kelompoknya mulai mengumpulkan biji hasil panen 1-2 kg ke tempat Giyar, tetapi karena tidak punya uang untuk membelinya dia menghubungi ketua umum di tingkat desa, namun tidak juga diberi uang untuk membeli biji jarak hasil panen anggota kelompok. Akhirnya biji-biji yang dihasilkan hanya ditimbun dibawah

balai-balai di gubugnya yang ada di ladang. Biji jarak pagar itu masih tersimpan hingga kini di dalam karung dengan kondisi sudah rusak.

Mbah Tomejo juga mengalami hal yang sama dengan petani lain, dia sudah merombak jarak yang ditanam sekitar tiga tahun lalu. Pada saat program penanaman jarak pagar masih berjalan, tanaman jaraknya tumbuh subur tetapi buahnya tidak lebat, sehingga untuk memetikanya diperlukan tenaga dan waktu khusus. "*methik woh jarak kuwi mangan tenaga, lan wektu. Nek wis wayahe awoh le methik kudu milehi, trus kudu ngonceki kaya kacang. Kamongko regane mung 1200 per kilo. Nek sekarung polpole mung entuk 5 kilo, duwite entuk 6000. Lha yo ora gathuk, sedino ora cocok karo kangelane.*" (Memetik buah jarak memerlukan tenaga dan waktu. Kalau sudah waktunya berbuah, memetikanya harus dipilih, lalu harus dikupas seperti kacang. Padahal harganya hanya 1200 per kilo, kalau sekarung hanya dapat 5 kolo, uangnya mendapat 6000. Ya tidak sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan.

Menceritakan pengalaman petani saat ikut dalam program menanam jarak pagar seringkali disampaikan dengan ekspresi jengkel dan olok-olok. Para petani yang pada waktu lalu menanam jarak pagar merasa apa yang sudah dilakukannya sebagai hal yang aneh, karena mereka sendiri juga tidak menyadari apa yang membuat mereka menjadi sangat bersemangat untuk menanam jarak pagar, serta memiliki harapan akan mendapat keuntungan yang sangat besar. Ketika menceritakan kembali saat mereka menanam jarak pagar mereka merasa heran, mengapa dulu mau saja ikut-

ikutan menanam padahal mereka harus mengangkut bibit jarak yang letaknya ditanah lapang di bawah bukit dan harus memikul bibit dalam *polybag* ke lahannya yang berada di atas bukit. Padahal jalur jalannya cukup terjal. “*Coba saiki dibayar seket ewu durung karuan saguh nek kon mikul bibit jarak saka Mudal nganti tekan Plemahan*” “sekarang dibayar limapuluh ribu saja belum belum tentu mau kalau disuruh memikul bibit jarak dari Mudal sampai Plemahan” demikian kata pak Rawan ketika menceritakan kembali pengalamannya.

Setelah program penanaman jarak pagar tersebut tidak menghasilkan seperti yang diharapkan, kini petani merasa aneh dengan apa yang sudah dilakukannya di kala itu. Apa yang menjadikan mereka mengikuti saja apa yang dilakukan oleh orang lain, terlebih lagi ajakan itu adalah menanam tanaman yang sebelumnya sama sekali tidak termasuk dalam tanaman yang dibudidayakan dan diharapkan hasilnya.

Keanehan sebetulnya sudah dirasakan oleh pak Suryanto sejak awal petani diajak untuk menanam jarak pagar. Pak Suryanto termasuk petani yang menggarap tanah AB. Selain sebagai petani, pak Suryanto juga menjadi seorang *blantik*, yaitu pedagang hewan ternak yang melayani jual beli ternak di desanya. Ketika awal mula petani diajak untuk menanam dia merasa aneh, mengapa orang-orang mau menanam jarak, padahal hasilnya belum jelas. Bagi Pak Suryanto lahan yang digunakan untuk menanam jarak pagar lebih baik ditanami dengan tanaman lain, seperti lamtoro atau turi. Karena kedua tanaman tersebut daunnya dapat digunakan untuk pakan ternak. Karena pertimbangan

itu maka Pak Suryanto tidak menanam jarak pagar, dia menggunakan lahannya untuk ditanami tanaman yang daunnya bisa untuk pakan ternak. Karena ketersediaan pakan ternak menjadi penting baginya sebagai seorang *blantik*. Namun ketika semakin banyak petani yang menanam jarak pagar, akhirnya pak Suryanto terbujuk dan ikut menanam juga. “*Kulo niku jane mboten pingin melu nandur jarak, nanging mergo kegawa kiwo tengene akhire dadi melu nandur, ndilalah kok ya ora ngasilke*” saya itu sebetulnya tidak minat untuk ikut menanam jarak tetapi karena terpengaruh orang-orang di kanan kirinya akhirnya ikut menanam juga, ternyata tidak ada hasilnya” pengaruh petani lain menjadikan pak Suryanto ikut menanam jarak pagar di lahannya. Dia ikut menanam karena sering kali saat berinteraksi dengan petani lain merasa sebagai orang yang berbeda dengan yang lain, sehingga dia merasa *ora pada kancane* (tidak seperti tetangganya). Perasaan itu menjadikan dia merasa terlepas dari relasi sosial dengan petani yang lain. Ketika tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh petani yang lain maka ada merasa aneh. Tentu saja merasa aneh karena ada relasi sosial yang terputus, ketika dalam perbincangan sehari-hari petani lain membicarakan jarak pagar, maka dirinya tidak dapat terlibat dalam obrolan itu. Kemudian muncul keraguan pada apa yang diyakini di awal. Sebagai sesama petani sebaiknya melakukan seperti yang dilakukan oleh petani lainnya (*podho kancane*) “*aku melu nandur jarak podo karo kancane, nek pancen hasil ya ben melu ngrasakke hasile panen jarak, tapi nek gagal, ya ora gagal dewekan*” (saya ikut menanam jarak agar

seperti petani lain, kalau berhasil ya supaya ikut merasakan seperti petani lain, sedangkan kalau gagal, tidak gagal sendirian).

Pak Marijan memberikan keterangan menarik ketika menceritakan keberadaan jarak pagar yang hingga kini masih dibiarkan tumbuh di sekitar lahan yang digarapnya. Dia mengatakan bahwa pohon jarak yang berada di pinggir-pinggir jalan utama dibiarkan tetap tumbuh, dan tidak dibabat karena ditujukan untuk memberikan bukti kepada pemerintah bahwa penanaman jarak pagar pada masa lalu memang sudah dijalankan dengan baik dan tetap dipelihara hingga kini. Dengan demikian pemerintah akan memberikan kepercayaan pada pemerintah sehingga akan ada lagi proyek-proyek lain masuk ke desa. Sementara itu mbah Giyar bercerita bahwa dia sengaja masih membiarkan pohon jarak pagar tetap tumbuh di beberapa tempat. Tujuannya agar jika suatu saat pasar biji jarak pagar bangkit kembali dan harganya laku, maka dia sudah punya pohonnya sehingga tinggal merawat agar berbuah. *“pokoke, sesuk nek who jarak kuwi payu, aku sing disik dewe entuk hasil”*. (Pokoknya kalau suatu saat biji jarak laku, aku akan menjadi orang pertama yang mendapatkan hasil).

REFLEKSI

Berbagai serpihan peristiwa yang telah saya uraikan di atas menunjukkan bahwa praktik pembangunan dijalankan oleh negara dalam relasi kuasa yang timpang. Kondisi kemiskinan yang dialami warga di Tepus, Gunungkidul memicu pemerintah untuk memberikan berbagai

proyek dan bantuan bagi warganya agar mereka terlepas derita kemiskinan. Warga dianggap tidak berdaya dan tidak mampu memanfaatkan sumber daya di sekitarnya sehingga harus diatur dan dimobilisasi agar mengalami peningkatan dalam memanfaatkan sumber dayanya.

Apa yang terjadi di Gunungkidul merupakan praktik Pembangunan dijalankan melalui kepengaturan terhadap warga yang merasuk kedalam “tubuh sosial” warga lewat tangan-tangan kekuasaan negara. Kepengaturan itu membentuk suatu keadaan yang secara buatan sedemikian teratur sehingga didorong oleh kepentingan pribadinya yang masing-masing akan berbuat (seolah-olah) seperti yang seharusnya mereka perbuat” (Li, 2012:10). Praktik tersebut seperti yang dialami oleh Suwage. Ketika dirinya melakukan tindakan “sukarela” mengajak warga menanam jarak pagar. Tanpa disadari dirinya telah menjadi tanga-tangan yang berkendak untuk mengatur bahkan melebihi kuasa perusahaan. Pada peristiwa lain, kekikutsertaan petani dalam menanam jarak pagar merupakan bentuk takluknya warga terhadap praktik kepengaturan yang dijalankan oleh negara. Petani turut serta dalam proyek jarak pagar sebagai bentuk penerimaan mereka terhadap kepengaturan atau “*governmentality*” negara. Bahwa fantasi dan harapan akan tercapainya peningkatan kesejahteraan dapat dicapai ketika mereka membangun relasi dengan negara. Namun pada titik ini sesungguhnya terjadi kondisi yang sebaliknya. Pengembangan jarak pagar yang awalnya ditujukan untuk mengatasi persoalan krisis energi fosil serta kemiskinan, telah bergeser dan men-

jerumuskan warga pada krisis yang lain yaitu hilangnya kemandirian warga dalam mengatasi persoalan hidupnya. Pembangunan yang dijalankan melalui mobilisasi telah gagal mencapai cita-cita mulia yaitu kehidupan warga yang sejahtera, makmur, sentosa. Praktik pembangunan yang dilakukan dengan mobilisasi warga menjadikan para petani semakin tergantung untuk diatur karena mereka menjadi orang-orang yang mengarpakan datangnya bantuan dan proyek selanjutnya. Peyelesaian persoalan krisis energi tidak diselesaikan melalui munculnya kedaratan kritis yang mendorong munculnya gerakan sosial namun dilakukan melalui mobilisasi dan dominasi kuasa negara yang melenyapkan kesadaran kritis itu. Apa yang dialami oleh Suryanto yang akhirnya turut serta menanam jarak pagar meskipun di awal dia tidak berminat, menunjukkan bahwa warga melakukan penyerahan total terhadap kepengaturan negara atas alasan kolektivitas di tingkat komunitas. Bahkan ketika harapan datangnya perbaikan telah kandas, warga masih saja berfantasi bahwa harapan akan datang, entah kapan.

Uraian dalam tulisan ini mungkin bisa menjelaskan mengapa pengembangan jarak pagar di Gunungkidul (juga di banyak tempat lainnya) gagal total.

DAFTAR PUSTAKA.

Afiff, Suraya. 2014 (a). Engineering the Jatropha Hype in Indonesia. *Sustainability* 6, 1686-1704; doi:10.3390/su6041686.

-----, 2014 (b). How did the idea of using Jatropha for biofuel emerge in Indonesia?. <http://jarak.iias.asia/how-did-the-idea-of-using-jatropha-for-biofuel-emerge-in-indonesia/> accessed 4/23/16 9:26 AM.

Amir, S. et al. 2008. Cultivating Energy, Reducing Poverty: Biofuel development in an Indonesian Village. *Perspectives on Global Development and Technology*, 7:2 113-132.

Boomgaard, P. 1999. "Maize and Tobacco in Upland Indonesia, 1600-1940" dalam Tania Li (ed) *Transforming the Indonesian Uplands: Marginality, Power and Production*. Harwood Academic Publishers, Canada.

Boomgaard, Peter. 2004. *Anak Jajahan Belanda: Sejarah Sosial dan Ekonomi Jawa 1795-1880*. Terjemahan Monique Susman. Djambatan, Jakarta.

Brittaine, R., Litaladio, M. 2010. Jatropha: a Smallholder Bioenergy crop. *The Potential for Pro-poor Development. Integrated Crop Management*, vol. 8. IFAD, Rome.

Franco, Jennifer, Levidow, Les, Fig, David, Goldfarb, Lucia, Hönicke, Mireille and Luisa Mendonça, Maria (2010). Assumptions in the European Union biofuels policy: frictions with experiences in Germany, Brazil and Mozambique. *Journal of Peasant Studies*. 37: 4, 661-698.

Gunawan, 2014. <http://jarak.iias.asia/what-was-the-link-between-jatropha-projects-and-rural-poverty-reduction->

in-gunungkidul-yogyakarta-province/
accessed: 11/24/15 11:34 AM.

_____ 2014. Why and how did farmers
in Gunungkidul, Yogyakarta,
participate in Jatropha projects?
[http://jarak.iias.asia/why-and-how-
did-farmers-ingunungkidul-
yogyakarta-participate-in-jatropha-
projects/](http://jarak.iias.asia/why-and-how-did-farmers-ingunungkidul-yogyakarta-participate-in-jatropha-projects/). Accessed 11/24/2015, 11.08
AM.

Kloppenburg, J.M.C. (N/A) <[http://www.semarang.nl/jamu/articles.php?lng=nl
&pg=506](http://www.semarang.nl/jamu/articles.php?lng=nl&pg=506)> (accessed 11 Juni 2013).

Li, Tania Murray. 2012. "Pendahuluan:
Kehendak untuk Memperbaiki,"
dalam *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan di Indonesia*, Tania Murray Li. Tangerang Selatan: Marjin Kiri, hlm. 1–56.

Mulyani Anny. 2008. *Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian* Vol. 30, No.4.

Wilkinson, John and Herrera, Selena, 2010 'Biofuels in Brazil: debates and impacts', *Journal of Peasant Studies*, 37: 4, 749-768.

ANALISIS POLA PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI SEKITAR MEANDER LUK ULO KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

Sriyono, Dewi Liesnoor Setyowati, Suroso, Astari Amalia

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2016
Disetujui Juni 2016
Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

Land Management, Luk Ulo river, Meander of Luk Ulo river

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik meander dan pola pengelolaan pada lahan pertanian di sekitar Meander Sungai Luk Ulo. Lokasi penelitian berada di Sungai Luk Ulo Kecamatan Karangsembung Kabupaten Kebumen, daerah penelitian dibagi menjadi 2 daerah yaitu Segmen 1 dan Segmen 2, sampel wawancara dilakukan dengan metode *purposive sampling* dengan penentuan besaran sampel menurut rumus slovin, didapat sebanyak 86 petani. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan pola pengelolaan lahan pada Segmen 1 berupa monokultur, sedangkan untuk rotasi tanaman, petani masih memilih padi-padi-bera, sedangkan untuk padi-padi-palawija mengalami penurunan, petani sebagian besar memilih 2 kali merotasi tanaman mereka, para petani memilih teras bangku karena kemiringan lereng yang cukup curam, sistem irigasi yang digunakan tadah hujan, pola pengelolaan lahan pada Segmen 2 monokultur, untuk rotasi tanaman yaitu padi-padi-bera, dan rotasi padi-padi-palawija mengalami penurunan, unuk konservasi lahan, petani di daerah ini sebagian besar menggunakan teras biasa atau pematang sawah dan tidak menggunakan mulsa, irigasi pada daerah ini adalah irigasi teknis sedangkan untuk upaya melestarian lingkungan sungai, masyarakat pada Segmen 2 belum melakukan upaya melestarikan lingkungan sungai.

Abstract

The aim of this research is to know the characteristic of meander and pattern management on agricultural farm in around the Meander of Luk Ulo's river. Observational location is at Luk Ulo's River Karangsembung's district kebumen's Regency, observational region is divided as 2 regions which is segments 1 and segments 2, interview sample is done with purposive sampling method with determination sample of slovin's formula, gotten as much for about 86 farmers. This research uses descriptive research method. The result of this research to explain the pattern management of farm on segment 1 as monoculture, meanwhile for rotation of the plant, farmers still choose padi-padi-bera, meanwhile for padi-padi-palawija is decrease, farmer generally use 2 times to rotate their plants, farmers choose stool terrace because inclination bevels that steep enough, irrigation system which uses is rain tank (tadah hujan), management pattern of the farm on segment 2 monoculture, to rotate the plant is padi-padi-bera, and rotate the padi-padi-palawija is decrease, for farm conservation, farmers in this region generally uses causeway terrace or

(pematang sawah) and doesn't use mulch, irrigation in this region is technical irrigation whereas for effort keeps up river's environment, society on segment 2 haven't done effort keeps up river environment.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
- sriyono.geografi@gmail.com
- liesnoor@yahoo.co.id
- rosgeo@ymail.com
- astariamalia52@gmail.com

PENDAHULUAN

Perihal pengelolaan lahan dari tahun ke tahun selalu menjadi masalah dalam penataan wilayah. Mulai dari penggunaan yang semestinya daerah konservasi sampai kepada lahan subur yang mestinya layak untuk pertanian. Hal ini juga dialami di daerah sekitar sungai, utamanya Luk Ulo di Kabupaten Kebumen. Dalam Perda no 23 tahun 2012 menyatakan Sungai Luk Ulo merupakan sungai yang berperan penting, selain karena termasuk dalam Cagar Alam Geologi Karangsambung pada bagian hulu, terdapat pula hutan bakau pada muara Sungai Luk Ulo sehingga menjadi sasaran pengelolaan DAS, dari hasil penelitian bentuklahan asal proses fluvial pada Sungai Luk Ulo diantaranya dataran banjir, Meander, sungai teranyam, dan sungai mati (Raharjo, 2010). Meander di Sungai Luk Ulo terbukti dari 7 Segmen sungai yang berkelok, 4 diantaranya dapat dikatakan sebagai Meander, keberadaannya yaitu di Desa Seling dan Karangsambung (Nur, 2009). Dikatakan Meander karena kelengkungannya atau sinusnya lebih dari 1,5 (Dury, 2003 dalam Nur, 2009).

Pemanfaatan lahan di sekitar Sungai Luk Ulo sebagian besar adalah lahan pertanian, sebagian besar lahan yang

dimiliki oleh petani adalah lahan warisan, sehingga mayoritas masyarakatnya masih mempertahankan penggunaan lahan untuk lahan pertanian, dengan kualitas sungai yang semakin menurun, petani dihadapkan dengan persoalan bagaimana mengelola lahan pertanian mereka supaya tetap produktif. Permasalahan menurunnya kualitas Sungai Luk Ulo selain karena pemanfaatan lahan yang tidak sesuai di bagian hulu, juga disebabkan oleh eksploitasi sumberdaya alam yaitu bahan galian C yaitu pasir dan batu yang sudah berlebihan dan tidak memperdulikan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Perbedaan antara debit maksimum dan debit minimum yang besar pada Sungai Luk Ulo menimbulkan terjadinya banjir, salah satu parameter dalam menilai konservasi tanah dan air suatu daerah yaitu berdasarkan perbandingan antara debit maksimum dengan debit minimum (Setyowati, 2008) daerah yang rawan terkena banjir luapan adalah Kecamatan Karangsambung, akibat banjir tersebut memang tidak sampai menelan korban jiwa, tetapi menurut Kepala Desa Seling Bapak Sutarjo (53), setiap tahun ada saja lahan pertanian warga yang terkena luapan sungai, akibat luapan tersebut hasil produksi warga berkurang, waktu panen yang dipercepat, dan gagal panen.

Kecamatan Karangsembung mempunyai 2 Segmen Meander, yaitu di Desa Karangsembung, Desa Kedungwaru, dan Desa Seling. Suharini (2009) menjelaskan bahwa Meander merupakan daerah yang rawan luapan karena alurnya yang berkelok-kelok, hal tersebut menambah potensi lahan yang berada di kanan-kirinya untuk terkena luapan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik meander dan pola pengelolaan pada lahan pertanian di sekitar Meander Sungai Luk Ulo.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian modifikasi. Penelitian ini berlokasi di Sungai Luk Ulo, Desa Karangsembung, Desa Seling, dan Desa Kedungwaru, Kecamatan Karangsembung, penentuan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa daerah-daerah tersebut mengalami erosi tebing yang parah di sekitar Meander, terdapat 2 Segmen di Kecamatan Karangsembung yang mengalami erosi tebing cukup signifikan, maka dalam penelitian ini peneliti membagi objek penelitian menjadi Segmen 1 dan Segmen 2, Segmen 1 terdapat di Desa Karangsembung, sedangkan Segmen 2 terdapat di Desa Kedungwaru dan Desa Seling.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan interpretasi, dokumentasi, uji laboratorium, observasi dan wawancara, untuk wawancara dilakukan dengan 86 petani yang mempunyai lahan di sekitar meander, jumlah tersebut berdasarkan rumus Slovin. Metode analisis data dengan interpretasi, deskripsi, dan *gap fill*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sungai Luk Ulo merupakan salah satu sungai di Kabupaten Kebumen yang masuk dalam wilayah pengelolaan BPDAS Serayu, Opak, Progo, Luk Ulo mengalir membelah Kabupaten Kebumen dengan luas wilayah kurang lebih 572,84 Km², sungai yang panjang dan membelah Kabupaten Kebumen ini bermuara di Samudera Hindia, Sungai Luk Ulo merupakan jenis sungai *antecedent* atau sungai yang memotong struktur geologi utama daerah yang dilaluinya, Curah hujan pada Sungai Luk Ulo hulu mencapai 2500-3250 mm/tahun, dan pada daerah hilir kurang dari 2600 mm/tahun. Hal tersebut sangat mendukung kegiatan pertanian di sekitar sungai, dari data hasil penelitian, pertanian di sekitar Sungai Luk Ulo secara garis besar dibagi menjadi pertanian lahan basah dan pertanian lahan kering, pertanian lahan basah berupa sawah, sedangkan pertanian lahan kering berupa kebun dan tegalan.

Seiring dengan berjalannya waktu, kondisi Sungai Luk Ulo semakin mengalami degradasi, pada beberapa kasus, degradasi di Sungai Luk Ulo disebabkan oleh eksploitasi sumberdaya alam yaitu bahan galian C yaitu batu dan pasir, selain itu adanya perubahan penggunaan lahan pada beberapa titik menyebabkan debit sungai dari tahun ke tahun semakin tinggi

1. Karakteristik dan Perubahan Meander Sungai Luk Ulo

Karakteristik kelokan Sungai Luk Ulo di Kecamatan Karangsembung dapat dikatakan sebagai meander karena nilai sinusnya lebih dari 1,5, nilai sinus terbesar terletak pada kelokan Desa Seling dengan

nilai 2,74, pada proses perkembangan meander, awal terbentuknya ialah kelokan biasa dengan sinus kurang dari 1,5, kemudian berkembang sampai sudut kelokan pada meander maksimum dan alur berubah menjadi lurus kembali, Meander Desa Seling mempunyai sinus yang tinggi, semakin tinggi nilai sinus maka semakin tua kelokan tersebut dan berpotensi menjadi lurus kembali, dan sisa dari meander tersebut menjadi danau tapal kuda.

Perubahan pada Meander Sungai Luk Ulo jika dilihat dari citra satelit cukup signifikan terlihat pada segmen 1, hal tersebut dikarenakan beberapa sebab yaitu adanya pertemuan sungai sehingga kekuatan arus cukup besar untuk mengikis dan merubah bentuk alur sungai, selain itu formasi geologi juga menjadi salah satu faktor, adanya perbukitan lipatan menyebabkan arus dari hulu memiliki kecepatan yang tinggi dengan lebar saluran yang sempit, ketika sampai pada daerah yang datar, energi arus tersebut akan menabrak tebing-tebing sungai dengan struktur tanah yang remah, sehingga terjadi pergeseran alur kelokan.

Segmen 2 juga tidak luput dari perubahan, faktor yang mempengaruhi ialah struktur tanah yang remah dan jenis tanahnya yaitu pasir berlempung sehingga sangat mudah tererosi, selain itu eksploitasi bahan galian C yang menggunakan mesin sedot menyebabkan pemecah energi air yaitu berupa pasir hilang.

2. Pengelolaan lahan pertanian

Hasil penelitian menunjukkan, dari 86 sampel 17,44% menggunakan sistem tumpangsari, sedangkan 82,5% masih

menggunakan sistem monokultur, sistem tumpang sari sangat disarankan oleh beberapa ahli pertanian, dengan adanya berbagai jenis tanaman, unsur hara dalam tanah akan terjaga keseimbangannya, selain itu kemungkinan untuk mengontrol hama penyakit dan meminimalisir gagal panen dapat diperkecil.

Daerah Segmen 1 mempunyai kemiringan yang beragam, 56,6% petani memilih menggunakan teras bangku, hal tersebut karena wilayahnya memiliki kemiringan 2-15% sehingga dipilih teras bangku sebagai upaya konservasi lahan, kemudian 23,3% petani memilih guludan, hasil penelitian, petani yang menggunakan gulud adalah petani yang lahannya berada pada daerah datar dan berupa kebun monokultur atau tegalan, sedangkan 20% petani tidak menggunakan tindakan apapun, biasanya lahan mereka berupa kebun campuran. Petani pada daerah ini juga tidak melakukan konservasi secara vegetatif, sebanyak 76,6% tidak menutupi lahan pertanian mereka dengan ranting atau tanaman penutup tanah, sedangkan 23,3% menutupi lahan pertanian mereka dengan sisa tanaman, ranting, atau tanaman penutup tanah.

Daerah Meander 2 melakukan konservasi secara mekanis dengan cara teras sawah biasa atau galengan sebesar 69,9%, dengan cara guludan sebesar 3,5%, dan tidak menggunakan apapun sebesar 26,7%. Kondisi pada daerah penelitian yang sebagian besar datar menyebabkan petani hanya melakukan konservasi lahan biasa, tidak seperti pada daerah penelitian 1 yang lebih beragam. Secara vegetatif masyarakat sebagian besar tidak melakukan tindakan

konservasi secara vegetatif, sedangkan untuk sumber air Segmen 1 merupakan daerah dengan sistem tadah hujan

seluruhnya, sedangkan pada daerah Segmen 2 sebagian tadah hujan dan sebagian irigasi teknis.

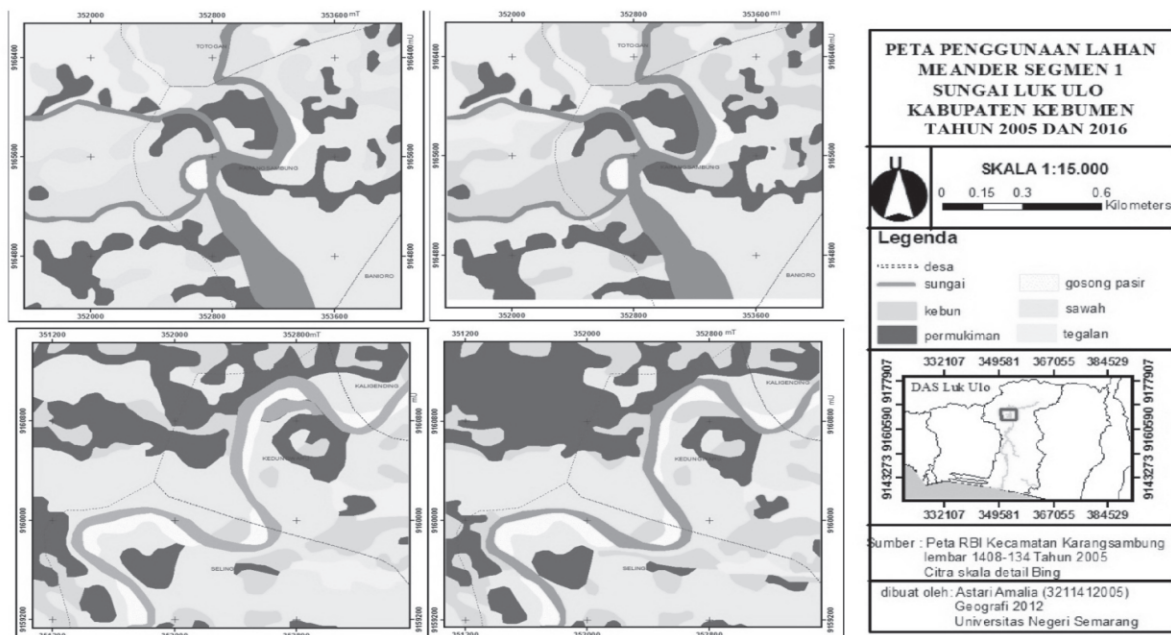
Tabel 1. Tabel Pengelolaan Lahan Segmen 1 dan 2 Meander Sungai Luk ulo

No	Lokasi	Pola tanam	Rotasi tanaman		Intenitas rotasi dalam 1 tahun
			Sebelum 2005	Sesudah 2005	
1.	Segmen 1	26,6% tumpangsari 73,3% monokultur	Padi-padi-palawija 26,6% dan padi-padi-bera atau kebun 73,3%.	Padi-padi-palawija 16,6% dan padi-padi-bera atau kebun 83,3%	Tidak pernah rotasi 33,3%, 2 kali rotasi 43,3%, dan 3 kali rotasi 23,3%.
2.	Segmen 2	12,5% tumpangsari 87,5% monokultur	Padi-padi-palawija 25% dan padi-padi-bera atau kebun 75%	Padi-padi-palawija 14,28% dan padi-padi-bera atau kebun 85,71%	Tidak pernah rotasi 30,35%, 2 kali rotasi 55,35%, dan 3 kali rotasi sebanyak 14,28%

Sumber: Data Primer, 2016

Penggunaan lahan pada daerah penelitian ikut mengalami perubahan, pada segmen 1, jumlah luasan sawah yang semakin berkurang digantikan menjadi tegalan dan perkebunan, dan sebagian kecil lagi menjadi permukiman, kondisi sungai yang semakin kritis, erosi tebing, sumber air yang sulit, dan besarnya biaya produksi untuk lahan sawah membuat masyarakat lebih memilih tegalan dan kebun karena lebih mudah perawatannya. Segmen 2 juga mengalami perubahan, berkurangnya lahan

sawah dan kebun yang digantikan dengan tegalan dan permukiman, erosi tebing yang cukup parah pada daerah ini menyebabkan para pemilik lahan memilih menggantikan lahan sawah menjadi tegalan, dan kebun menjadi permukiman.



Gambar 1. Meander berpengaruh terhadap luasan penggunaan lahan pertanian

3. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan lahan pertanian

Hasil uji laboratorium menunjukkan, dari 6 sampel tanah mengindikasikan pH netral-basa, pH netral sangat baik untuk tanaman. Struktur tanah dari sampel-sampel tersebut menunjukkan sebagian besar tanahnya remah, hanya 2 sampel yang struktur tanahnya menggumpal yaitu sampel 3 dan 6 yang merupakan tanah sawah, untuk tekstur tanah pada daerah penelitian dibagi menjadi 4 kategori yaitu lempung berpasir, lempung berdebu, pasir berlempung, dan debu, untuk jenis tanahnya adalah aluvial dan latosol, selain karena perbedaan jenis tanah, perbedaan sifat fisik tanah juga dapat dikarenakan faktor pengolahan oleh petani seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Setyowati, 2007 menunjukkan bahwa penggunaan lahan dapat mempengaruhi sifat fisik tanah, hal tersebut disebabkan oleh akar-akar tanaman dan bagaimana pengolahan lahan seperti pemupukan dan

pemberian mulsa.

Hasil pengolahan citra SRTM dengan *software ArcGis*, menghasilkan peta kemiringan lereng, dari hasil tersebut, daerah Segmen 1 memiliki kemiringan yang lebih beragam, pada daerah ini, lahan pertanian berada pada kemiringan 0-40%, memang sebagian besar berada pada kemiringan 0-2%, akan tetapi ada beberapa daerah yang memiliki kemiringan samapi 40%, tentunya pada segmen 1 petani lebih intensif dalam upaya konservasi lahan baik secara mekanis maupun vegetatif. Daerah segmen 2 memiliki kemiringan lereng antara 0-25%, usaha konservasi pada segmen 2 hanya sebatas memberikan teras sawah atau galangan saja, untuk penggunaan lahan kebun dan tegalan hanya beberapa yang menggunakan gulud, yang lainnya tidak ada upaya untuk melakukan usaha konservasi lahan, selain itu uapaya untuk melindungi tebing sungai juga sangat minim.

Tabel 2. Pengukuran tanah di sekitar meander Sungai Luk ulo, Kabupaten Kebumen

No	Lokasi titik pengamatan		Jenis tanah	Ph tanah	Struktur tanah	Tekstur tanah
	X	Y				
1	352882	9166447	Latosol Coklat Latosol Coklat	7.87	Remah	lempung berpasir
2	353219	9165995	kemerahan Latosol Coklat	7.15	Remah	lempung berdebu
3	353287	9160754	kemerahan	6.93	menggumpal	lempung berdebu
4	352864	9160964	Aluvial kelabu	7.73	Remah	pasir berlempung
5	352672	9159949	Aluvial kelabu	7.82	Remah	pasir berlempung
6	351554	9160030	Aluvial kelabu	7.53	menggumpal	Debu

Sumber: Data Primer, 2016

Setelah dilakukan pengukuran di beberapa titik yang meliputi pengukuran kecepatan aliran sungai dengan rumus *Manning* dan pengukuran arah arus, didapat hasil pada titik 1 erosi lateral dengan arah arus yang berkelok semakin mengikis sebagian badan sungai, hal tersebut membuat pada sisi yang lain terjadi endapan-endapan berupa gosong pasir. Pada titik 2, arus dibagi menjadi 2 bagian sehingga gaya erosi tebing

tidak begitu kuat, tetapi tetap saja erosi yang berjalan pada daerah ini adalah erosi lateral.

Pada Segmen 2 yang meliputi titik 4-6, arus sungai terpusat menjadi satu dan dengan lintasan yang berkelok menyebabkan arus sungai langsung menghantam dinding sungai yang berakibat pada dinamisnya pergerakan kelokan sungai pada Segmen 2, akibatnya banyak timbul gosong-gosong pasir pada tepi kanan dan kiri.

Tabel 3. Hasil pengukuran kecepatan aliran Sungai Luk ulo, Kabupaten Kebumen

No	Lokasi titik pengamatan		Waktu pengukuran	Kecepatan aliran	Tinggi muka air
	X	Y			
1	352882	9166447	24/04/2016, 09.10 WIB	0,669 m/detik	67.9 cm
2	353219	9165995	24/04/2016, 09.50 WIB	0,667 m/detik	34.7 cm
3	353287	9160754	25/04/2016, 08.32 WIB	0,667 m/detik	92.7 cm
4	352864	9160964	25/04/2016, 09.10 WIB	0,914 m/detik	115.7 cm
5	352672	9159949	25/04/2016, 09.53 WIB	1,291 m/detik	158.1 cm
6	351554	9160030	25/04/2016, 10.25 WIB	0,942 m/detik	119.5 cm

Sumber: Data Primer, 2016

4. Upaya Kelestarian Lingkungan Sungai

Hasi penelitian menunjukkan bahwa pada segmen 1, petani yang melakukan upaya melestarikan lingkungan sungai sebesar 53,3%, sedangkan 40% lainnya tidak melakukan upaya tersebut, upaya pelestarian ini sebagai wujud untuk mempertahankan kesuburan dan menghindari lingkungan dari cemaran-cemaran limbah pertanian, sedangkan daerah penelitian segmen 2, masih banyak petani yang tidak melakukan pelestarian lingkungan sungai, petani yang tidak melakukan upaya pelestarian lingkungan sungai sebesar 73,2%, sedangkan 26,7% petani telah melakukan upaya, pada daerah ini upaya yang belum dilakukan adalah penggunaan pestisida, penggunaan mulsa, dan pupuk kimia yang terus menerus, alasan petani menggunakan bahan tersebut karena jika menggunakan bahan organik, hasil panen tidak maksimal dan hama sudah kebal.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diungkapkan beberapa kesimpulan, antara lain : 1). nilai sinus pada setiap segmen berbeda-beda, pada segmen 1 nilai sinusnya 1,70, pada segmen 2, kelokan di Desa Kedungwaru memiliki nilai sinus 1,65, sedangkan pada Desa Seling nilai sinusnya 2,74, dan perubahan pada Meander Sungai Luk Ulo disebabkan beberapa hal yaitu arah arus, litologi, struktur tanah dan eksploitasi bahan tambang yaitu pasir, 2). pola pengelolaan lahan pertanian pada segmen 1 berupa pengelolaan kesuburan tanah yaitu monokultur, sedangkan untuk rotasi

tanaman, petani masih memilih padi-padi-bera, dan untuk padi-padi-palawija mengalami penurunan, untuk intensitas rotasi, petani sebagian besar memilih 2 kali merotasi tanaman mereka. Pengelolaan konservasi lahan para petani memilih teras bangku karena kemiringan lereng yang cukup curam, sedangkan untuk pengelolaan air, pada daerah ini menggunakan sistem irigasi tadah hujan, selama 10 tahun terakhir petani semakin sulit mendapatkan air, 3). pola pengelolaan lahan pertanian pada segmen 2 menunjukkan pola tanam sebagian besar menggunakan monokultur, untuk rotasi tanaman petani memilih padi-padi-bera, dan rotasi padi-padi-palawija mengalami penurunan, untuk konservasi lahan, petani di daerah ini sebagian besar menggunakan teras biasa atau pematang sawah dan tidak menggunakan mulsa, irigasi pada daerah ini adalah irigasi teknis, 4). faktor yang mempengaruhi pengelolaan lahan selain faktor tanah, lereng, dan sungai terdapat pula faktor dari luar yaitu penambangan ilegal, faktor yang paling berpengaruh adalah faktor sungai, yaitu arah arus, kemudian faktor kemiringan yang berbeda-beda, dan faktor tanah yang pada daerah segmen 1 dan 2 hampir sama, yaitu tanah dengan kandungan liat yang tinggi, 5). upaya pelestarian lingkungan sungai pada daerah Segmen 1 sudah banyak dilakukan oleh para petani, sedangkan pada segmen 2 petani belum melakukan upaya pelestarian lingkungan sungai, faktor yang masih belum dilakukan adalah penggunaan pestisida kimia, pupuk kimia yang berlebihan dan tidak adanya tanaman atau sisa-sisa tanaman yang digunakan untuk menutup tanah.

Penulis berharap hasil penelitian yang

dilakukan akan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan informasi mengenai pengelolaan lahan pertanian di sekitar Sungai Luk Ulo Kabupaten Kebumen. Untuk itu penulis memberi saran kepada : 1). masyarakat petani pemilik lahan, masyarakat sebagai pemilik dan pengarap lahan diharapkan lebih memikirkan pengelolaan lahan yang sesuai dan tepat agar kualitas, kesuburan, dan produktivitas lahan tetap terjaga, selain itu kepedulian terhadap kelestarian lingkungan sungai dengan cara bertani yang berkelanjutan agar sumberdaya yang ada tetap terjaga kualitas dan kuantitasnya, 2). perangkat desa dan pihak yang bersangkutan lainnya, sosialisasi mengenai pertanian yang baik dan benar perlu ditingkatkan, dengan tujuan, semua petani mendapat pengetahuan mengenai pertanian baik anggota gapoktan maupun di luar anggota gapoktan. Pelatihan pembuatan pupuk kompos juga dirasa perlu dilakukan, selain itu tindakan tegas untuk penambang ilegal yang merusak lingkungan juga perlu untuk dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nur, A.M. 2009. Sungai Meander Luk Ulo antara Kondisi Ideal dan Kenyataan. *Jurnal Geografi*. Volume 6 No. 2 juli.
- Raharjo P.D. 2010. *Penggunaan Data Penginderaan Jauh dalam Analisis Bentuk Lahan*. Volume 3 Nomor 1.
- Saripin, Ipin. 2003. *Identifikasi Penggunaan Lahan Menggunakan Citra Landsat Thematic Mapper*. Buletin Teknik Pertanian Volume 8 Nomer 2.
- Setyowati, Dewi Liesnoor. 2007. Sifat Fisik Tanah dan Kemampuan Tanah Meresapkan Air Pada Lahan Hutan, Sawah, dan Permukiman. *Jurnal Geografi*. Volume 4 No 2 Juni 2007.
- Setyowati, Dewi Liesnoor. Permodelan Ketersediaan Air untuk Perencanaan Pengendalian Banjir di Sungai Blorong Kabupaten Kendal. *Jurnal Teknik Sipil dan Perencanaan*. Volume 10 No 2 Juli 2008.
- Suharini, Erni dan Abraham Palangan. 2009. *Geomorfologi*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.



PEMBELAJARAN *GROUP INVESTIGATION* UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI KEMERDEKAAN MENGEMUKAKAN PENDAPAT

Sugi, S.Pd., M.Pd.

SMP Negeri 3 Temanggung

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Juni 2015

Disetujui Desember 2015

Dipublikasikan Desember 2015

Keywords :

learning, group investigation and activities of learners.

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui peningkatan hasil belajar materi kemerdekaan mengemukakan pendapat melalui pembelajaran *group investigation* kelas VII A SMP Negeri 3 Temanggung semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. Penelitian di kelas VII A dari 32 peserta didik. Sumber data dari sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data menggunakan teknik tes untuk mengetahui hasil belajar dan non tes berupa lembar observasi untuk mengetahui proses pembelajarannya. Penelitian Tindakan Kelas dilaksanakan dua siklus. Hasil belajar dianalisis menggunakan analisis deskriptif komparatif dilanjutkan refleksi, proses pembelajaran dengan analisis deskriptif kualitatif dilanjutkan refleksi. Dari kondisi awal ke siklus 1 terjadi peningkatan hasil belajar dengan nilai rata-rata dari 69 ke 78 atau meningkat 13,04 persen. Pada siklus dua nilai rata-rata 86 meningkat 24,65 persen dari kondisi awal. Ada peningkatan pada aktivitas peserta didik maupun guru. Disimpulkan bahwa pembelajaran *group investigation* meningkatkan hasil belajar materi kemerdekaan mengemukakan pendapat kelas VII A SMP Negeri 3 Temanggung semester 2 tahun pelajaran 2014/2015.

Abstract

The aim of research to find out the learning outcome of material freedom of expression through the study group investigation A class VII SMP Negeri 3 Temanggung 2nd semester of the school year 2014/2015. Research in class VII A of 32 learners. Sources of data from primary and secondary data sources. Collecting data using test techniques to determine the results of study and observation sheet form non-test to determine the learning process. Class Action Research conducted in two cycles. Learning outcomes were analyzed using descriptive analysis of comparative continued reflection, the learning process with a qualitative descriptive analysis continued reflection. From the initial conditions to the first cycle increased learning outcomes with an average value of 69 to 78, an increase of 13.04 percent. In the two cycle average value 86meningkat 24,65persen of initial conditions. There is an increase in the activity of learners and teachers. Group investigation concluded that the learning materials improve learning outcomes freedom of expression of class VII A SMP Negeri 3 Temanggung 2nd semester of the school year 2014/2015.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
sugi@gmail.com

PENDAHULUAN

SMP Negeri 3 Temanggung di Jalan Jenderal Sudirman 21 Temanggung berada di jantung kota memiliki 18 rombongan belajar dari kelas VII sampai IX. Namun dalam pembelajaran PKn sekolah tersebut masih diwarnai model pembelajaran konvensional yang menekankan metode ceramah, sehingga kurang mampu merangsang peserta didik untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran yang digunakan guru selama ini lebih bersifat *teacher center* dan hanya berlangsung satu arah dari guru ke peserta didik yang berdampak pada kegiatan pembelajaran yang kurang efektif, sehingga dapat mempengaruhi hasil belajar. Keadaan ini terjadi pada peserta didik kelas VII A SMP Negeri 3 Temanggung semester 2 tahun pelajaran 2014/2015. Hasil ulangan harian pertama menunjukkan nilai terendah yang diperoleh peserta didik 50, nilai tertinggi 80, nilai rata-rata 69. Peserta didik yang memiliki nilai dibawah KKM mencapai 59,37 %. KKM mata pelajaran PKn pada sekolah ini adalah 75.

Hamalik (2010:156) menyatakan bahwa memotivasi belajar penting artinya dalam proses belajar peserta didik, karena fungsinya yang mendorong, menggerakkan, dan mengarahkan kegiatan belajar. Peserta didik harus membangun sendiri pengetahuan di dalam benaknya (Trianto 2011:13). Pendapat ini sesuai dengan teori belajar modern yaitu konstruktivisme yang menyatakan bahwa peserta didik harus menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan

tersebut tidak sesuai lagi. Peserta didik akan suka dan termotivasi untuk belajar apabila hal-hal yang dipelajari mengandung makna tertentu baginya. Pembelajaran yang berdasarkan pada suatu teori belajar akan dapat meningkatkan perolehan hasil belajar peserta didik, karena teori belajar pada dasarnya merupakan penjelasan mengenai bagaimana terjadinya belajar atau bagaimana informasi diproses dalam pikiran peserta didik. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan strategi pembelajaran yang dapat mengembangkan aktivitas peserta didik, yang bukan hanya diajak belajar untuk mengetahui tetapi dilibatkan secara aktif untuk dapat menemukan sendiri jawabannya, peserta didik dirangsang untuk aktif bertanya pada teman dan guru atau mencari informasi dari sumber yang lain. Guru dapat merevisi model atau strategi pembelajaran yang dilaksanakan secara sistematis dan menjadikan proses pembelajaran sebagai pengalaman yang bermakna bagi peserta didik (Jihad 2010:5). Untuk mengatasi rendahnya hasil dan aktivitas pembelajaran tersebut peneliti pada kegiatan pembelajaran berikutnya menggunakan pembelajaran *Group Investigation* dengan tujuan meningkatkan hasil dan aktivitas belajar peserta didik. Tindakan yang dilakukan peserta didik adalah melaksanakan pembelajaran *Group Investigation* dilanjutkan diskusi kelompok menyelesaikan tugas.

Group Investigation termasuk tipe pembelajaran kooperatif yang menggunakan kelompok kecil sehingga peserta didik bekerjasama untuk memaksimalkan kegiatan belajarnya sendiri dan juga anggota lain dan mendasarkan suatu ide bahwa peserta didik

bekerja sama dalam belajar kelompok dan sekaligus masing-masing bertanggung jawab pada aktivitas belajar anggota kelompoknya, sehingga seluruh anggota kelompok dapat menguasai materi pelajaran dengan baik. Pembelajaran kooperatif menekankan tugas-tugas yang diberikan guru untuk diselesaikan bersama dengan anggota kelompoknya, sedangkan peran guru hanya sebagai fasilitator dalam membimbing peserta didik menyelesaikan tugas.

Pembelajaran *group investigation* menekankan kegiatan belajar peserta didik untuk mengumpulkan sejumlah data dari berbagai sumber yang ada di lingkungan peserta didik, kemudian setelah memperoleh informasi peserta didik berkumpul lagi untuk melakukan diskusi bersama anggota kelompoknya dan berbagi pendapat maupun pengetahuan mengenai masalah yang dikaji, dan kemudian menganalisis informasi-informasi tersebut sehingga pada akhirnya mencapai kesimpulan. Dalam menyelesaikan tugas kelompok, masing-masing kelompok memiliki cara yang berbeda-beda, selain itu pembelajaran *group investigation* menuntut peserta didik untuk belajar secara mandiri dimana peserta didik membangun dan mengkonstruksi pengetahuan dengan caranya sendiri. Peran guru dalam pembelajaran sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran dan konselor maupun konsultan dalam membantu mencari jalan keluar dari masalah-masalah yang dihadapi peserta didik. Menurut Sharan, dkk. (Trianto, 2010: 80), langkah-langkah pembelajaran *group investigation* meliputi 6 (enam) fase yaitu: a) memilih topik, b) perencanaan kooperatif,

c) implementasi, d) analisis dan sintesis, e) presentasi hasil final dan f) evaluasi.

Pada dasarnya langkah-langkah pembelajaran *group investigation* berkaitan satu sama lain yang masing-masing tahapannya bersifat komplementer dan sistematis, sehingga dengan menerapkan secara kronologis langkah pertama hingga terakhir maka seorang guru akan dengan mudah menerapkan model *pembelajaran group investigation* dalam ruang kelas.

Hasil belajar adalah perubahan tingkah laku peserta didik secara nyata setelah dilakukan proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran (Jihad dkk 2010: 15). Hasil belajar adalah kemampuan-kemampuan yang dimiliki peserta didik setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Menurut Purwanto (2010: 44) hasil belajar adalah perubahan perilaku yang terjadi setelah mengikuti proses belajar mengajar sesuai dengan tujuan pendidikan. Hasil belajar seringkali digunakan sebagai ukuran untuk mengetahui seberapa jauh seseorang menguasai bahan yang diajarkan (Purwanto, 2010: 45). Hasil belajar pada ranah afektif dan psikomotor ada yang tampak pada saat proses belajar mengajar berlangsung dan ada pula yang baru tampak kemudian setelah pengajaran diberikan dalam praktek kehidupannya di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, hasil belajar pada ranah afektif dan psikomotoris sifatnya lebih luas dan lebih sulit dipantau namun memiliki nilai lebih bermakna bagi peserta didik dimana dapat secara langsung mempengaruhi perilaku peserta didik.

Dari berbagai pendapat di atas maka disimpulkan bahwa hasil belajar adalah

perubahan perilaku secara sadar dan menyeluruh yang diperoleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar. Hasil belajar dapat digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan peserta didik dan juga dapat memberikan informasi kepada guru tentang kemajuan peserta didik dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran. Hasil belajar mencakup tiga ranah yaitu kognitif, afektif, dan psikomotor yang saling berhubungan satu sama lain.

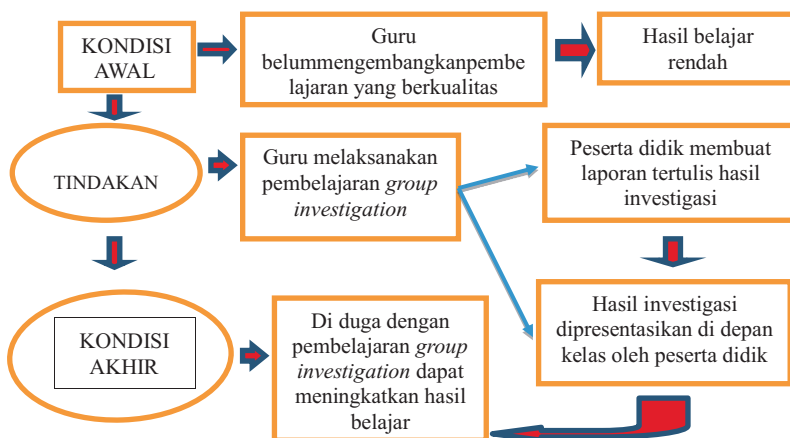
Penelitian ini berupa penerapan pembelajaran *group investigation* yang dikaitkan dengan kemampuan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran PKn tentang “Kemerdekaan mengemukakan pendapat”. Kemudian diwujudkan dengan hasil belajar peserta didik berupa nilai-nilai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran di kelas. Peneliti hanya melakukan penelitian pada ranah kognitif yang didasarkan pada hasil belajar peserta didik karena seseorang yang berubah tingkat kognisinya sebenarnya dalam kadar tertentu telah berubah pula sikap dan perilakunya. Mengacu pada penjelasan-penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa hasil belajar PKn adalah kemampuan-kemampuan yang diperoleh seseorang setelah melakukan kegiatan belajar dimana melalui

kegiatan belajarnya peserta didik dapat memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengkaji masalah-masalah dan bagaimana cara pemecahannya.

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peningkatan hasil belajar dan aktivitas peserta didik pada materi kemerdekaan mengemukakan pendapat melalui pembelajaran *Group Investigation* kelas VII A SMP Negeri 3 Temanggung semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 ?

Tujuan penelitian meningkatkan hasil belajar dan aktivitas peserta didik pada materi kemerdekaan mengemukakan pendapat kelas VII A SMP Negeri 3 Temanggung semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 melalui pembelajaran *Group Investigation*.

Berdasarkan uraian tersebut maka dilaksanakan pembelajaran *group investigation*. Pada siklus 1 dilaksanakan pembelajaran *group investigation* dengan tugas membuat laporan tertulis hasil investigasi. Sedangkan pada siklus 2 dilaksanakan pembelajaran *group investigation* dengan tugas membuat laporan tertulis hasil investigasi untuk dipresentasikan di depan kelas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1 : Skema Kerangka Berpikir

METODE PENELITIAN

Penelitian tindakan kelas dalam 2 siklus dilakukan di kelas VII A dengan peserta didik 32 anak. Analisis data kuantitatif menggunakan analisis deskriptif komparatif, dengan membandingkan nilai tes kondisi awal antar siklus. Penelitian menggunakan model Kemmis & Mc Taggart (Arikunto, 2010) digunakan empat langkah dalam setiap siklus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil belajar kelas VII A SMP Negeri 3 Temanggung semester 2 tahun pelajaran 2014/2015 mata pelajaran PKn rendah yang terlihat pada hasil ulangan harian pertama. Pembelajaran selama ini lebih bersifat *teacher center* dan berlangsung satu arah dari guru ke peserta didik yang berdampak pada kegiatan pembelajaran yang kurang efektif dan mempengaruhi hasil belajar peserta didik.

Pada siklus 1 peneliti merencanakan tindakan meliputi : membuat rancangan program pembelajaran yang terdiri atas 3 pertemuan yakni pertemuan 1 (2 x 45 menit) untuk kegiatan kerja secara kelompok, pertemuan 2 (2 x 45 menit) untuk kegiatan membuat laporan tertulis, pertemuan 3 (2 x 45 menit) untuk kegiatan pembahasan kesimpulan materi pelajaran dan ulangan

harian siklus 1. Rancangan program yang dibuat digunakan untuk pembelajaran 6 x 45 menit meliputi: a) membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP), b) menyiapkan alat pembelajaran, c) menyusun instrumen penilaian dan lembar observasi, d) menentukan tempat atau lokasi melakukan tindakan, e) melakukan evaluasi setelah mendapat tindakan pembelajaran *group investigation* f) membuat langkah-langkah yang disampaikan kepada peserta didik berkaitan dengan kelemahan dan masalah yang dihadapi peserta didik.

Pertemuan pertama tanggal 15 April 2015 jam ke 1-2, dengan langkah-langkah pendahuluan: kelas dipersiapkan agar lebih kondusif, memberi motivasi, menyampaikan kompetensi dasar yang akan dibahas, menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya penyampaian materi-materi esensial oleh guru dan diteruskan dengan pembentukan kelompok diskusi. Pertemuan kedua tanggal 22 April 2015, setelah kelas dipersiapkan agar lebih kondusif dan diberi motivasi, dilanjutkan peserta didik melaksanakan diskusi kelompok dan membuat laporan hasil diskusi. Pertemuan ketiga tanggal 29 April 2015, guru melaksanakan pembahasan secara klasikal pada jam ke-1 yang diakhiri dengan ulangan harian pada jam ke-2. Kegiatan pelaksanaan tindakan seperti Gambar 2.



Gambar 2
Foto kegiatan pembelajaran pada siklus 1

Aktivitas maupun hasil belajar siklus 1 ini lebih baik dibanding dengan kondisi awal. Dilihat dari aktivitas dalam pembelajaran sebagian besar peserta didik memiliki kategori aktif, namun belum

mencapai indikator kinerja, begitu juga hasil belajarnya. Aktivitas peserta didik seperti pada Tabel 2. Sedangkan hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2
Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Siklus 1

No	Predikat	Jumlah Peserta Didik	Persentase
1	Sangat aktif	0	0
2	Aktif	19	59,37
3	Cukup aktif	13	40,63
4	Kurang aktif	0	0

Sumber : Hasil Penelitian 2015

Setiap langkah pembelajaran *group investigation* diikuti peserta didik dengan penuh antusias untuk pembelajaran aktif dan meningkatkan hasil belajar pada siklus

berikutnya, karena persentase peserta didik yang mencapai KKM belum sesuai ketentuan indikator kinerja.

Tabel 3
Nilai Ulangan Harian Siklus 1

No	Uraian	Pencapaian
1	Nilai terendah	70
2	Nilai tertinggi	85
3	Nilai rerata	78
4	Rentang nilai	15
5	Jumlah peserta didik tuntas belajar	20
6	Jumlah peserta didik belum tuntas belajar	12

Hasil refleksi pada tindakan siklus 1 antara lain:
Sumber : Hasil Penelitian 2015

Berdasarkan hasil refleksi di atas maka untuk memperoleh ketuntasan hasil belajar dengan persentase yang lebih baik, dilanjutkan pada siklus 2.

Deskripsi Siklus 2

Pada siklus 2 peneliti merencanakan tindakan meliputi: membuat rancangan program pembelajaran yang terdiri atas 3 pertemuan yakni pertemuan 1 (2 x 45 menit) untuk kegiatan kerja secara kelompok, pertemuan 2 (2 x 45 menit) untuk kegiatan

presentasi, pertemuan 3 (2 x 45 menit) untuk kegiatan pembahasan kesimpulan materi pelajaran dan ulangan harian. Rancangan program yang dibuat digunakan untuk pembelajaran 6 x 45 menit meliputi: a) membuat perencanaan pelaksanaan pembelajaran (RPP), b) menyiapkan alat pembelajaran, c) menyusun instrumen penilaian dan lembar observasi, d) menentukan tempat atau lokasi untuk melakukan tindakan, e) melakukan evaluasi setelah mendapat tindakan pembelajaran

group investigation f) membuat langkah-langkah yang disampaikan kepada peserta didik berkaitan dengan kelemahan dan masalah yang dihadapi peserta didik.

Pertemuan pertama dilaksanakan tanggal 6 Mei 2015 jam ke 1-2, dengan langkah-langkah pendahuluan: kelas dipersiapkan agar lebih kondusif, memberi motivasi, menyampaikan kompetensi dasar yang akan dibahas, menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya penyampaian materi-materi esensial oleh guru dan

diteruskan dengan pembentukan kelompok diskusi. Pertemuan kedua tanggal 12 Mei 2015, setelah kelas dipersiapkan agar lebih kondusif dan diberi motivasi, dilanjutkan dengan peserta didik melaksanakan presentasi hasil diskusi kelompok. Pertemuan ketiga dilaksanakan tanggal 20 Mei 2015, guru melaksanakan pembahasan secara klasikal pada jam ke-1 yang diakhiri ulangan harian pada jam ke-2. Kegiatan pelaksanaan tindakan seperti Gambar 3.



Gambar 3
Foto kegiatan pembelajaran pada siklus 2
Sumber : Data Primer 2015

Aktivitas maupun hasil belajarsiklus 2 lebih baik dibanding siklus 1. Dilihat dari aktivitas pembelajaran sebagian besar peserta didik memiliki kategori aktif dan

sangat aktif, seperti Tabel 4. Sedangkan hasil belajar peserta didik dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 4 Hasil Observasi Aktivitas Peserta Didik Siklus 2

No	Predikat	Jumlah Peserta Didik	Persentase
1	Sangat aktif	0	0
2	Aktif	28	87,50
3	Cukup aktif	4	12,50
4	Kurang aktif	0	0

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Tabel 5 Nilai Ulangan Harian Siklus 2

No	Uraian	Pencapaian
1	Nilai terendah	70
2	Nilai tertinggi	90
3	Nilai rerata	86
4	Rentang nilai	20
5	Jumlah peserta didik tuntas belajar	29
6	Jumlah peserta didik belum tuntas belajar	3

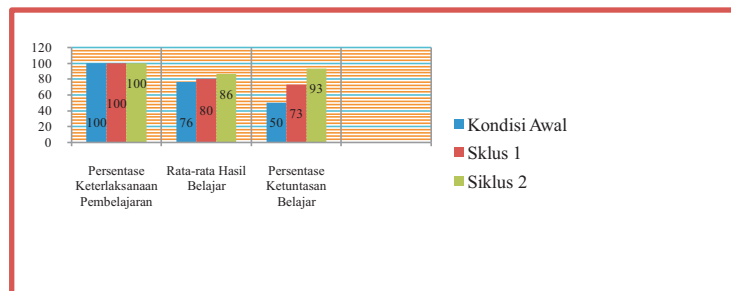
Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Hasil refleksi pada tindakan siklus 2 antara lain:

1. Setiap langkah pembelajaran *group investigation* diikuti peserta didik dengan penuh antusias.
2. Pembelajaran *group investigation* mampu membuat pembelajaran aktif.
3. Aktivitas pembelajaran *group*

investigation dapat meningkatkan hasil belajar.

Dari hasil observasi terhadap proses dan hasil pembelajaran dapat diketahui terjadi peningkatan aktivitas peserta didik dan guru. Begitu pula terjadi peningkatan pada hasil belajar. Seperti terlihat pada Grafik 4.



Grafik 4 Perbandingan Keterlaksanaan Pembelajaran dan Hasil Belajar pada Kondisi Awal, Siklus 1 dan Siklus 2

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Dengan menggunakan pembelajaran *group investigation* dalam pembelajaran PKn ini, hasil belajar peserta didik kelas VII A SMP Negeri 3 Temanggung telah mencapai indikator kinerja yang ditetapkan, yaitu 90 % dari jumlah peserta didik dalam ulangan harian mencapai KKM, serta 85 % dari jumlah peserta didik memiliki aktivitas pembelajaran dengan predikat sangat aktif atau aktif. Pembelajaran telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam RPP. Peserta didik yang ulangan hariannya mencapai KKM pada siklus 1 sejumlah 20 peserta didik atau 62,50 %, siklus 2 sejumlah 29 peserta didik atau 90,63 % yang berarti pada siklus 2 telah mencapai indikator kinerja, sedangkan aktivitas pembelajaran dengan predikat aktif pada siklus 1 sejumlah 19 anak atau

59,37 %, pada siklus 2 sejumlah 26 anak atau 86,67 % memiliki predikat aktif yang berarti telah mencapai indikator kinerja.

Melalui implementasi pembelajaran *group investigation* terbukti dapat meningkatkan hasil belajar. Pembelajaran ini sebagai perwujudan dari teori pembelajaran konstruktivisme yang berpendapat bahwa belajar merupakan proses mandiri peserta didik secara aktif untuk membangun gagasan baru atau konsep baru berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya sekarang, proses belajar harus berbasis paradigma belajar “berpusat pada peserta didik” (*student centered*). Peserta didik menerima materi pelajaran dari berbagai sumber dengan berbagai pengalaman belajar. Peserta didik mencari sumber belajar sendiri dari buku-

buku, koran, majalah, internet, televisi, nara sumber yang diwawancarai maupun melakukan observasi, sehingga pengetahuan peserta didik bertambah banyak dengan kemampuan mengingat lebih lama karena mereka yang mencari sendiri dan mengalami sendiri proses pembelajaran (*learning experience*). Peserta didik belajar melalui pengalamannya sendiri karena mereka terlibat secara langsung dalam masalah yang sedang mereka pelajari sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna (*meaningfull learning*) karena konsep-konsep baru yang mereka temukan dari berbagai informasi tersebut dikaitkan dengan konsep-konsep yang telah ada dalam struktur kognitif peserta didik, dengan demikian peserta didik mengkonstruksi sendiri pengetahuannya melalui pengalamannya.

SIMPULAN

1. Terjadi peningkatan rata-rata hasil belajar, pada kondisi awal nilai rata-rata 69, siklus 1 nilai rata-rata 78 dan siklus 2 nilai rata-rata 86. Ditinjau dari indikator kinerja, kondisi awal 40,63 %, siklus 1 mencapai 62,50 % dan siklus 2 mencapai 90,63 %, yang berarti melampaui indikator kinerja yang ditetapkan.
2. Aktivitas peserta didik dalam pembelajaran mengalami peningkatan dari siklus 1 ke siklus 2, yaitu peserta didik yang memiliki aktivitas pembelajaran aktif atau sangat aktif pada siklus 1 mencapai 59,37 % dan siklus 2 mencapai 86,67 % yang berarti

melampaui indikator kinerja yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamalik, Oemar. 2010. *Perencanaan Pengajaran Berdasarkan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jihad, Asep dan Abdul Haris. 2010. *Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Multi Pressindo.
- Purwanto. 2010. *Instrumen Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Trianto. 2011. *Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.



PENGEMBANGAN PERANGKAT PEMBELAJARAN IPS DENGAN MENGGUNAKAN METODE *BRAINSTORMING* UNTUK MENINGKATKAN BERPIKIR KRITIS DI KELAS V SEKOLAH DASAR

Suhirno, Muhari, Suhanadji

Program Studi Pendidikan Dasar, Program Pascasarjana, Universitas Negeri Surabaya.

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Mei 2016

Disetujui Juni 2016

Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

device learning, brainstorming method, the ability to think critically.

Abstrak

Penelitian pada pengembangan ini bertujuan untuk menghasilkan perangkat pembelajaran yang berupa silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), lembar kegiatan siswa (LKS), buku siswa, dan tes kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPS kelas V semester 2. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui kualitas perangkat pembelajaran ditinjau dari keterlaksanaan pembelajaran saat pembelajaran berlangsung.

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pengembangan yang mengacu pada model 4D, dengan tahapan *Define, Design, Development dan Disseminate*. Subyek penelitian adalah siswa-siswi SD kelas V. Instrumen penelitian terdiri dari lembar penilaian validitas silabus, RPP, LKS, buku siswa, dan tes kemampuan berpikir kritis. Lembar keterlaksanaan pembelajaran untuk mengukur kualitas perangkat pembelajaran yang dilakukan oleh guru.

Hasil penelitian perangkat pembelajaran berupa silabus, RPP, LKS, buku siswa, dan tes kemampuan berpikir kritis pada kelas V semester 2. Berdasarkan hasil penilaian diperoleh (1) silabus yang dikembangkan valid dengan nilai 4,25 dengan kriteria sangat valid. (2) RPP yang dikembangkan valid dengan nilai 4,15 dengan kriteria sangat valid. (3) LKS yang dikembangkan valid dengan nilai 4,4 dengan kriteria sangat valid. (4) Buku siswa yang dikembangkan valid dengan nilai 4,45 dengan kriteria sangat valid. (5) tes kemampuan berpikir kritis yang dikembangkan valid dengan nilai 4,25 dengan kriteria sangat valid. Hasil penelitian keterlaksanaan perangkat pembelajaran dengan total seluruh pertemuan menghasilkan rata-rata = 4,6 dengan kategori baik sekali. Hasil penelitian untuk tes kemampuan berpikir kritis siswa diperoleh presentase ketuntasan prestasi 92,25% dengan nilai rata-rata 78.

Abstract

Research on this development was intended to produce device learning of a syllabus, lesson plans, sheets of students activity, book students, and tests the ability of think critically students on subjects social class grade 5 second semester. The research also aims to know the quality of device learning in terms of implementation learning when learning held.

The kind of research this namely research the development of which reference on the model 4D, with stage define, design, development and disseminate. Subject research is the primary school grade 5. Research instruments composed of sheets assessment validity syllabus, lesson plans,

sheets of students activity, book students, and tests the ability of think critically. Sheets of implementation learning to gauge the quality of the device learning doing by teachers.

The results of research device learning to the syllabus, lesson plans, sheets of student activity, book students, and tests the ability of think critically on grade 5 second semester. Based on the results they actually obtained (1) syllabus developed valid with a value of 4.25 criteria perfectly valid (2) lesson plans developed valid with a value of 4.15 criteria perfectly valid (3) sheets of students activity developed valid with a value of 4.4 criteria perfectly valid (4) books students who developed valid with a value of 4.45 criteria perfectly valid (5) tests the ability of think critically developed valid with a value of 4.25 criteria perfectly valid. The results of research activity of device learning with the total the meeting produce the average 4.6 with good category once. The results of research tests the ability to think critically students obtained the percentage completion of achievement 92,25% the average value of 78.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi

- admin@pasca.unesa.ac.id

- suhirmopgsd@gmail.com.

PENDAHULUAN

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, maka dari itu upaya peningkatan mutu pendidikan menjadi prioritas utama dari program pendidikan nasional pada saat ini.

Pembelajaran tidak terlepas dari perangkat pembelajaran. Perangkat pembelajaran adalah sekumpulan media atau sarana yang digunakan oleh guru dan siswa dalam proses pembelajaran di kelas, serangkaian perangkat pembelajaran yang harus dipersiapkan seorang guru dalam menghadapi pembelajaran di kelas (Suhardi, 2007:24).

Pendidikan IPS sudah lama dikembangkan dan dilaksanakan dalam kurikulum-kurikulum di Indonesia, khususnya pada jenjang pendidikan dasar dijelaskan bahwa: Ilmu Pengetahuan Sosial

(IPS) sebagai salah-satu bidang studi yang memiliki tujuan membekali siswa untuk mengembangkan penalarannya disamping aspek nilai moral, banyak memuat materi sosial yang bersifat hafalan sehingga pengetahuan dan informasi yang diterima siswa sebatas produk hafalan (Winataputra, 2005:9.3).

Metode mengajar merupakan salah satu komponen yang harus ada dalam kegiatan pembelajaran yang sangat menentukan hasil belajar siswa. mencari metode pembelajaran yang efektif yang dapat meningkatkan prestasi belajar siswa dan menghasilkan proses pembelajaran yang bermakna sesuai dengan berbagai literatur yang ditemukan yang berkaitan erat dengan pelaksanaan penelitian ini maka salah-satu caranya dengan menggunakan metode *Brainstorming* atau yang lebih dikenal dengan curah pendapat dalam kegiatan diskusi kelompok kecil. Karena dengan metode *Brainstorming*, anak akan dilibatkan

secara langsung dan mengalami sendiri proses belajar dan anak dapat mencurahkan gagasan-gagasan yang mereka miliki tanpa ada tekanan, sehingga diharapkan anak akan dapat lebih mudah memahami materi yang sedang mereka pelajari. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Roestiyah, (2001:73) *brainstorming* adalah Suatu teknik atau cara mengajar yang dilaksanakan oleh guru dalam kelas dengan melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru, kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat, atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru atau dapat diartikan pula sebagai satu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok manusia dalam waktu yang singkat. Tujuan penggunaan teknik ini ialah untuk menguras habis apa yang dipikirkan para siswa dalam menanggapi masalah yang dilontarkan guru di kelas tersebut.

Berpikir kritis diterapkan siswa untuk belajar memecahkan masalah secara tepat dan memberi gambaran solusi yang tepat dan mendasar (Nurhayati, 2011:67). Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kemampuan berpikir kritis dapat membantu setiap siswa untuk memahami persoalan yang dihadapi dan siswa juga mampu memberikan solusi dengan tepat. Sebagai peserta didik dalam proses pembelajaran, siswa dalam belajar lebih sesuai dengan menggunakan alat peraga agar pemahaman materi lebih berkembang dibandingkan hanya menggunakan metode ceramah atau hanya dengan melihat gambar bentuk geometri di buku.

Hal inilah yang terjadi di kelas V SD Negeri Ungaran 01 dan Ungaran 02. Dimana

guru jarang melibatkan siswa secara langsung dan hanya menggunakan metode ceramah dalam proses pembelajaran. Dengan wawancara kepada kepala sekolah dan wali kelas maka peneliti dapat mengetahui keadaan suasana di kelas, tidak lupa dengan menggunakan uji keterlaksanaan pembelajaran peneliti dapat mengetahui keadaan proses pembelajaran yang sesungguhnya.

Maka dari permasalahan diatas peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya (1) Bagaimanakah validitas perangkat pembelajaran IPS menggunakan metode *brainstorming* di kelas V Sekolah Dasar yang dikembangkan? (2) Bagaimanakah keterlaksanaan perangkat pembelajaran IPS menggunakan metode *brainstorming* di kelas V Sekolah Dasar yang dikembangkan? (3) Apakah perangkat pembelajaran IPS menggunakan metode *brainstorming* dapat meningkatkan berpikir kritis di kelas V Sekolah Dasar?

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menerapkan metode *Brainstorming* pada pelajaran IPS sebagai suatu upaya pengembangan dan peningkatan proses pembelajaran. Secara khusus tujuan penelitian adalah sebagai berikut: (1) Mengetahui validitas perangkat pembelajaran IPS menggunakan metode *brainstorming* di kelas V Sekolah Dasar (2) Mengetahui keterlaksanaan perangkat pembelajaran IPS menggunakan metode *brainstorming* di kelas V Sekolah Dasar (3) Mengetahui peningkatan perangkat pembelajaran IPS menggunakan metode *brainstorming* dalam berpikir kritis di kelas V Sekolah Dasar.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengembangan dalam arti yang sangat umum berarti pertumbuhan, pe-rubahan secara perlahan (evolusi), dan perubahan secara bertahap (Setyosari, 2010). Tumbuh berarti proses itu terus menerus berkembang menuju kesempurnaan, sedangkan berubah adalah menjadi tidak seperti semula, artinya diharapkan dapat berubah menjadi yang lebih baik dan sempurna. Karena pokok bahasan disini adalah pendidikan, maka diharapkan pendidikan akan menuju ideal dan sempurna melalui tahapan-tahapan atau proses tertentu, perlu perencanaan yang matang, manifestasi dari perencanaan tersebut, serta evaluasi dari setiap program yang telah dijalankan. Menurut Seels & Richey (1994), pengembangan berarti sebagai proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fisik, atau dengan ungkapan lain, pengembangan berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran.

Perangkat pembelajaran merupakan suatu perangkat yang dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun perangkat pembelajaran yang berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif (Devi, dkk, 2009:1-5). Perangkat pembelajaran yang diperlukan dalam mengelola proses belajar mengajar dapat berupa: silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), buku siswa, Lembar Kegiatan Siswa (LKS), dan tes kemampuan berpikir kritis.

Menurut Depdiknas (2007:3) Ilmu

Pengetahuan Sosial (IPS) merupakan integrasi dari berbagai cabang ilmu-ilmu sosial seperti: sosiologi, sejarah, geografi, ekonomi, politik, hukum, dan budaya. Ilmu Pengetahuan Sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena sosial yang mewujudkan satu pendekatan interdisipliner dari aspek dan cabang-cabang ilmu-ilmu sosial. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Terpadu merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan membentuk manusia yang demokratis, bertanggung jawab, dan menjadi warga dunia yang cinta damai. Disamping itu, pembelajaran IPS Terpadu juga bertujuan membentuk manusia yang memiliki kompetensi yang mampu bersaing dalam masyarakat yang majemuk di tingkat lokal, nasional dan global.

IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang dikenalkan pada jenjang Sekolah Dasar (SD). Bahan kajian dalam IPS SD diantaranya meliputi keadaan suatu wilayah, perekonomian, dan perkembangan masyarakat Indonesia yang terjadi sejak masa lalu hingga masa kini. Pembelajaran IPS ditekankan pada pendekatan konstruktivistik yang menitik beratkan siswa untuk membangun dan menggali pemahaman mengenai materi yang diajarkan. Selanjutnya Solihatin & Raharjo (2007: 14) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan IPS adalah untuk mempersiapkan siswa menjadi warga Negara yang baik dalam kehidupannya di masyarakat.

Metode *Brainstorming* adalah teknik penyelesaian masalah yang dapat digunakan baik secara individual maupun kelompok. Hal ini mencakup pencatatan gagasan-gagasan yang terjadi spontan dengan cara tidak menghakimi. Dalam curah gagasan

(*Brainstorming*), DePorter (2011:310-313) menyatakan bahwa “terimalah semua gagasan sebagai gagasan yang baik, terlepas dari betapa asing gagasan tersebut tampaknya”.

Sedangkan menurut Dananjaya (2011: 79) curah gagasan atau *Brainstorming* adalah suatu proses diskusi yang diibaratkan sebagai berikut. “Sekelompok orang mengadakan pertemuan untuk membuat patung. Tiap-tiap siswa membawa seongkah tanah liat dan menempatkannya di meja. Tanah liat itu kemudian digabungkan menjadi sebuah bentuk. Lalu patung itu diubah, dibentuk, ditambah dan diubah sampai seluruh kelompok setuju dengan bentuk akhirnya”. Jadi curah gagasan atau *Brainstorming* dirancang untuk mendorong kelompok untuk mengekspresikan berbagai macam ide dan menunda penilaian-penilaian kritis. Setiap orang menawarkan ide yang dicatat, kemudian dikombinasikan dengan berbagai macam ide yang lain. Pada akhirnya kelompok tersebut setuju dengan hasil akhirnya”. Selanjutnya, menurut Sudjana (2010: 74), curah pendapat (*Brainstorming*) adalah “teknik pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok yang pesertadidiknya memiliki latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang berbeda-beda”. Kegiatan ini dilakukan untuk menghimpun gagasan dan pendapat dalam rangka menemukan, memilih, dan menentukan berbagai pernyataan sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kebutuhan belajar, sumber-sumber, hambatan, dan lain sebagainya. Senada dengan itu, menurut Roestiyah (2008: 73) menjelaskan bahwa “Metode *Brainstorming* adalah suatu teknik atau mengajar yang dilaksanakan oleh guru

di dalam kelas yaitu dengan melontarkan suatu masalah ke kelas oleh guru, kemudian siswa menjawab atau menyatakan pendapat, atau komentar sehingga mungkin masalah tersebut berkembang menjadi masalah baru, atau dapat diartikan pula sebagai satu cara untuk mendapatkan banyak ide dari sekelompok sekelompok manusia dalam waktu yang singkat.”

Menurut Roestiyah (2008: 74-75) langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan metode *Brainstorming* yaitu:

- 1) Pemberian informasi dan motivasi
Guru menjelaskan masalah atau topik yang dihadapi beserta latar belakangnya dan mengajak peserta didik aktif untuk menyumbangkan pemikirannya.
- 2) Identifikasi
Pada tahap ini peserta didik diundang untuk memberikan sumbang saran pemikiran sebanyak-banyaknya. Semua saran yang masuk ditampung, ditulis dan tidak dikritik. Pimpinan kelompok dan peserta hanya boleh bertanya untuk meminta penjelasan. Hal ini agar kreativitas peserta didik tidak terhambat.
- 3) Klasifikasi
Semua saran dan masukan peserta ditulis. Langkah selanjutnya mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa berdasarkan struktur atau faktor-faktor lain.
- 4) Verifikasi
Kelompok secara bersama melihat kembali sumbang saran yang telah diklasifikasikan. Setiap sumbang

saran diuji relevansinya dengan permasalahannya. Apabila terdapat sumbang saran yang sama diambil salah satunya dan sumbang saran yang tidak relevan bisa dicoret. Kepada pemberi sumbang saran bisa diminta argumentasinya.

5) Konklusi (Penyepakatan)

Guru/pimpinan kelompok beserta peserta lain mencoba menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang disetujui. Setelah semua puas, maka diambil kesepakatan terakhir cara pemecahan masalah yang dianggap paling tepat.

Menurut Rosyada (2004:170), kemampuan berpikir kritis (*critical thinking*) adalah menghimpun berbagai informasi lalu membuat sebuah kesimpulan evaluatif dari berbagai informasi tersebut. Inti dari kemampuan berpikir kritis adalah aktif mencari berbagai informasi dan sumber, kemudian informasi tersebut dianalisis dengan pengetahuan dasar yang telah dimiliki peserta didik untuk membuat kesimpulan.

Menurut Dike (2010:18-24), kemampuan berpikir kritis terdapat 3 aspek yakni definisi dan klarifikasi masalah, menilai dan mengolah informasi berhubungan dengan masalah, solusi masalah / membuat kesimpulan dan memecahkan. Melalui model ini diharapkan kemampuan berpikir kritis peserta didik dapat meningkat sehingga nantinya peserta didik memiliki keterampilan dan kecakapan dalam hidup. Hasil pengembangan kemampuan berpikir kritis akan meningkatkan peserta didik untuk mampu mengakses informasi dan definisi

masalah berdasarkan fakta dan data akurat. Selain itu, peserta didik juga akan mampu menyusun dan merumuskan pertanyaan secara tepat, berani mengungkapkan ide, gagasan serta menghargai perbedaan pendapat. Melalui berpikir kritis peserta didik akan memiliki kesadaran kognitif sosial dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pengembangan (*Research and Development*). Model pengembangan perangkat pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada jenis pengembangan model 4-D (*four D model*) yang dikemukakan Thiagarajan, Semmel dan Semmel (1974) yang dimodifikasi terdiri dari empat tahap. Keempat tahap tersebut adalah tahap pendefinisian (*define*), tahap perancangan (*design*), tahap pengembangan (*development*) dan tahap penyebaran (*disseminate*).

Desain penelitian ini menggunakan *one-shot case study* yaitu penelitian yang dilakukan dengan melaksanakan satu rancangan perlakuan kepada subyek penelitian yang diikuti dengan pengukuran terhadap akibat dari perlakuan tersebut. Tujuan dari *one-shot case study* untuk menentukan apakah setelah diberikan perlakuan mempunyai efek terhadap hasil belajar siswa. Perlakuan tersebut diukur pada tahap uji lapangan tanpa adanya kelompok pembandingan dan skor tes awal (Emzir, 2010: 96-97).

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah siswa kelas V

dengan jumlah 21 siswa sedangkan yang bertindak sebagai guru dalam penelitian ini adalah Muhamad Ichwan, S.Pd. selaku guru kelas V. Dalam penelitian ini yang menjadi lokasi adalah SD Negeri Ungaran 01 berada di alamat JL.Diponegoro.04Ungaran, Kab. Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Telp.(024)6923101,Kode pos:50511.

Instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Lembar validasi perangkat pembelajaran
2. Lembar keterlaksanaan perangkat pembelajaran
3. Tes kemampuan berpikir kritis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Analisis validitas perangkat pembelajaran

Validitas perangkat pembelajaran meliputi adalah Silabus, RPP, LKS, Buku Siswa dan Tes Kemampuan Berpikir Kritis. Rumus yang digunakan dalam menganalisis data hasil validasi perangkat adalah

- a. Mencari rata-rata aspek

$$RA = \frac{JA}{n}$$

Keterangan:

RA = rata-rata total aspek

JA = jumlah aspek

n = banyak aspek

- b. Mencari rata-rata dari semua validator

$$RSV = \frac{RA}{n}$$

Keterangan:

RSV = rata-rata semua validator

RA = rata-rata total aspek

n = banyaknya validator

- c. Mencari rata-rata total validitas

$$RTV = \frac{RSV}{n}$$

Keterangan :

RTV = rata-rata total validitas

RSV = rata-rata semua validator

n = jumlah rata-rata aspek

Khabibah (2006) mengemukakan untuk menemukan kategori kevalidan suatu perangkat diperoleh dengan mencocokkan rata-rata total dengan kategori kevalidan perangkat pembelajaran menurut Khabibah, sebagai berikut.

Tabel 1. Kriteria Kategori Kevalidan Perangkat Pembelajaran

Interval skor	Kategori kevalidan
$4 \leq RTV \leq 5$	Sangat Valid
$3 \leq RTV < 4$	Valid
$2 \leq RTV < 3$	Kurang Valid
$1 \leq RTV < 2$	Tidak Valid

Keterangan :

- 1) RTV adalah rata-rata total validitas dari hasil ke2 validator terhadap perangkat pembelajaran meliputi adalah Silabus, RPP, LKS, Buku Siswa dan Tes Kemampuan Berpikir Kritis.
- 2) Perangkat dikatakan valid jika interval skor pada semua rata-rata berada pada kategori "valid" atau "sangat valid".

2. Analisis Keterlaksanaan Perangkat Pembelajaran

Untuk mengetahui keterlaksanaan perangkat pembelajaran terdapat 4 kriteria penilaian umum perangkat pembelajaran

dengan kode nilai sebagai berikut.

Tabel 2. Kriteria Penilaian Keterlaksanaan Perangkat Pembelajaran

Interval skor	Kategori kevalidan
$4 \leq k \leq 5$	Baik Sekali
$3 \leq k < 4$	Baik
$2 \leq k < 3$	Cukup
$1 \leq k < 2$	Kurang

Keterangan:

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan adalah Silabus, RPP, LKS, Buku Siswa dan Tes Kemampuan Berpikir Kritis dapat dikatakan terlaksana jika observer menyatakan adalah Silabus, RPP, LKS, Buku Siswa dan Tes Kemampuan Berpikir Kritis tersebut dapat digunakan dilapangan dengan baik maupun sangat baik.

Analisis keterlaksanaan dengan lembar observasi pembelajaran dilakukan dengan menghitung banyaknya observer memilih jawaban 1, 2, 3, dan 4 untuk pernyataan kurang dari sama dengan 1 dan kurang dari 2 adalah "kurang", untuk pernyataan kurang dari sama dengan 2 dan kurang dari 3 adalah "cukup", untuk pernyataan kurang dari sama dengan 3 dan kurang dari 4 adalah "baik", untuk pernyataan kurang dari sama dengan 4 dan kurang dari 5 adalah "baik sekali". Kemudian dilakukan perhitungan terhadap hasil yang diperoleh dengan pedoman perhitungan sebagai berikut.

- a. Mencari hasil tiap pertemuan

$$p = \frac{y}{n}$$

Keterangan:

p = Hasil rata-rata tiap pertemuan

y = Total aspek keterlaksanaan

n = Jumlah butir pernyataan

- b. Mencari rata-rata total keseluruhan pertemuan

$$k = \frac{t}{n}$$

Keterangan:

k = Hasil keterlaksanaan perangkat

t = Total rata-rata pertemuan

n = Jumlah pertemuan

3. Analisis Tes Kemampuan Berpikir Kritis

Besarnya hasil dari kemampuan berpikir kritis siswa yang dilihat dari:

- skor setiap aspek berpikir kritis yang dicapai seluruh siswa dalam soal pilihan ganda, dan
- skor seluruh aspek berpikir kritis yang dicapai tiap siswa dalam soal uraian yang dapat diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut.

$$NP = H1 + H2 \times 2$$

Keterangan:

NP = nilai tes berpikir kritis

H1 = skor pilihan ganda

H2 = skor uraian

2 = bilangan tetap

Untuk mengetahui siswa tuntas dalam tes kemampuan berpikir kritis siswa harus mencapai KKM. Tes kemampuan berpikir kritis siswa dinyatakan berhasil dengan pengembangan perangkat pembelajaran menggunakan metode *brainstorming* jika presentase jumlah siswa dengan nilai yang mencapai KKM, yaitu $70 \geq 80\%$.

Untuk mengetahui presentase siswa yang mencapai KKM dianalisis dengan rumus:

$$P = \frac{N}{S} \times 100\%$$

P = persentase ketuntasan siswa yang lulus KKM

N = jumlah siswa dengan nilai \geq KKM, yaitu 70

S = jumlah siswa keseluruhan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menggunakan pengembangan perangkat pembelajaran dengan model pengembangan 4D yaitu *define, design, development, dan disseminate*. Berikut ini akan dideskripsikan tentang hasil dari penelitian pengembangan tersebut.

1. Deskriptif Tahap Pendefinisian/*define*

Dilakukan identifikasi dan kajian tentang perangkat pembelajaran yang digunakan, perangkat pembelajaran yang dikaji adalah silabus, RPP, LKS, buku siswa.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan didapatkan pendapat bahwa RPP yang digunakan oleh guru sudah memenuhi standar proses, tetapi belum menggunakan metode yang sesuai dengan peneliti. Untuk itu peneliti mengembangkan RPP tersebut agar didapatkan RPP yang valid, memenuhi standar proses dan menggunakan metode *brainstorming*.

Peneliti melakukan pengembangan sumber belajar berupa buku siswa IPS kelas V semester 2 dengan menggunakan metode *brainstorming* pada khususnya materi penjajahan Belanda di Indonesia, pergerakan nasional Indonesia, peranan sumpah pemuda, pendudukan Jepang di Indonesia.

Peneliti juga mengembangkan bahan ajar berupa LKS dengan metode

brainstorming pada materi penjajahan Belanda dan Indonesia, pergerakan nasional Indonesia, peranan sumpah pemuda, pendudukan Jepang di Indonesia untuk kelas V semester 2. Dengan LKS yang dikembangkan, siswa dapat lebih meningkatkan kemampuan berpikir kritis yang mereka miliki.

Pada tahap ini peneliti mengemukakan pendapat bahwa perangkat pembelajaran yang telah dikaji berupa silabus, RPP, LKS, buku siswa dinamakan dengan format awal.

2. Deskriptif Tahap Perancangan/*design*

Berdasarkan kajian pada tahap pendefinisian/*design*, perangkat pembelajaran yang akan dirancang diantaranya Silabus, RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), LKS (Latihan Kegiatan Siswa), buku siswa. Tentunya juga dengan tes kemampuan berpikir kritis semuanya mengacu pada standar proses yang ditetapkan Depdiknas, hanya saja peneliti menambahkan metode *brainstorming*.

3. Deskriptif Tahap Pengembangan/*develop*

Tahap ini difokuskan dalam 2 kegiatan, yaitu memvalidasi perangkat pembelajaran dan mengadakan uji coba lapangan tentang hasil dari perangkat pembelajaran tersebut. Seluruh perangkat pembelajaran divalidasi oleh 2 validator, yaitu validator pertama adalah Kaprodi Pendidikan IPS di Pascasarjana UNESA yaitu bapak Drs. Nasution, M.hum., M.Ed., Ph.D. dan validator kedua adalah Wakaprodi Pendidikan Dasar di Pascasarjana UNESA yaitu bapak Dr. Waspodo Tjipto Subroto, M.Pd. Dengan rata-rata total validitas. Berdasarkan hasil perhitungan dari validasi

ahli dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3. Rata-rata Total Validitas

Validator	Validasi					Jumlah rata-rata aspek	Rata-rata total validitas (RTV)
	Silabus	RPP	LKS	Buku Siswa	Tes Berpikir Kritis		
Rata-rata (RSV)	4,25	4,15	4,4	4,45	4,25	21,5	4,3

Perangkat pembelajaran yang dikembangkan oleh peneliti yaitu Silabus, RPP, LKS, Buku Siswa dan Tes Kemampuan Berpikir Kritis. Lembar keterlaksanaan perangkat pembelajaran meliputi aspek yang dinilai terdiri dari beberapa indikator yaitu sintaks, interaksi sosial, dan prinsip reaksi. Pengukuran aspek keterlaksanaan perangkat pembelajaran langsung oleh observer, tidak lain adalah peneliti yaitu Suhirno. Guru yang melaksanakan pembelajaran pada kelas V semester 2 ini pada mata pelajaran IPS adalah Bapak Muhamad Ichwan, S.Pd. Observer memberikan *check list* pada angka yang sesuai dengan pengamatan. Indikator penilaiannya 5 adalah baik sekali, 4 adalah baik, 3 adalah cukup, 2 adalah kurang, dan 1 adalah kurang sekali. Berdasarkan hasil perhitungan dari hasil keterlaksanaan perangkat pembelajaran dapat dirangkum dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. Rata-rata Total Pertemuan

Pertemuan	Rata-rata Pertemuan
1	4,5
2	4,6
3	4,8
4	4,6
Rata-rata Total Skor	18,5
Rata-rata Skor	4,6
Kategori	Baik Sekali

Pada pertemuan ke-5 adalah tes kemampuan berpikir kritis siswa kelas V yang berjumlah 21 siswa. Komponen berpikir kritis ini menjadi acuan soal dalam melakukan pengujian tes. Komponen tersebut adalah definisi dan klarifikasi masalah, menilai dan mengolah informasi berhubungan dengan masalah, solusi masalah/membuat kesimpulan dan memecahkan. Butir soal yang dibuat oleh peneliti berjumlah 15 soal yang terdiri dari 10 pilihan ganda dan 5 butir soal uraian.

Pada kelas V semester 1 dengan mata pelajaran IPS pada materi sebelumnya tanpa perlakuan peneliti terdapat 4 anak yang tidak tuntas untuk mencapai nilai KKM yang telah ditentukan. Maka hasil persentasenya 90,95%, dengan nilai tertinggi 85, nilai terendah 60, dan nilai rata-rata keseluruhan 74, dapat kita lihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Hasil Rata-rata Nilai Tes Ullangan Materi Sebelumnya

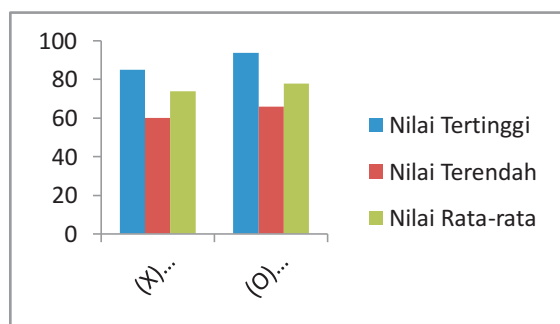
Nilai Tertinggi	85
Nilai Terendah	60
Nilai rata-rata	74
Presentase Ketuntasan	80,95%

Pada kelas V semester 2 dengan mata pelajaran IPS dengan menggunakan metode *brainstorming* terdapat 1 anak yang tidak tuntas untuk mencapai nilai KKM yang telah ditentukan. Maka untuk hasil tes kemampuan berpikir kritis adalah persentasenya 95,23%, dengan nilai tertinggi 94, nilai terendah 66, dan nilai rata-rata keseluruhan 78, dapat kita lihat pada tabel berikut.

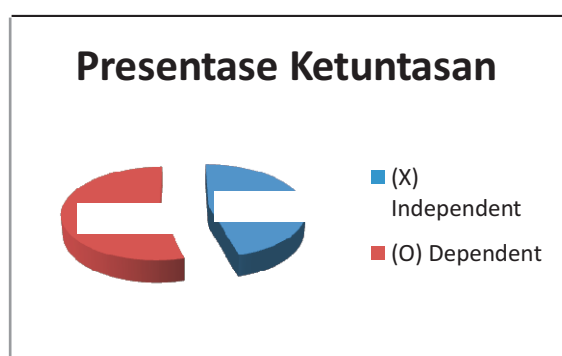
Tabel 6. Hasil Rata-rata Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kritis

Nilai Tertinggi	94
Nilai Terendah	66
Nilai rata-rata	78
Presentase Ketuntasan	95,23 %

Pada hasil simpulan kedua tes diatas secara grafik statistik maka dihasilkkan data pada ketiga gambar berikut ini.



Gambar 1. Hasil Nilai Ulangan Sebelumnya dan Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kritis



Gambar 2. Presentase Nilai Ulangan Sebelumnya dan Nilai Tes Kemampuan Berpikir Kritis

4. Deskriptif Tahap penyebaran/ *disseminate*

Kegiatan yang dilakukan dalam tahap penyebaran adalah peneliti menyebarkan hasil dari pengembangan perangkat pembelajaran hanya di lingkungan SD Negeri Ungaran 01. Penyebaran tersebut dilakukan dengan cara mempresentasikan

hasil dari pengembangan perangkat pembelajaran yang meliputi silabus, RPP, LKS, *buku siswa* dan *tes kemampuan berpikir kritis* pada saat seluruh guru mengadakan rapat bersama dengan ibu kepala sekolah. Tetapi, dalam penyebaran tersebut belum dapat dilaksanakan oleh peneliti karena keterbatasan waktu dan dana.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut.

1. Perangkat pembelajaran IPS kelas V Sekolah Dasar menggunakan metode *brainstorming* yang dikembangkan telah layak digunakan atau kategori sangat valid.
2. Keterlaksanaan perangkat pembelajaran IPS kelas V Sekolah Dasar menggunakan metode *brainstorming* mendapatkan kategori baik sekali dari observer.
3. Tes kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPS kelas V Sekolah Dasar menggunakan metode *brainstorming* dapat disimpulkan tuntas dan meningkat.

Saran

Pengembangan perangkat pembelajaran dengan menggunakan metode *brainstorming* dapat dijadikan sebagai perangkat untuk melaksanakan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa karena hasil dari pengembangan tersebut akan sangat berguna dalam segi

dunia pendidikan dan dapat sebagai acuan perangkat pembelajaran di sekolah yang bersangkutan.

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan perangkat pembelajaran sehingga menghasilkan perangkat pembelajaran yang dapat dijadikan alternative dalam pelaksanaan pembelajaran, maka dari itu bagi pembaca yang tertarik pada penelitian ini dapat mengembangkan perangkat yang lebih baik dengan metode *brainstorming* pada materi yang lain dan dilakukan penyebaran dengan diujicobakan pada beberapa sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Dananjaya, U. (2011). *Media Pembelajaran Aktif*. Bandung: PT. Nuansa.
- Depdiknas. (2008). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Dikmenum Depdiknas.
- Deporter, B. (2011). *The 7 Biggest Teen Problem and How To Turn Them Into Strengths*. (T. Edriani Azwardi, Ed.) Bandung: Kaifa.
- Devi, P. K., & dkk. (2009). *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Untuk Guru SMP*. Jakarta: PPPPTK IPA.
- Dike, D. (2010). Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa dengan Modal TASC (Thinking Actively in a Social Context) pada Pembelajaran IPS. 15-29.
- Emzir. (2001). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Khabibah, S. (2006). *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Matematika Dengan Soal Terbuka Untuk Meningkatkan Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar*. 90.
- Nurhayati, E. (2011). *Psikologi Pendidikan Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Roestiyah, N. K. (2008). *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rosyada, D. (2004, November 15). *Paradigma Pendidikan Demokratis Sebuah Modal Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media.
- Seels, B. B., & Richey, R. C. (1994). *Teknologi Pembelajaran: Definisi dan Kawasannya*. (D. S. Prawiradilaga, & dkk., Trans.) Jakarta: Kerjasama IPTPI LPTK UNJ.
- Setyosari, P. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Pengembangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Solihatin, E., & Raharjo. (2007). *Cooperative Learning Analisis Model Pembelajaran IPS*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sudjana, N. (2010). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Suhardi. (2007). *Hakikat Belajar*. Jakarta: Depdibud.
- Thiagarajan, S. S., & Semmel, M. I. (1974). *Instructional development for Training Teachers of Exceptional Children Indiana*. Indiana: Indiana University Bloomington.
- Winataputra, U. S. (2005). *Pendekatan Ekspositoris*. Jakarta: Universitas Terbuka.

EXISTENCE IN THE VILLAGE LANTING HOUSE CAPE COMMERCIAL DISTRICT NANGGA PINOH MELAWI WEST KALIMANTAN

Mardiana dan Emi Tipuk Lestari

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Mei 2016

Disetujui Juni 2016

Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

lanting home

Abstract

Lanting house is a house that floats on water, because it is supported by bonding bamboo or timber as a buffer. This study aimed to analyze the environmental, social, and educational aspects of the residential house on the outskirts of the river Melawi Lanting, particularly in the village of Tanjung Niaga District of Nanga Pinoh Melawi District, West Kalimantan. This study uses a qualitative method. This research is a qualitative descriptive study. Subjects in this study is the owner of the house in the village of Tanjung Niaga lanting District of Nanga Pinoh Melawi District, West Kalimantan. Data collection techniques used were observation, interviews, and documentation. Examination of the validity of the data were cross-checked, while the use of data analysis techniques for interactive analysis. Results of research have shown some important conclusions include A) Environmental Aspects seen from lanting building forms a uniform look with gable roof and rectangular shape of the building. B) The social aspect, some of life's problems at home lanting include. C) Aspects of education at home lanting the form of life skills.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi
mardianaleona@gmail.com

INTRODUCTION

West Kalimantan is a province on Borneo island, the western part bordering the South China Sea, the eastern borders with East Kalimantan, bordering the southeastern part of Central Kalimantan, north bordering

Sarawak (East Malaysia), the southern part of Java Sea. Melawi including one of the existing areas of West Kalimantan. Melawi drained by two major rivers namely river Melawi (600 km) and the river Pinoh with the widest span of about 250 m and a depth of 12-16 m.

Lanting house is a house that floats above the water, because it is supported by bonding bamboo or timber as a buffer. Lanting house tied to a tree or post, using a rope made of twisted steel. Veranda overlooking the river front and the rear facing the mainland, a distance of about 5 m, meaning afloat when the water recedes (Zaini, 2008). When you hear the word Lanting House, many thought the house belonged to the tribe lanting only Banjar in South Kalimantan. Whereas in other areas such as in Palembang (South Sumatra) also has a traditional raft house with the name Rakit. Lanting home in West Kalimantan until now can still be found in the city of Sambas (Sambas District), City Putusibau (Kapuas Hulu), and in the City of Nanga Pinoh Melawi.

Lanting house is a product of the architecture of the local community and culture of the river is typically regarded as the forerunner of settlements in the region. According Allsoop and Papanek in Khaliesh et al (2012: 69) that settlement is known as the architectural vernacular that is generally interpreted to build derived from the architecture rakyat, something anonymous, are customs, naive, primitive, which grows spontaneously and architecture based on local folk culture. According to Bronson in Khaliesh et al (2012: 69) Such settlements arise spontaneously as a result of urban development that focuses on dendritic system which is a system that utilizes trade settlement from upstream to downstream. The trade center is located at the downstream commodity and materials derived from residential communities in the interior. This study focuses on the analysis and

interpretation of environmental, social, and educational aspects of the residential house on the outskirts of the river Melawi Lanting, particularly in the village of Tanjung Niaga, Nanga Laja village, and the village of Paal Nanga Nanga Pinoh Pinoh Melawi subdistrict, West Kalimantan.

METHOD

This research is descriptive qualitative, because intends to describe, uncover, and explained about the house lanting seen from environmental, social and educational. Similarly named descriptive study, because it aims to create a picture of the situation or event (Moh. Nazir, 2005: 55). Moreover, the purpose of description is to help the reader know what is happening in the environment under observation, such as what a view on the participation in the research background, and what kind of activity that occurs in the setting (Emzir, 2008: 175).

In a descriptive study, researchers work not only provides a description of phenomena, but also explain the relationship, test hypotheses, make predication, as well as the meaning and implications of a problem to be solved. The study also called qualitative research, because this research is to use and understand the phenomena that occur around the house lanting.

The subjects were the village head, the homeowner lanting and living at home in the village of Tanjung Niaga Lanting District of Nanga Pinoh Melawi District, West Kalimantan. Data collection techniques used in this study is, Focus Group Discussion (FGD), observations (observation), interviews, and documentation. FGD is a

technique that is effective and efficient way to collect the data of a study.

Observations directed to focus on specific types of activities and events that provide information and views are really useful (Moleong, 2002: 128). Observations conducted by researchers observed their own look and associated activities at home Lanting. Wawancara done by asking open-ended questions that allow respondents to answer broadly. Questions directed to the disclosure of respondent's life, concepts, perceptions, roles, activities and events experienced with respect to the focus of the study (Nana Syaodah Sukmadinata, 2009: 112). This interview was conducted to the village head, the homeowner lanting and living at home in the village of Tanjung Niaga Lanting District of Nanga Pinoh Melawi District, West Kalimantan. Documentation used to obtain data about the picture where the object under study, as well as to complete the data obtained from observations, FGD, dan wawancara. Documents in this study a written information with respect to matters relating to the activities in the lanting house.

To obtain data that can be justified scientifically, then the data that has been collected in advance checked its validity. In this study, data validity checking technique used is the technique of cross-checking, which is a technique of crossing information obtained from sources so that in the end only the valid data are used to achieve the results. Data analysis techniques used in this study is inductive analysis techniques, the analysis revealed from data and boils down to general conclusions. The general conclusion that can be either categorization or propositions (Burhan Bungin, 2001: 209).

RESULTS AND DISCUSSION

Melawi down along the river, we were treated to a rubber plantation in the left and right of the river, the number of illegal (Gold Mining Without Permission), and we will also witness the many buildings over the water that is used locals as a place to sell and where to stay. They named Lanting and those who live like this the building there some people who called as Human Lanting. Actually, the people who dwell above lanting not only people living in the interior, but along the Kapuas river, river Melawi and children. In the context of this study mainly discussing those little inland to distinguish, because they were using as a residence lanting actually is a class of people whose economy affluent. To build a lanting as a residence requires funds that are quite expensive, could reach hundreds of millions of rupiah.

The origin of the house lanting is one type of traditional houses in South Kalimantan. According to the board of the Islamic Centre of Historical and Cultural Affairs Banjar, Banjar civilization comes from the river and lanting, where home lanting been there before other Banjar traditional house. In the 18th century until the 19th century, and the waters in Banjarmasin in South Kalimantan in general are still lots filled with floating houses supported by wooden beams intact. Structuring lanting lined raises admiration of migrants and enter in the news the Ming Dynasty in China in 1618 which states in Banjarmasin houses are built on rafts like those in Palembang (Rahman, 2014: 222).

Lanting house also found in West

Kalimantan, especially in Melawi, this house is the main type of floating houses made of wood and the bottom using the trunks of timber or drum as a foundation to float this house. The existence of the house lanting be one proof of human attitude towards environmental conditions. People's lives on the banks Pinoh very close to the river, various activities of daily community activities utilizing their existing river. Normally the people who live along the river, they take advantage of the natural boon for the purposes of everyday life. River for them is the best friend and the source of life that gives different shades of life, such as: fishing, forest products, transportation trade between cities, between villages, and so forth. The river is the lifeblood of the community in the hinterland of West Kalimantan due to being a liaison between area facilities. The river is also a source of inspiration for artists to create movement and songs such as: songs Sambas river, the Kapuas River Musi river, the river Melawi, and the like (Mustansyr, tt: 263).

Home life lanting the same as the house stands on land or on land, greeting each other and interact with each other only a yard to play who do not have, so if you want to play their children only at school and distance between home lanting one another within about 2 meters. Meanwhile, for the purposes of toilets they use water flowing in rivers except for a drink they buy clean water, we know that the river water is already polluted with sewage gold miners, just imagine those who use the river water every day that will impact the health of skin .

Lanting house than as a place to stay as well as a place to earn a living that is selling.

Most people who live in the house lanting riparian this Melawi they contracted, while the original owners lived on land. They are contracted in the home lanting work as labors bear no goods, traders, motorcycle taxi, and there being the fishery to be miners passengers wishing to cross. His wife and children there is to be a housewife and there are selling cakes, vegetables and laundry workers. Those who stay at home lanting not only original but there are Dayak ethnic Chinese, those with homes lanting generally are those that have bercukupan economy contracted while they are economically weak as to make the house lanting entail huge costs.

The results of the dialogue conducted informant (Lusiana Pista) with local residents about licensing home lanting they do not know because they just signed and according to them to make the home lanting not everyone can make it because there must be permission from the village chief and devices, and permits to landowners which put lanting home. The results of observations, it seems the government has not intervened to curb the preparation (layout) lanting house so well ordered.

1. Analysis of Rumah Lanting Suburbs Melawi River in terms of Environmental Aspects

Settlement is an environment that is formed by the relationship between elements of natural and artificial elements. Settlement as a form of environmental binaan has a close connection with the setting or the hue of human behavior and the social environment prevailing. According Doxiadis in Khaliesh et al (2012: 70), the formation of a settlement

is influenced by several factors which as a whole can be seen elements ekistiknya that man, society, network, and natural shell. To define the characteristics of the neighborhoods on the outskirts of the river Lanting House Melawi, the authors apply the five elements ekistik Doxiadis to analyze and interpretation of environmental, social, and educational aspects.

a. Building Forms

Lanting building forms a uniform look with a gable roof and rectangular shape of the building. The shape of the building looks simple, no-frills, according to the theory of building characteristics on the banks of the river that uses its structure and traditional construction. There are two openings oriented toward the river and the mainland. This is because of the history of the house lanting make the river as the main orientation before their road.

There is a courtyard / patio on the building lanting on the front, side and rear. On the front porch oriented to the river that serves as the dock and entrance accessible via the river. The terrace at the back of the land and be oriented to the entrance accessible by land, while the side of the porch serves as a circulation path that connects the mainland and the river that aims to make people who want to go to the river can be through the side of the porch. At each building lanting house on the outskirts of the river there Melawi footbridge made of wood or bamboo and serves as a bridge connecting the house and land lanting

b. Building Types and Functions (Lanting)

People in the riverside Melawi know some kind lanting. First, Lanting Latrine,

which is a small house on the water used for bathing, washing, and toilet (MCK). Lanting type is usually simpler and became the common property of several families, so that the manufacture and the treatment was carried out together. Secondly, ie Lanting House residence of a family or a couple of people who dwell and undertaking as befits our family lives on or in it. Lanting's house there are several booths such as the kitchen, bedroom, and living room. Yet simpler just to have a kitchen and a living room cum bedroom and work space. Third, the type used lanting dock water bike, canoe and motor vehicle fuel depots. Fourth, the type lanting used to sell goods of daily needs, coffee shops, food stalls, where a relaxing residents and others.

So in general, the type of house lanting can be distinguished by its function. Namely lanting with single occupancy function and lanting with commercial functions. In lanting with residential and business functions, the front lanting made open as an area for businesses, while at lanting with single occupancy function, the shape of the building be closed even seem massive. The main function lanting-lanting used to place to sell, this is because the water transport is still very dominant in the upstream region. By selling at Lanting, who stopped on the way consumers can be directly serviced and consumers themselves do not bother to move up the mainland to buy the necessary requirements.

c. Settlement characters Lanting Suburbs Pinoh River

Based on the pattern of housing delivery / settlement, an outline of riverside settlements lanting Pinoh included in the

category of housing by people, namely the provision of housing for the community done by the people individually or in groups. Based on the characteristics, lanting riverside settlements Pinoh belonging building typologies that use conventional structures and traditional construction with wood materials and a simple structure.

d. Regulation No. 38 of 2011.

Associated with government regulation No. 38 Year 2011 on the river, where lanting house on the outskirts of watersheds (DAS) Pinoh river seyogiyanya refer to these regulations, especially related to the demarcation line of the river. However, the trouble with most homes built before the lanting these rules are made and enforced.

2. Analysis of Rumah Lanting Suburbs Melawi River in terms of the Social Aspects

Community Melawi especially those living on the riverside Pinoh have a culture of the river is strong, where the river plays an important role in their lives everyday, such as the main transport route public, especially before their land transportation, the river as a place of economic activities, the river as a place MCK society, and the river as a place of interaction between communities. Therefore, Lanting House serves as a communication gateway to the outside community.

a. Value - Value is important in house Lanting

The existence of the house lanting in Melawi have important values contained therein in accordance with the purpose of preservation of the value of architecture and science, historical value, as well as social and

cultural values. Messages from the house where lanting very clear, that teaches us to always read and friendly to nature. If we are good in nature then nature will guarantee the life of mankind. But if we meet with evil nature, for example by damaging nature, then alam pun will destroy mankind. Let us learn to read nature as has been done by our ancestors.

b. Problem and Local Constraint Life Residents Lanting

Life at home lanting course different from the usual home on land. Some of life's problems at home lanting include: First, the limitations of space make the occupants lanting area or space functioning as efficiently as possible, so that it seems chaotic - for example, a family room, living room, den into one. Second, the absence of grounds to make the inhabitants of what was lanting functioning optimally. For example, hanging laundry on the outskirts lanting wall, throw (trash) directly into the river. Third, the ebb and flow of river water affects the rhythm of life of the citizens lanting, so they should not be careless / negligent, such as loosening and tightening rope lanting house that is not skewed. Fourth, kekurangnyamanan caused wave disturbances due to last lalangnya water motor, speed-boat, and the like are inevitable. Fifth, water transport such as canoes, water motor requires special skill that contain risks such as sinks, leaking, and others.

Meanwhile, local residents life lanting constraint is: First, the habit of throwing garbage in the river is something that is inevitable, due to lack of land to cultivate or burning trash. However, because of their simple lifestyle, then the garbage they have also simple. In the days before the use of plastic as a packing material, they more use

banana leaves as wrappers, so that waste more easily destroyed. When times changed to plastic as a packing material, the plastic waste floating and pollute rivers. Second, using the river water is not hygienic for bathing, washing and even perhaps drink. Residents lanting still functioning river water for daily activities such as bathing, washing, cooking - although to cook them more use of rainwater collected in water tanks, or buy clean water. Bad habits they knew, but they had no choice such as digging wells, installing plumbing, because of limited land and costs. Therefore, skin diseases and diarrhea are often attacked occupants lanting. Third, formed by the passive mental state of the natural environment to make citizens lanting undergo routine life for generations, so it is not responsive to the growing problem. Creativity to enable the water to generate electricity generator has not been done. Making the kind of cages to keep the fish is also not much done, but allowing nature to do so. Pinoh on the riverside there are some people who make cages for raising certain types of fish such as tilapia, and catfish.

Establishment of a beautiful environment with vertikultur system to meet the needs of vegetables has not been made public, although it is possible. Vertikultur derived from the word 'vertical' and 'culture' which means the cultivation or farming system in increments. Fourth, as a hard worker lanting many residents who work as traders, collecting materials, processing of raw materials spend much time at work, so they have little spare time that is used as a rest period. This means that the time and energy they spent, making it difficult to

develop thinking about other aspects of life.

c. **Local Wisdom Residents Lanting**

Every problem facing human life will bring up the reaction. A positive reaction would give birth to wisdom (wisdom) as an attempt to respond and find solutions. Some form of local wisdom lanting residents include: First, the potential posed by the physical state in the form of life on the river making small children have swimming skills. Swimming is a daily activity, not just to clean the body, but also as a playground which in turn will bring a variety of water-related games. For example, canoe races are held on certain major (Independence Day, Eid). This kind of wisdom is intangible, ie proficiency established with the citizens, so it belongs to the typical. The game is a human instinct that is often dubbed as homo ludens. According to Johan Huizinga, that human culture that originally appeared in the form of a game. Man who play (homo ludens) is the source of civilization (Mustansyir, tt: 264). Second, the use of (garbage) in the form of driftwood to be used as fuel, to improve lanting. Third, hunch or signs of nature there are routine and some that are insidental. Hunch over the natural signs such routine and low-tide is something that is understood as a cycle of river water by residents lanting. Hunch over natural insidental mark in the form of hurricanes, lightning generally more difficult to predict. Sensitivity to the signs of nature formed of habit lanting citizens in the face of river behavior which became the scene of their everyday life, as well as a fisherman who knows the position of the direction, hunters who know the trail prey animals, farmers who recognize the growing season, and so forth.

3. Analysis of Rumah Lanting Suburbs Pinoh River viewed from Aspect Education

a. Education Kecakan Life

In accordance or harmony with the local wisdom (local genius) and problems as well as local residents constraint lanting Pinoh river, then the concept of education that try to offer and deemed suitable are life skills (life skills), especially for the younger generation of them. Life skills education, among others: (1). Training the creation and management of cages: the potential for increased nutritional value and economic value; (2). Training use of waste: handicrafts and potential economic value; (3). Training vertikultur horticultural crops: the potential of the beautiful environment and the availability of vegetables; (4). Healthy life extension (hygienic): avoid skin diseases and diarrhea; (5). Training of water sports: potential into swimmer, rower both at district, provincial and national levels; (6). Training utilization of river water: the potential for power generation (generator, waterwheel).

The skills training model considered important and urgent to further optimize natural resources and human resources in the riverside settlements lanting Pinoh. Especially for those who are in the economic structure of the lower middle class. This training model can be done by the District Government Melawi (relevant agencies), social organizations, NGOs, political parties (related divisions), the central government, the business community (industry) and even foreign donors. With the provision of education (formal and informal) that is sufficient for the younger generation, it is

expected that the population cycle of poverty can be eliminated or cut, so that the community can enjoy the river pinggirian economic welfare and able to access other areas.

b. Conservation Measures

The conservation measures related to do physical building lanting is through reconstruction, ie by rebuilding homes that have been damaged lanting and replace building materials at the same time strengthening the structure is weakened or damaged. Consolidation, conducted aims to strengthen and reinforce the structure of the building that has been weakened or damaged.

This step can be done by changing the structure of the building to maintain and improve the quality of the building structure. Revitalization by developing lanting houses, one of which optimize the function lanting home as a tourist attraction and local government Melawi (relevant agencies) need to plan or will make the house lanting as Urban Heritage Tourism for the City Melawi.

CONCLUSION

Local wisdom citizens lanting there is an intangible form of proficiency established with the residents, such as swimming, rowing, use of waste in the form of driftwood for use as fuel and improve lanting, sensitivity to signs of nature formed the habit of citizens lanting in the face of behavior river that became the scene of their day-to-day. Barriers lanting local residents in the form of a habit of throwing garbage in the river, use the water that is not hygienic, inability to take advantage of the natural surroundings to increase income and life. Lanting house is the

result of the attitude of society towards environmental conditions which is dominated by the presence of the river. Lanting house is a symbol of community life Pinoh river to alleviate the problems of life through the work they do to improve life for the better through their own profession.

BIBLIOGRAPHY

- Burhan Bungin, (2001), *Metode Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Varian Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Emzir, (2008), *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Khaliesh, Hamdil, dkk., 2012. *Karakteristik Permukiman Tepian Sungai Kampung Beting di Pontianak*, Prosiding Temu Ilmiah IPLBI 2012.
- Lexy J. Moleong, (2002), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosdakarya.
- Mustansyir, Rizal, tt. *Kearifan dan Kendala Lokal Warga Lanting Sebagai Penghuni Pinggiran Sungai Sambas di Kalimantan Barat*, Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization".
- Mohammad Nazir, (2005), *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nana Syaodah Sukmadinata, (2009), *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Rosdakarya.
- Rahman, M. Aulia Ur., 2014. *Pelestarian Rumah Lanting Berlandaskan Budaya Sungai Masyarakat Kota Banjarmasin*, E-Journal Graduate Unpar Part D – Architecture, Vol. 1, No.2 (2014) ISSN: 2355-4274
- Zaini, Muhammad. 2008. *Upaya Mengenalkan Model Rumah Lanting yang Ramah Lingkungan Untuk Mengurangi Laju Abrasi Sungai Martapura Dalam Wilayah Kota Banjarmasin*, Jurnal Ilmiah Kependidikan dan Kemasyarakatan. Vol 3. No.1, 2008.



PEMENUHAN KEBUTUHAN JENDER DAN PENGURANGAN KEMISKINAN: STUDI KASUS DALAM PEMERINTAHAN DESA

Tiyas Nur Haryani, Azyani, Puput

Jurusan Administrasi Umum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sebelas Maret, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima Mei 2016

Disetujui Juni 2016

Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

*Poverty Reduction, Moser Analysis,
Gender Needs*

Abstrak

Pembangunan di Indonesia terus ditingkatkan untuk mengurangi kesenjangan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Celah antara desa dan kota membuat urbanisasi karena terbukanya lapangan kerja dan fasilitas umum di kota. Perkembangan ini harus mencerminkan keadilan bagi semua orang; Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pedesaan dan pengarusutamaan gender. Peluang dan kekuatan pembangunan bagi desa-desa di Indonesia diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6/2014 tentang Pemerintahan Desa. Artikel ini akan membahas kebutuhan pemenuhan kebutuhan gender dalam pengentasan kemiskinan di sebuah desa. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan analisis dokumen. Penelitian ini memilih Desa Nglorog di Sragen sebagai subjek karena status desa itu sendiri di Sragen yang tergolong dalam daerah miskin kemiskinan. Kemiskinan di Sragen tercatat 14,87%, lebih tinggi dari tingkat kemiskinan di provinsi Jawa Tengah (13,58%) dan lebih tinggi dari rata-rata tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 10,96%. Temuan menunjukkan bahwa kualitas kesetaraan jender dalam pengurangan kemiskinan dalam peraturan perencanaan desa Nglorog berada pada tingkat netral gender dan program pengentasan kemiskinan hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan gender praktis bagi perempuan dan elemen marjinal masyarakat.

Abstract

Development in Indonesia continues to be improved to reduce the gap between rural and urban areas. Gap between villages and cities make the urbanization because the opening of full employment and public facilities in the city. These development must reflect justice for all people; things that need to be considered in rural development and gender mainstreaming. Opportunities and strength of development for villages in Indonesia reinforced by the Government Regulation Number 6/2014 on Village Governance. This article will discuss gender fulfillment needs in poverty reduction on a village. The research was conducted with qualitative research method with document analysis. This research chose Nglorog Village in Sragen as the subject due to the status of the village itself in Sragen which classified into the red area of poverty. Poverty in Sragen recorded 14,87%, higher than the poverty rate in the province of Central Java (13.58%) and higher than the average Indonesian poverty rate of 10.96%. The findings show that the quality of gender equality in the poverty reduction

* Alamat korespondensi
- tiyasnur@gmail.com
- azyanizuda@gmail.com

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan sampai dengan saat ini masih menjadi isu strategis baik di tingkat Internasional hingga daerah. Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai kelanjutan dari Millenium Development Goals (MDGs) tetap mengintegrasikan isu penurunan kemiskinan dunia. Pemerintah Indonesia juga telah memformulasikan kebijakan penanggulangan kemiskinan baik di tingkat pusat dan daerah telah diformulasikan antara lain; Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai mandat untuk memajukan kesejahteraan umum, Nawacita Presiden Joko Widodo berkomitmen dalam meningkatkan kualitas hidup rakyat dan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Namun, masalah kemiskinan masih menjadi isu hangat di permukaan publik sampai dengan saat ini.

Kemiskinan di Indonesia sampai dengan Maret 2015 masih tercatat terdapat 11,22% penduduk miskin dari jumlah seluruh penduduk Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2015). Angka tersebut mengalami kenaikan dibanding semester sebelumnya September 2014 sebesar 10,96% (Badan Pusat Statistik, 2014). Menurut Darwin (2005) kemiskinan menjadi konsep yang abstrak tergantung pada pengalaman,

perspektif, sudut pandang dan ideologi setiap individu. Kemiskinan dapat menjadi persoalan semua pihak baik laki-laki maupun perempuan, lansia maupun anak-anak dalam keluarga, masyarakat desa dan kota serta disabilitas. Oleh karena itu, ketika berbicara kemiskinan tentu akan menyoal aspek gender di dalamnya. Pada praktiknya dalam kehidupan sehari-hari laki-laki dan perempuan mempunyai peran, tanggungjawab, akses, kontrol, kebutuhan dan prioritas yang berbeda dalam rumah tangga, masyarakat dan pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan politik. Hal tersebut menyebabkan kemiskinan yang dialami oleh laki-laki dan perempuan berbeda.

Wilayah geografis dan administrasi turut memberikan kontribusi berbeda dalam pembangunan dan pemerataan kesejahteraan. Desa yang seringkali masih diidentikkan memiliki kondisi yang tertinggal dari kota dalam hal modernisasi, sehingga kondisi perempuan di desa dan perempuan di kota akan mengalami perbedaan tingkat kesejahteraan. Menurut kajian yang telah dilakukan Sudarno dan Suraji (2010) 70% angka kemiskinan di Indonesia berasal dari pedesaan.

Persoalan gender dijawab oleh pemerintah Indonesia dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) yang mengamanatkan integrasi

gender dalam pembangunan nasional oleh pemerintah pusat dan daerah untuk. Tujuan pelaksanaan PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengarusutamaan Gender berguna untuk memastikan bahwa perempuan berpartisipasi dalam semua aspek dari siklus proyek, khususnya di dalam pengambilan keputusan dan perencanaan dan dalam mengubah kehidupan perempuan dan laki-laki agar lebih baik (Kalker and Dev Nathan, 2004). Regulasi telah menjamin laki-laki maupun perempuan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan yang sama untuk terbebas dari rasa kemiskinan.

Kajian ini penting untuk dilakukan dalam rangka melihat penanggulangan kemiskinan pro gender di desa sebagai basis evaluasi, sebab pada dasarnya semenjak tahun 1999 otonomi desa telah menguat. Kajian dilakukan dengan studi dokumen pada regulasi-regulasi penanggulangan kemiskinan dan regulasi UU No 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa hingga pada regulasi turunannya. Kajian mengukur sejauh mana integrasi dalam penanggulangan kemiskinan di desa dalam aspek pemenuhan kebutuhan gender.

METODE PENELITIAN

Metode ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis

dokumen. Lokasi penelitian di desa Nglorog, Kabupaten Sragen.

PEMBAHASAN

Situasi kemiskinan merupakan suatu proses perubahan secara bertahap dari masyarakat tradisional atau belum berkembang menuju masyarakat modern dengan Negara-negara industri modern sebagai model pendekatan proses tersebut dapat dipercepat melalui intervensi dari luar, terutama yang terkait dengan sistem nilai dan mentalitas anggota masyarakat (Saptari, 1997). Lebih dari separo penduduk miskin di Negara berkembang adalah perempuan (Whitehead, 2003). Menurut (Prasetyo, 2007) penyebab kemiskinan ada dua alamiah dan buatan, dengan penjelasan sebagai berikut:

“Sebab alamiah adalah sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi rendah, dan bencana alam, sedangkan yang penyebab buatan karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, membuat sebagian anggota masyarakat lain tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, sehingga mereka tetap miskin”.

Proses desentralisasi di Indonesia memasuki periode krusial semenjak lahir regulasi tentang desa. Akselerasi regulasi tentang desa bertujuan untuk memperkuat kewenangan yang lebih luas kepada desa dan optimalisasi penanggulangan kemiskinan di desa. Pengentasan kemiskinan tidak hanya melalui cara pemberian pelayanan pada

masyarakat miskin, tapi tentang menemukan cara untuk meningkatkan lembaga masyarakat miskin perempuan dan laki-laki, untuk mengubah kemampuan produksi dan kehidupan mereka. Pada tataran desa program penanggulangan kemiskinan diintegrasikan ke dalam PJM Pronangkis. PJM Pronangkis adalah perencanaan partisipatif warga untuk mengembangkan program penanggulangan kemiskinan dalam jangka pendek selama satu tahun atau jangka menengah selama tiga tahun (Sudarno dan Suraji, 2010).

Dalam isu gender dan kemiskinan, rumah tangga merupakan salah satu sumber diskriminasi dan subordinasi terhadap perempuan. Pada fenomena kemiskinan perempuan disebabkan oleh faktor perspektif ekonomi yang berarti kesulitan untuk mendapatkan sumber daya ekonomi. Untuk bekerja perempuan mendapat upah separuh dari yang diperoleh laki-laki, selain itu mereka tidak diakui dan dihargai dan perspektif politik yakni perempuan dalam pembangunan masih rendah. Ketidaksetaraan di dalam alokasi sumber daya dalam rumah tangga memperlihatkan laki-laki dan perempuan mengalami bentuk kemiskinan yang berbeda, antara lain pada akses terhadap pelatihan, akses terhadap kredit, kontrol terhadap penggunaan tenaga kerja, pembagian kerja yang tidak seimbang, perbedaan konsumsi makanan, obat-obatan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan, dan yang terakhir adalah perbedaan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan rumah tangga (Jurnal Analisis Sosial, 2003). Secara bersamaan, langkah pemberantasan kemiskinan pun memiliki potensi tidak sensitif gender (Jurnal Perempuan, No 42

Tahun 2005).

Kemiskinan memiliki dimensi dari segi sosial, budaya, serta politik, sehingga persoalan kemiskinan bukan sekedar soal kemampuan ekonomi suatu keluarga dan/atau individu. Pengurangan kemiskinan merupakan upaya global untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Di Indonesia komitmen nasional dalam penanggulangan kemiskinan bukan menjadi hal yang baru bagi Indonesia. Sejak Rancangan Urgensi Perekonomian 1951, Rencana Lima tahun (1955-1960), dan Rencana Delapan Tahun (1961-1969) telah berusaha menyentuh kehidupan rakyat miskin di Indonesia. Pada kebijakan nasional salah satu strategi sistemik yang diambil dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang dahulunya bernama Intermittent Poverty Reduction Strategy Paper (I-PRSP).

Meninjau isi kebijakan SNPK dengan lima pilar penanggulungan kemiskinannya, maka kebijakan SNPK sudah dikatakan adil gender, dimana pada pilar peningkatan kapasitas dilakukan dengan strategi yang melihat dua sisi jenis kelamin laki-laki dan perempuan, tidak ada pihak yang diabaikan dalam kebijakan ini. Dalam penyusunan SNPK juga melibatkan partisipasi perempuan dan laki-laki juga hal ini terlihat bahwa pendekatan partisipasi melalui Analisis Kemiskinan Partisipatif (AKP). Analisis kemiskinan partisipatif dilakukan untuk memahami suara masyarakat miskin baik laki-laki maupun perempuan tentang masalah kemiskinan yang mereka hadapi dan mengakomodasikan suara masyarakat miskin dalam perumusan kebijakan. Strategi

nasional yang diimplementasikan bagi penurunan angka kemiskinan harus bisa mendorong peningkatan partisipasi dan kesejahteraan perempuan. Apabila perempuan tidak dijadikan target sasaran pengentasan kemiskinan dan analisis gender tidak digunakan untuk melihat akar penyebab kemiskinan, maka program-program pengentasan kemiskinan tidak akan bisa menjangkau kebanyakan perempuan yang memiliki keterbatasan akses terhadap ruang publik.

Pada lingkup yang lebih kecil, temuan pada program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nglorog, Kabupaten Sragen permasalahan prioritas yang diangkat adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dan pengurangan jumlah rumah tangga miskin. PJM Pronangkis diharapkan persoalan praktis dapat terpecahkan di masyarakat dan menekan bertambahnya tingkat kemiskinan. Dalam dokumen PJM Pronangkis Kelurahan Nglorog, Kabupaten Sragen telah ditegaskan adanya pelibatan masyarakat secara partisipatif namun belum secara eksplisit menyebutkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kata partisipatif tersebut.

Dalam PJM Pronangkis Kelurahan Nglorog Kabupaten Sragen Tahun 2011-2014, visi masih netral gender kata “masyarakat” dalam kalimat visi “Terwujudnya warga masyarakat Kelurahan Nglorog yang demokratis dengan membangun sinergi dengan berbagai pihak untuk menanggulangi kemiskinan secara efektif dan berkelanjutan” belum secara eksplisit mengintegrasikan gender di dalamnya. Masyarakat laki-laki dan perempuan masih dipandang sebagai entitas

yang sama. Pada kalimat misi kata “masyarakat” juga masih dipandang sebagai entitas yang sama, belum ada integrasi gender di dalamnya. Hal tersebut ditunjukkan dalam kalimat “Memfasilitasi penyediaan modal bagi warga miskin yang tergabung dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM)” dan pada kalimat “Meningkatkan ikatan dan kepedulian social masyarakat terhadap masyarakat miskin yang lemah dan tidak mempunyai kemampuan”. Pada Prinsip dokumen PJM Pronangkis sudah secara eksplisit mengintegrasikan gender di dalamnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan telah disebutkannya kaum perempuan dalam kalimat “Melibatkan semua pihak terutama masyarakat miskin dan kaum perempuan”.

Mengacu pada analisis gender model Moser untuk melihat pemenuhan gender pada sebuah program atau kebijakan, maka pengentasan kemiskinan perempuan maka program penanggulangan kemiskinan harus adil gender. Program penanggulangan kemiskinan harus memperhatikan kebutuhan gender. Maxine Molyneux membagi kebutuhan gender menjadi dua yaitu kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis (Moser, 1993). Kebutuhan praktis adalah kebutuhan perempuan yang teridentifikasi dari perannya di masyarakat, harus direspon dengan cepat (Moser, 1993 dan Ismi, 2014). Pemenuhan kebutuhan praktis bertujuan memenuhi kebutuhan dasar saat ini yang dapat langsung dinikmati, meningkatkan kondisi dan kemampuan perempuan untuk menjalankan tugasnya. Pemenuhan kebutuhan praktis gender antara lain penyediaan tungku hemat energi, air bersih, penolong persalinan terlatih dan tempat

penitipan anak (Ismi, 2014).

Sementara itu kebutuhan strategis adalah kebutuhan perempuan untuk memperbaiki posisinya yang subordinat dibawah laki-laki dalam masyarakat (Moser, 1993). Pemenuhan kebutuhan strategis akan membantu perempuan mencapai kesetaraan sehingga mampu meningkatkan posisi perempuan di sektor publik dan domestik. Pemenuhan kebutuhan praktis strategis gender menjadi hal yang harus diintegrasikan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah tidak terkecuali di Desa dalam program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Kebutuhan strategis bagi perempuan di Desa dapat diwujudkan dengan melibatkan perempuan untuk berperan aktif dalam proses perencanaan kebijakan maupun program sehingga kebutuhan perempuan dapat diakomodir untuk memperbaiki posisi perempuan dalam sektor publik. Menurut Kalker dan Dev Nathan (2004) kesetaraan gender tidak hanya memberikan bantuan kepada perempuan tapi juga membutuhkan perubahan transformatif. Kebutuhan strategis gender antara lain berupa kegiatan pemberdayaan, perubahan dalam hubungan rumah tangga, formulasi hukum yang adil gender, pengurangan kekerasan dalam rumah tangga, peningkatan kapasitas perempuan dalam area public dan system pasar serta mengubah posisi inferior perempuan melalui regulasi-regulasi yang berprespektif gender (Ismi, 2014 dan Kalkaer and Dev Nathan, 2004).

Hasil analisis dokumen PJM Pronangkis Kelurahan Nglorog Kabupaten Sragen Tahun 2011-2014 masih didominasi oleh kebijakan netral gender. Kebijakan

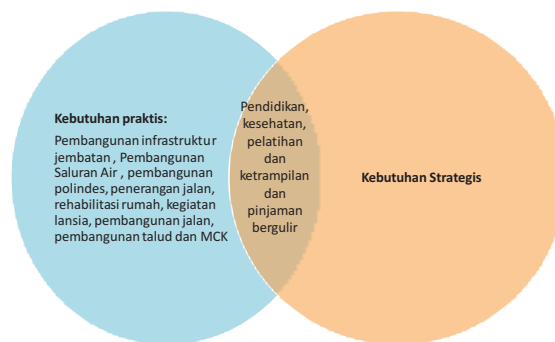
yang masih netral gender berpotensi melahirkan program atau kegiatan yang dominan pada pemenuhan kebutuhan praktis gender. Secara khusus pada bab analisis permasalahan, perumusan prioritas masalah, potensi dan kebutuhan, prioritas masalah yang disusun belum menunjukkan integrasi gender di dalamnya. Prioritas masalah didominasi pada masalah-masalah yang bersifat maskulinitas atau pembangunan infrastruktur seperti keberadaan talud, kerusakan jalan, pembangunan MCK, pembangunan jembatan, kebutuhan sarana dan prasarana gedung posyandu, dan rehabilitasi rumah. Pembangunan yang sifatnya non fisik terkait masalah pembangunan masalah kesehatan dan pembangunan ekonomi. Melihat fakta tersebut, dalam hal pemenuhan kebutuhan gender program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Nglorog Kabupaten Sragen Tahun 2011-2014 masih didominasi oleh pemenuhan kebutuhan praktis gender.

Secara detail dalam dokumen PJM Pronangkis Kelurahan Nglorog Kabupaten Sragen Tahun 2011-2014 disebutkan berbagai kegiatan yang menjadi prioritas dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kegiatan tersebut sebagian besar masih merupakan pemenuhan kebutuhan praktis gender, diantaranya:

- a. Pelayanan kesehatan termasuk dalam pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender. Pelayanan kesehatan bersifat praktis karena hanya member kemanfaatan yang bersifat temporer artinya hanya pada saat itu masyarakat yang sakit menjadi sehat. Kesehatan masyarakat akan memberikan dampak berupa produktifitas kerja sehingga

- masyarakat menjadi berdaya dalam memenuhi kebutuhan hidup, disinilah letak pemenuhan kebutuhan strategis gender dalam hal pelayanan kesehatan.
- b. Pembangunan jamban keluarga dan MCK merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan praktis gender, karena dapat mengurangi penularan penyakit akibat buang hajat di sembarang tempat dan mengajak masyarakat untuk berperilaku PHBS.
 - c. Pembangunan talud adalah pemenuhan kebutuhan praktis gender, karena manfaat dari pembuatan talud adalah membuat tanah tidak longsor dan membuat jalan menjadi awet.
 - d. Bantuan pendidikan tergolong dalam pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender. Melalui bantuan pendidikan yang diberikan, pemenuhan kebutuhan praktisnya adalah anak-anak dapat mengenyam pendidikan pada saat itu. Sehingga di masa depan dengan pendidikan yang diperoleh anak-anak dapat mendapat pekerjaan yang layak dan mampu mengentaskan kemiskinan, hal ini merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan strategis gender.
 - e. Pinjaman bergulir merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender karena dengan pinjaman yang diberikan usaha masyarakat menjadi berkembang sehingga mampu meningkatkan perekonomian warga.
 - f. Pembangunan jalan adalah bentuk pemenuhan kebutuhan praktis gender. Sebagian jalan di Kelurahan Nglorog pada awalnya masih berupa tanah sehingga dengan dibangunnya jalan akan mempermudah akses transportasi dan mengurangi penyakit ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Akut) yang disebabkan oleh debu jalan.
 - g. Lansia merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan praktis gender. Kegiatan Lansia antara lain cek kesehatan berkala dan senam khusus lansia merupakan kegiatan yang sifatnya sementara.
 - h. Rehab rumah adalah kegiatan pemenuhan kebutuhan praktis. Kegiatan ini diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang menghuni rumah tidak layak. Melalui rehabilitasi rumah masyarakat akan terjaga keselamatan dan keamanannya.
 - i. Penerangan lampu jalan tergolong dalam pemenuhan kebutuhan praktis gender. Kebutuhan praktis yang terpenuhi dengan adanya penerangan lampu jalan adalah meningkatnya akses transportasi dan mengurangi kecelakaan. Di sisi lain penerangan lampu jalan juga dapat menghindarkan perempuan dari kekerasan seksual, selama ini kekerasan seksual cenderung terjadi di tempat yang gelap. Belum mengarah ke pemenuhan kebutuhan strategis gender bisa belum diikuti dengan perubahan relasi kuasa laki-laki dan perempuan sehingga mampu menghindari tindak kekerasan terhadap perempuan.
 - j. Pelatihan dan ketrampilan merupakan pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis

- yang terpenuhi adalah masyarakat memiliki keterampilan (*skill*), dengan keterampilan tersebut masyarakat dapat diberdayakan untuk bekerja atau membuka lapangan pekerjaan sendiri. Sehingga masyarakat mampu meningkatkan perekonomian.
- k. Polindes termasuk kedalam pemenuhan kebutuhan praktis gender. Kegiatan yang diberikan untuk polindes lebih pada pembangunan fisik yakni pada pembelian perlengkapan gedung polindes.
 - l. Pembangunan Saluran Air merupakan pemenuhan kebutuhan praktis gender melalui pembangunan infrastruktur fisik saluran air untuk mempermudah pengairan.
 - m. Pembangunan infrastruktur jembatan merupakan pemenuhan kebutuhan praktis gender, untuk memperlancar jalur transportasi. Misalnya pembangunan jembatan untuk menghubungkan Kelurahan Nglorog dan Kampung Jetis Kelurahan Bandung Sogo Kecamatan Ngrampal Sragen. Sehingga akses transportasi mudah dijangkau dan biaya angkut menjadi lebih murah.



Gambar 1: Pemenuhan kebutuhan Gender dalam PJM Pronangkis Kelurahan Nglorog, Sragen
 Sumber : BKM Sumber Makmur PJM Pronangkis Kelurahan Nglorog, Sragen Tahun 2011-2014

KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan pemenuhan kebutuhan gender dalam penanggulangan kemiskinan di desa masih didominasi oleh kebutuhan praktis gender. Selanjutnya, dapat dilakukan kajian berikutnya untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan gender pada program atau kegiatan yang lain. Pemenuhan kebutuhan strategis gender perlu dibangun untuk mengubah pola relasi kuasa yang

masih timpang, sehingga laki-laki dan perempuan dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan setara. Kajian ini menyarankan agar dalam penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan desa perlu diintegrasikan responsivitas gender pada saat penyusunannya sejak tahap analisis kemiskinan. Oleh karena itu, para *stakeholders* yang dilibatkan harapannya telah memiliki perspektif gender dan/atau

dapat dilakukan peningkatan kapasitas tentang pengarusutamaan gender pada *stakeholders* di desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2014. *Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No. 06/01/Th. XVIII, 2 Januari 2015.*
- Badan Pusat Statistik. 2015. Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2015. *Berita Resmi Statistik Badan Pusat Statistik No. 86/09/Th. XVIII, 15 September 2015.*
- BKM Sumber Makmur PJM Pronangkis Kelurahan Nglorog, Kabupaten Sragen Tahun 2011-2014.
- Darwin, Muhadjir M. 2005. *Memenuasiakan Rakyat: Penanggulangan Kemiskinan sebagai Arus Utama Pembangunan.* Yogyakarta: Benang Merah.
- Ismi, Dwi Astuti Nurhaeni, 2014. *Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS).* Jakarta: AIPD.
- Jurnal Analisis Sosial. 2003. Perempuan, Kemiskinan, dan Pengambilan Keputusan. *Jurnal Analisis Sosial* No 2, Vol 8, 2003
- Jurnal Perempuan. 2005. Mengurai Kemiskinan: Dimana Perempuan? *Jurnal Perempuan* No 42, 2005.
- Kalker dan Dev Nathan. 2004. *Strategic Gender Interventions and Poverty Reduction: Principle and Practice.* Asia: IFAD UNIFEM
- Moser, Caroline O. N. 1993. *Gender Planning and Development: Theory, Practice and Training.* New York: Routledge.
- Prasetyo, A. B. (2007). *Satu Langkah Memusrumkan Kemiskinan.* Surakarta: PATTIRO Surakarta.
- Saptari, Ratna dan Brigitte Holzner. 1997. *Perempuan Kerja dan Perubahan Sosial: Sebuah Pengantar Studi Perempuan.* Jakarta : Grafiti
- Sudarno dan Suraji, 2010. *Sinkronisasi Perencanaan Desa dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan.* Jakarta: PATTIRO.
- Whitehead, A. 2003. *Failing Women, Sustaining Poverty: Gender in Poverty Reduction Strategy,* Report, the UK Gender and Development Network, h. 1 - 47